



BUPATI BANGKALAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **12** TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral guna mendukung pembangunan Daerah maupun Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, perlu melakukan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang meliputi penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Kependudukan, pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dan pembinaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048 dengan Peraturan Bupati Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023-2048.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan Jumlah, Struktur, Pertumbuhan, Persebaran, Mobilitas, Penyebaran, Kualitas, dan Kondisi Kesejahteraan yang menyangkut Politik Ekonomi, Sosial Budaya, Agama serta Lingkungan Penduduk setempat.

2. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Program KKBPK adalah Program Pemerintah yang melaksanakan kebijakan Penduduk melalui Aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan KB serta Peningkatan Kualitas Penduduk yang diukur dengan peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah upaya untuk mewujudkan Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan antar Jumlah Penduduk dengan lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan social, ekonomi dan budaya.
4. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah Indeks Komposit yang mempresentasikan lima dimensi Pembangunan berwawasan Kependudukan meliputi dimensi partisipasi, dimensi keberlangsungan/berkelanjutan, dimensi pernikahan, dimensi Integrasi dan dimensi kesetaraan.
5. Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan adalah Indeks komposit sikap dan pengetahuan remaja dan keluarga tentang isu Kependudukan yang meliputi pendapat tentang pengendalian kelahiran, dampak kepadatan dan pertambahan Penduduk, pernikahan anak, nilai anak, mobilitas, jaminan hari tua, perilaku peduli lingkungan.
6. Grand Design Pembagnan Kependudukan yang selanjtnya disebut dengan GDPK adalah arahan Kebijakan umum 25 Tahun di Bidang Pembangunan Kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN yang dijabarkan dalam road map Pembagunan Kependudukan Indonesian untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.
7. Kualitas Penduduk adalah Kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
8. Kuantitas Penduduk adalah Jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.

9. Mobilitas Penduduk adalah Gerak keruangan penduduk dengan melewati batasan wilayah administrasi Pemerintah.
10. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian Kuantitas, peningkatan Kualitas, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas serta Penataan Administrasi Kependudukan.
11. Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan Terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan Ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
12. Penataan persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah.
13. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan Ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
14. Roadmap merupakan bentuk Operasional Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ketahap lainnya, Roadmap bersifat Living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada Tingkat Nasional dan Kepala Daerah pada Tingkat Daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan Pemerintahan pada masanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini merupakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk;
- b. mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Sistematika Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048, sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : METODE PENYUSUNAN
 - BAB III : PROFIL WILAYAH
 - BAB IV : ANALISA SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB V : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN
 - BAB VI : VISI, MISI, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
 - BAB VII : ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Sistematika Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

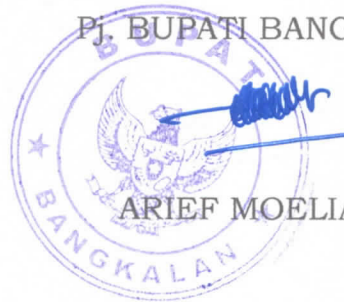
BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 19 MAR 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 19 MAR 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR II SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023-2048

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumber daya alam saja. Capaian pembangunan ditentukan oleh pembangunan kependudukan, ekonomi, budaya dan karakter bangsa, mengingat penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people-centered development), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketentraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan nasional apabila tidak disertai dengan penduduk yang berkualitas dan memiliki daya saing, karena penduduk yang berkualitas tinggi akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan sosial. Namun sebaliknya, penduduk dengan jumlah besar dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat dan berkualitas rendah akan menjadi beban pembangunan dan memperlambat tercapainya kesejahteraan rakyat karena tujuan pembangunan yang sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas kesehatan, pendidikan dan daya beli keluarga dan penduduknya tidak hanya karena kekayaan sumber daya alamnya.

Dengan diterbitkannya UU No. 52/2009 tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga”, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Tujuan ini akan dicapai melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya.

UU No. 52/2009 mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mengelola jumlah, kualitas, dan laju pertumbuhan penduduk agar tercapai kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dapat mempercepat terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan kependudukan dalam konteks mengantisipasi dan sekaligus untuk mengarahkan perkembangan kependudukan, disusunlah suatu “Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bangkalan”. Grand Design ini juga untuk memberikan arah dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang kependudukan di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
13. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
14. Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bangkalan tahun 2023-2048 merupakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Tujuan diterbitkannya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah:

1. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk;
2. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk.

BAB II

METODE PENYUSUNAN

Kegiatan ini disusun atas kerjasama lintas sektor dari berbagai SPKD yang berhubungan penduduk di Kabupaten Bangkalan. Aspek yang digambarkan dalam GDPK adalah aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan aspek kependudukan lainnya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah: Pertama, melakukan identifikasi kondisi eksisting aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan aspek kependudukan lain. Kedua, menformulasikan roadmap pembangunan kependudukan, kebijakan, strategi, program pokok di Kabupaten Bangkalan. Ketiga, merumuskan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bangkalan.

BAB III

PROFIL WILAYAH

3.1 Geografis dan Administratif

Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang berada di ujung barat Pulau Madura. Bangkalan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 – 100 meter di atas permukaan laut, terletak antara 60 51' – 70 11' Lintang Selatan dan antara 1120 40' – 1130 08' Bujur Timur. Luas wilayah Bangkalan adalah berupa daratan seluas 1.260,15 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kabupaten Sampang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Selat Madura;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Selat Madura.

Wilayah administrasi Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamal (41,40 km²), Labang (35,23 km²), Kwanyar (47,81 km²), Modung (78,79 km²), Blega (92,82 km²), Konang (81,09 km²), Galis (120,56 km²), Tanah Merah (68,56 km²), Tragah (39,58 km²), Socah (53,82 km²), Bangkalan (35,02 km²), Burneh (66,10 km²), Arosbaya (42,46 km²), Geger (123,31 km²), Kokop (125,75 km²), Tanjung Bumi (67,49 km²), Sepulu (73,25 km²), dan Kecamatan Klampis (67,10 km²).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Bangkalan adalah 23 m, terdiri dari: 0 m - 10 m = 52,86 % 11 m - 40 m = 9,58 % 40 m - 75 m = 17,80 % 76 m keatas = 19,76 %.

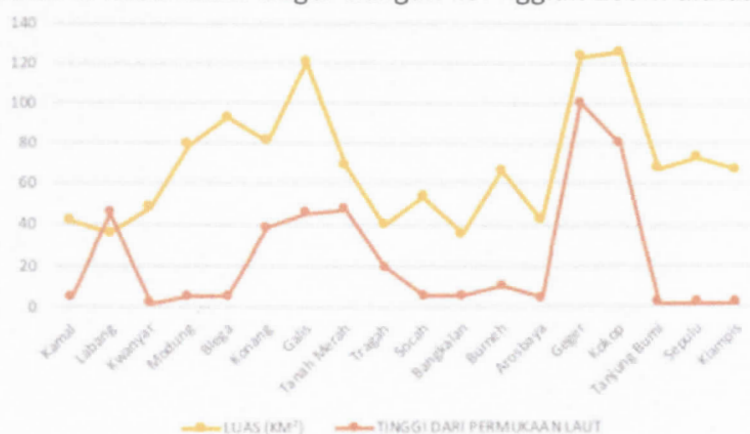
3.2 Kondisi Topografi

3.2.1 Kemiringan Lahan

Kemampuan tanah di Kabupaten Bangkalan dilihat dari kemiringannya sebagian besar memiliki kemiringan 2-15° yaitu sekitar 50,45% atau 63.002 Ha. Dan kemiringan 0-2°sekitar 45,43% atau 56.738 Ha. Sedangkan, tekstur tanah sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 116.267 Ha atau sekitar 93,10% dan untuk kedalaman spektip tanah di Kabupaten Bangkalan memiliki kedalaman >90 cm yaitu seluas 64.130/64.131 Ha atau 51,35%.

3.2.2 Ketinggian Lahan

Dilihat dari topografi, Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100m di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-10m di atas permukaan air laut. Sedangkan, wilayah yang terletak pada bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100m di atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi terletak di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100m di atas permukaan laut.



Gambar 1 Letak, Tinggi dan Luas Kecamatan Kabupaten Bangkalan
Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

3.3 Kondisi Geologi

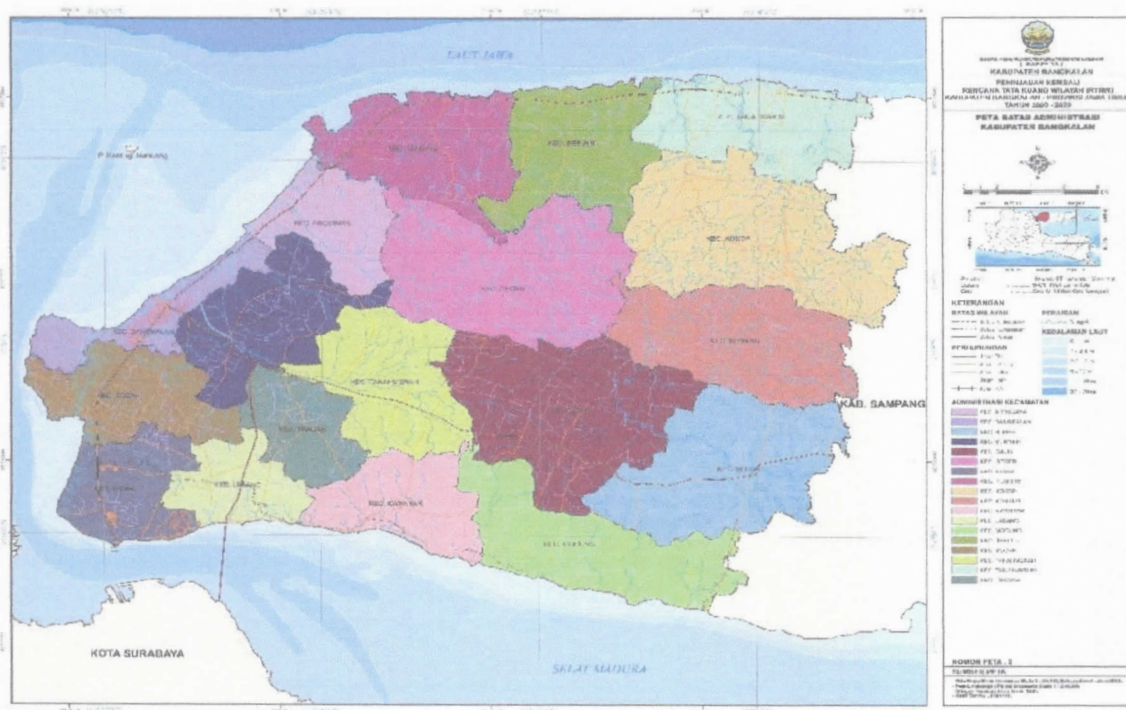
3.3.1 Batuan

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi; Allufium seluas 24.400 Ha atau sekitar 19,54%; Elistosin, Fasies, Sedimen seluas 35.594 Ha sekitar 28,50%; Fliose, Fasies Batu Gamping seluas 47.294 Ha atau sekitar 37,87%; dan Miosen, Fasies Sedimen seluas 17.600 Ha atau 14,09%. Luas dan kondisi Geologi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1 Jenis Batuan Induk Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	LUAS (HA)	%
1	Allufium	24.400	19,54
2	Elistosim, Fasies, Sedimen	35.594	28,50
3	Fliose, Fasies Batu Gamping	47.294	37,87
4	Miosen, Fasies Sedimen	17.600	14,09
	Jumlah	124.888	100

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

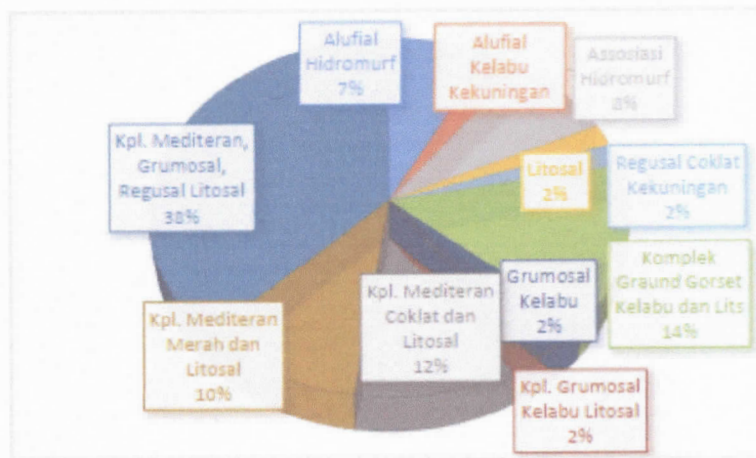


Gambar 2 Peta Kabupaten Bangkalan

Sumber: RKPd Kabupaten Bangkalan 2023

3.3.2 Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi Alufial Hidromurf; Alufial Kelabu Kekuningan; Asosiasi Hidromurf; Litosal; Regusal Coklat Kekuningan; Komplek Ground Gorset Kelabu dan Lits; Grumosal Kelabu; Kpl. Grumosal Kelabu Litosal; Kpl. Mediteran Coklat dan Litosal; Kpl. Mediteran Merah dan Litosal; Kpl. Mediteran, Grumosal, Regusal Litosal. Gambaran dan luas selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:



Gambar 3 Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Sedangkan, kedalaman spektip tanah menggambarkan ketebalan tanah dan sejauh mana akar tanaman dapat berkembang. Besarnya diukur dari permukaan tanah sampai dengan lapisan di mana akar tanaman tidak dapat lagi menembusnya. Lapisan tersebut biasanya berupa penghalang fisik yang berupa batuan atau lapisan kedap akar. Pada keadaan tertentu lapisan tersebut dapat berupa suatu lapisan yang secara kimia mengandung racun yang mematikan akar tanaman. Kedalaman efektif tanah yang tersebar di Kabupaten Bangkalan terletak pada kedalaman 0->90 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Kedalaman Spektip Tanah Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	LUAS (HA)	%
1	0 cm - 30 cm	8.044	6,44
2	30 cm - 60 cm	14.293	11,44
3	60 cm -90 cm	38.421	30,76
4	>90 cm	64.130	51,35
	JUMLAH	124.888	100

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Tekstur tanah adalah kasar halusnya bahan padat organik tanah berdasarkan perbandingan fraksi pasir, lempung debu dan air. Tekstur ini akan berpengaruh terhadap pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di tanah tersebut. Tekstur tanah di Kabupaten Bangkalan bertekstur tanah halus (liat), sedang, hingga kasar dengan luasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Tekstur Tanah Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	LUAS (HA)	%
1	Sedang	116.267	93.1
2	Halus	8.016	6,42
3	Kasar	605	0,48
	JUMLAH	124.888	100

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

3.4 Kondisi Hidrologi

Sebagai bagian dari siklus hidrologi, di Kabupaten Bangkalan terdapat sejumlah mata air, waduk, dan sungai. Pola aliran permukaan dapat dilihat dari pola aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sungai-sungai utama dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan bermuara di selat Madura dan Laut Jawa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan. Nama dan panjang sungai di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada dibawah.

Tabel 4 Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)
1	Kamal	Gulung	2,15
		Kebun	2,05
		Telang	10,15
2	Labang	Gladak Cina	3,25
3	Kwanyar	Jangjang	5,05
		Kolpoh	16,15
4	Modung	Jangklompang	7,10
		Nangger	2,15
		Lekesepat	6,55
		Sbr. Kolla	5,15
		Sikecil	6,65
5	Blega	Blega	9,95
		Lekesenga	3,15
		Cetek	2,75
		Konyak	5,25
		Pandean	9,95
6	Konang	Naden	12,15
		Jantu	2,15
		Sambiyon	5,15
		Rampasan	7,05
		Konang	7,15
		Gubugan	5,55
		Bancelok	2,15
		Sawahdalem	4,05
		Karangnata	1,35
7	Galis	Pandean	9,95
		Jangklompang	7,10
		Jangmarang	2,25
		Lembungselor	4,85
		Tlagah	3,55
		Bancelot	6,05
		Olbek	8,15
		Labisana/Labisani	3,15
8	Tanah Merah	Pancetan	5,53
		Babusong	3,25
		Pangeleyan	2,15
		Mortengah	2,55
		Seresi	5,15
		Sbr. Pettong	3,25
		Sabupuspa	1,55
		Rangka	2,15
		Dlambah Laok	3,55
		Nyantren	3,25
		Pakem	3,55
9	Tragah	Legung	4,15
		Sbr. Pocong	7,35
10	Socah	Gladak Landung	8,25
		Jambu	7,55
11	Bangkalan	Bangkalan	6,25
		Bancaran	5,25
		Serpang	7,75
12	Burneh	Jangjang	3,25
		Bubut	5,19

13	Arosbaya	Curga	5,75
		Taburjan	1,85
		Asaemtanto	7,20
		Tambangan	4,00
14	Geger	Balung	5,05
		Lutung	2,05
		Ombul	5,15
		Klubaikan	2,15
		Polongan	2,25
		Jerdabung	3,15
		Bongbaru	2,55
		Pakem	3,25
		Kalajen	3,55
		Calteng	7,05
		Sbr. Pocong	2,15
		Dungruduk	3,25
		Agung	3,15
		15	Kokop
Muara	3,55		
Kemuning	1,56		
Pokaan	1,55		
Bulengleng	3,55		
Aengkoning	2,55		
Dupok	5,95		
Brungbung	1,55		
Kirkir	3,05		
Purwo	3,15		
Lebbeng	2,15		
Sbr. Agung	4,15		
Pocet	4,15		
16	Tanjung Bumi		
		Torpong	7,05
		Budduk	7,15
		Tambak Pocok	4,75
		Tambeng	22,15
17	Sepulu	Serogan	7,55
		Janger	2,55
		Dangah	1,15
		Sangkeyah	2,25
		Mocangan	3,55
		Gladakmati	7,55
		Ganseyan	2,15
		Lembung	3,25
18	Klampis	Patemon	1,85
		Bupeng	2,15
		Larangan	1,75
		Manonggal	2,15
		Nangsangkan	1,25
		Ganggakap	2,15
		Pajung	3,15
		Brumbung	1,55

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Selain dipengaruhi oleh adanya sungai, kondisi hidrologi di Kabupaten Bangkalan juga dipengaruhi oleh beberapa sumber air. Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Bangkalan mempunyai kualitas air baku yang cukup baik untuk kebutuhan irigasi maupun air bersih.

3.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura dan Wilayah Indonesia Timur mempunyai potensi pengembangan wilayah yang cukup prospektif dengan luas wilayah sebesar 1.260,14 Km² yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan militer, dan lain-lain.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh kegiatan pertanian berupa pertanian sawah irigasi, lahan kering, perkebunan, maupun tegalan. Dalam perkembangannya, penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan terkait dengan pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman, fasilitas umum maupun untuk pengembangan industri. Pengembangan pemanfaatan lahan yang cukup terlihat adalah pengembangan kawasan Suramadu. Setelah dibukanya jalur atau akses Suramadu maka kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu khususnya di sekitar kawasan kaki jembatan Suramadu.

Data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan KLHS P-RPJMD tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Bangkalan masih mencukupi kebutuhannya untuk pemanfaatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan penggunaan data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang ada dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi KLHS.

Saat ini kawasan tersebut masih belum dikembangkan secara maksimal, lahan yang ada di sepanjang kanan maupun kiri jalur menuju jembatan masih berupa lahan kosong yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun tegalan, sedangkan disepanjang koridor jalan utama mulai tumbuh kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal berupa warung-warung non permanen yang menjual souvenir, makanan, maupun minuman. Kondisi yang kurang teratur dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan kumuh pada kawasan tersebut. Sehingga perlu pengendalian maupun pengaturan lebih lanjut pada kawasan tersebut.

Secara garis besar penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan dibagi dalam dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi:

3.5.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung terbagi atas kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan perlindungan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, disamping kawasan rawan bencana alam. Terkait dengan klasifikasi kawasan lindung, berikut dapat dikemukakan informasi masing-masing kawasan sebagaimana di bawah ini:

1. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Bangkalan terdiri dari taman wisata alam. Pada dasarnya kawasan pelestarian alam juga merupakan kawasan lindung yang harus tetap dilestarikan sehingga dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata. Kriteria kawasan wisata adalah sebagai berikut:

- Kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;
- Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk;
- Mengandung satwa buru yang dapat dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa;
- Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Kawasan lindung dengan kriteria diatas pada wilayah Kabupaten Bangkalan terdapat di Kecamatan Geger yaitu Kawasan wisata Gunung Geger yang merupakan kawasan dengan ketinggian 125 mdpl dengan luas 30,2 Ha.

2. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: lingkungan bangunan non gedung, lingkungan bangunan gedung serta halamannya. Kawasan tersebut memiliki kriteria antara lain: (1) mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan (2) Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh suatu daerah serta keberadaanya memerlukan upaya konservasi.

a. Lingkungan Bangunan Non Gedung

Lingkungan Bangunan non gedung merupakan suatu tempat yang dapat diperuntukkan sebagai cagar budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan yang harus dilestarikan antara lain: Makam Aer Mata Ratu Ebu dan Makam Agung di Kecamatan Arosbaya dan Makam Syaichona Kholil di Kecamatan Bangkalan.

b. Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya

Lingkungan Bangunan gedung dan halamannya merupakan cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno. peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar budaya diantaranya: Klenteng Eng An Bio di Kecamatan Bangkalan dan Mercusuar di Kecamatan Socah.

c. Kawasan Perlindungan Bawahannya

Kawasan perlindungan bawahannya mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan karst 1. Hutan Lindung, merupakan kawasan dengan sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan tidak dapat dialihkan peruntukannya.

Hutan lindung di Kabupaten Bangkalan total seluas 654,8 Ha di Desa Gebang seluas 10,6 Ha, Desa Lajing seluas 150,6 Ha, Desa Mrandung seluas 194,0 Ha, Desa Maneron seluas 29,7 Ha, Kelurahan Pejagan seluas 32,3 Ha. Desa Labuhan, Desa Lembung Paseser, Desa Aeng Tabar, Desa Banyusangka seluas 169 Ha dan Desa Martajasah seluas 55,6 Ha.

Kawasan ini bisa dikategorikan sebagai kawasan lindung terbatas. Karena sifat yang dimilikinya maka kawasan yang memiliki perbukitan Kars mutlak tidak bisa di eksploitasi dan diperlakukan konservasi.

Kawasan perlindungan Bentang Alam Karst di Kabupaten Bangkalan berada di Kecamatan Socah, Burneh, Galis, Tragah dan Blega. Kawasan tersebut apabila tidak dilindungi hidrologi dan ekologisnya akan terjadi bencana longsor dan banjir serta harus di kelola dengan baik.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar sungai, kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar danau/waduk, adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Waduk di Kabupaten Bangkalan direncanakan di Kecamatan Blega.

Kawasan di sekitar mata air, adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air. Perlindungan di sekitar mata air di wilayah Kabupaten Bangkalan sekurang-kurangnya jarak jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Kawasan mata air ini hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.

Kawasan sempadan pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan diarahkan pada sepanjang pantai berjarak sekitar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pantai-pantai yang perlu dilindungi adalah pantai yang terdapat di Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis, Arosbaya, Kamal, Socah, Labang, Kwanyar, Modung dan Kecamatan Bangkalan. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungaibuatan/kanal/seluruh jaringan irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan sempadan sungai dilakukan dengan pembebasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai bagi sungai yang berada di luar wilayah permukiman, 50 meter pada kiri kanan anak-anak sungai yang berada di luar permukiman, dan 15 meter dari kiri kanan sungai bagi sungai besar dan anak-anak sungai yang berada di sekitar permukiman.

3.5.2 Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Rakyat

Wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki kawasan hutan yang tersebar secara tidak merata pada wilayah Kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran, dimana diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan rakyat. Jenis hutan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan didominasi oleh kawasan hutan rakyat yang tersebar merata di 16 Kecamatan. Hutan Rakyat yang berada di Kabupaten Bangkalan berada di 16 Kecamatan: Kecamatan Arosbaya 147.00 Ha, Kecamatan Kokop 224,2 Ha, Kecamatan Tanah Merah 1231,31 Ha, Kecamatan Kwanyar 846.31 Ha, Kecamatan Konang 762.00 Ha, Kecamatan Klampis 1253 Ha, Kecamatan Sepulu 1573 Ha, Kecamatan Burneh 200 Ha, Kecamatan Tragah 732,69 Ha, Kecamatan Tanjung Bumi 535,50 Ha, Kecamatan Labang 296.96 Ha, Kecamatan Modung 1029,00 Ha, Kecamatan Galis 1744,65 Ha dan Kecamatan Socah 349,00 Ha.

2. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terbatas diwilayah Kabupaten Bangkalan terdiri dari hutan tanaman jenis mahoni seluas 61,00 Ha, jenis lamtoro gung serta jenis sawo kecil seluas 55,20 Ha. Selanjutnya untuk hutan produksi tetap merupakan hutan dengan jenis accasia seluas 1.869,75 Ha serta hutan jati seluas 101,50 Ha. Kawasan hutan konservasi terdapat di sekitar pantai yaitu jenis hutan bakau yang banyak terdapat di sepanjang pantai seluas 87,85 Ha.

Kawasan hutan produksi luas seluruhnya adalah 4.395,85 Ha yang terdapat di Kecamatan Kwanyar, Tragah, Blega, Modung, Konang, Galis, Bangkalan, Tanjung Bumi, Kokop, Sepulu, Klampis, dan Kecamatan Geger.

3. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan Pertanian tanaman pangan seluas 30.002 Ha, hal ini sesuai dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam RTRW Kabupaten Bangkalan. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bertujuan untuk menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Lahan pertanian pangan di Kabupaten Bangkalan terbagi atas kawasan pertanian lahan basah (irigasi) dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan lahan basah dan kering terletak di hampir 18 Kecamatan.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri dari kawasan perikanan pertambakan dan kawasan perikanan sungai. Untuk kawasan perikanan pertambakan, terdapat di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Labang, Tragah, Tanah Merah, Konang, Galis, Burneh, Kokop dan Kecamatan Geger

dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan untuk perikanan pertambakan. Sedangkan kawasan perikanan sungai terdapat di Kecamatan Blega, Socah, Tanjung Bumi, Kokop dan Kecamatan Konang.

5. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan, di mana luas yang terdata sebesar 541,98 Ha. Mengingat jenis perkebunan yang juga menggunakan tegalan, maka sebenarnya termasuk luas perkebunan adalah 12.817,04 Ha.

6. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Bangkalan dibagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu Kawasan ternak kecil meliputi kluster 1 (satu): Kec. Tanah Merah, Tragah, Kwanyar dan Labang. Kluster 2 (dua) yaitu Kec. Arosbaya, Geger, Klampis dan Sepulu. Kawasan ternak besar meliputi Kluster 1 (satu) yaitu Kec. Bangkalan, Labang, Kamal, Arosbaya, Klampis dan Kokop. Kluster 2 (dua) yaitu Kec. Burneh, Tanah Merah, Tragah, Kwanyar, Galis, Blega dan Konang. Masing-masing kawasan sudah dilengkapi dengan fasilitas peternakan yaitu rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan.

7. Kawasan Pariwisata

Ditinjau dari karakteristik dan potensi obyek-obyek wisatanya, sektor kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu kawasan wisata alam, wisata religi, dan wisata minat khusus/budaya. Selanjutnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan ini dapat dikembangkan melalui pembentukan zona wisata, yaitu:

- **Zona Pesisir Selatan**, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Kwanyar, Labang dan Kamal (Pantai Rongkang, Wisata Bahari Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, Wisata gua Kecamatan Labang, Kolam Renang Impian Maya Kwanyar, Pantai Kutai Sukbar, dan Kapal Rindu, jembatan Rindu).
- **Zona Kota Bangkalan**, meliputi obyek wisata yang terdapat di Kecamatan Socah, Bangkalan dan Burneh (Wisata pemandian Jokotole di Kecamatan Socah, Mercusuar Sembilangan di Kecamatan Bangkalan, Wisata kebun salak dan kolam laggundih di Desa Kramat, Wisata budaya Makam Syaichona Kholill di Kecamatan Bangkalan, wisata sejarah benteng Belanda dan museum purbakala di Kecamatan Bangkalan dan wisata budaya pagelaran Kerapan sapi di desa Bancaran Kecamatan Bangkalan, Wisata Bahari Sungai Bancaran di Kecamatan Bangkalan serta kawasan wisata minat khusus disekitar interchange morkepek).
- **Zona Pesisir Utara**, meliputi obyek wisata di Kecamatan Arosbaya, Sepulu dan Tanjungbumi (Pesarean Aer Mata Ebu di Kecamatan Arosbaya, wisata pantai Maneron di Kecamatan Sepulu, wisata Pantai Siring Kemuning di Kecamatan Tanjungbumi, wisata batik madura di Kecamatan Tanjung Bumi, Pantai Wisata Talango di Kecamatan Tanjung Bumi, serta Mangrove Labuhan di Kecamatan Sepulu).
- **Zona Gunung Geger**, meliputi obyek wisata Gunung Geger yang terdapat di Kecamatan Geger Elevasi 125 mdpl dengan suhu rata-rata 28°C pada siang hari, suhu rata-rata 24°C pada malam hari, kecepatan angin kurang lebih 10 knot, merupakan satu-satunya daerah sejuk di Kabupaten Bangkalan dan merupakan daerah yang tertinggi di Pulau Madura. Sebuah arca yang menyerupai Duarapala dengan memegang tongkat, terpahat pada salah satu bagian tebing kapur. Kemungkinan besar masih banyak peninggalan purbakala yang belum ditemukan ataupun terkubur. Peninggalan budaya sejarah masa lalu yang tak ternilai harganya Dua buah gua yang berada di dekat makam RA Tunjung Sekar, dinamakan gua putra dan gua putri. Pintu masuk kecil dan merupakan satu-satunya masuk ke gua dengan cara membungkuk. Gua ini dibentuk dan dindingnya halus, tidak terdapat stalaktit maupun stalakmit. Pada bagian dasar gua terdapat lobang besar dan lebih menyerupai sebuah bentuk makam.

8. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangkalan terbagi atas kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan, luas kawasan permukiman perdesaan sebesar 10.561,98 Ha, sedangkan luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 6.892,30 Ha.

9. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Bangkalan terletak di Kecamatan Burneh, Kwanyar, Arosbaya, Modung, Tanjung Bumi, Blega, Galis, Kamal, Socah, Geger, Kokop, Tragah dan Kecamatan Labang dengan jenis tambang berupa galian golongan C yang meliputi, pasir, batu gunung, fosfat, kapur, pasir kwarsa, dan batu gips.

Lokasi penyebaran bahan galian golongan C di Kabupaten Bangkalan berdasarkan peta kontur dan peta geologi adalah sebagai berikut:

a) Batu Kapur/Batu Gamping (Limestone)

Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan kecuali Kecamatan Bangkalan.

b) Dolomit

Dolomit tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kamal, Tragah, Labang dan Kecamatan Kwanyar.

c) Batu Phospat (Phospate)

Batu Phospat tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu, Kecamatan Labang, Modung, Blega, Tragah dan Kecamatan Kwanyar.

d) Pasir Kwarsa (Quart Sand)

Pasir Kwarsa tersebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Burneh, Tanjung Bumi, Kokop, Galis, Sepulu dan Kecamatan Klampis.

e) Lempung (Clay)

Lempung tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tragah, Modung, Blega, Galis, Sepulu, Kokop, Geger, Klampis, Konang dan Kecamatan Tanjung Bumi.

10. Kawasan Perdagangan

Kawasan perdagangan di Kabupaten Bangkalan terletak di area ibukota kecamatan yang meliputi Kecamatan, Socah, Kamal, Burneh, Arosbaya, Sepulu, Galis, Geger, Blega, Tanah Merah, Kokop, Konang, Tragah, Kwanyar, Klampis, Labang, Tanjung Bumi, Kecamatan Modung.

3.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang termasuk dalam kaitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat kegiatan nasional. Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bangkalan memiliki kawasan strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

3.6.1 Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Baru

A. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu

Merupakan Kawasan Strategis yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitar dan dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang. Kawasan ini ditentukan berdasarkan potensi yang ada, serta memiliki aglomerasi terhadap pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, dengan pertimbangan dapat memberikan dampak

perkembangan pada suatu wilayah. Kawasan ini meliputi sepanjang jalan tol dan akses jalan Tol Suramadu dan sekitarnya seluas \pm 600 ha. Secara umum, peruntukannya dititikberatkan pada keberadaan industri ringan dan hijau yang didukung dengan kawasan perdagangan, wisata dan permukiman.

B. Kawasan Industri & Pelabuhan Socah

Pengembangan pelabuhan Socah yang terintegrasi dengan Kawasan Industri pendukungnya merupakan perencanaan jangka menengah (intermediate term planning) dalam pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan industri di Madura.

C. Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan

Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis dan Arosbaya adalah kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Kawasan ini direncanakan memiliki akses langsung dengan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu melalui pengembangan jalan akses Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan melalui interchange Burneh. Perkembangan 3 (tiga) kawasan strategis dimaksud didukung dengan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti kawasan pendidikan di Desa Telang Kecamatan Kamal, perkembangan masing-masing ibu kota Kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

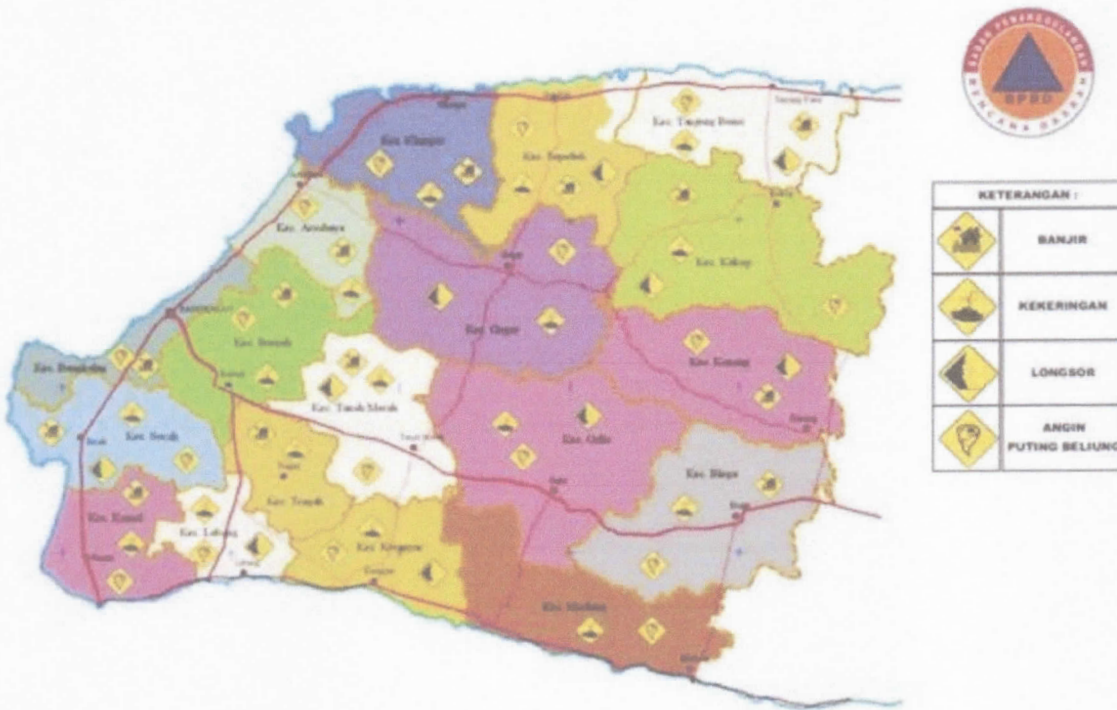
3.6.2 Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan dibentuk untuk mewujudkan Kawasan yang maju, mandiri, berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi dan nilai tambah. Kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Bangkalan meliputi kecamatan Socah-Burneh-Bangkalan (SOBURBANG). Kecamatan Burneh (perkotaan Burneh) sebagai pusat Kota Tani Utama (KU). Kecamatan Socah (perkotaan Socah) dan kecamatan Bangkalan (perkotaan Bangkalan) sebagai Kawasan Kota Tani (KT). Adapun Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan SOBURBANG, ditetapkan berdasarkan kebutuhan ruang untuk memwadahi kegiatan agribisnis. Kota Tani Utama (KU) berfungsi sebagai pusat terminal agribis, /pengkajian teknologi agribisnis, pusat beragam bibit tanaman sekaligus agrowisata edukasi.

3.6.3 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bangkalan dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Kawasan rawan banjir yang meliputi Kecamatan Blega, Kwanyar, Modung, Tanjung Bumi, Socah dan Sepulu.
- B. Kawasan rawan longsor yang meliputi Kecamatan Kokop, Geger, Galis, Klampis, Tanjung Bumi, Burneh dan Konang.
- C. Kawasan rawan puting beliung yang meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Geger, Kwanyar, Tragah, Burneh dan Bangkalan.
- D. Kawasan rawan abrasi yang meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis, Arosbaya, Modung, Kwanyar, Bangkalan, Socah dan Kamal.
- E. Kawasan Rawan Kekeringan meliputi Kecamatan Kokop, Tragah, Konang, Galis, Labang dan Tanah Merah.



Gambar 4 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten bangkalan Tahun 2022

Sumber: BPBD Kab Bangkalan

Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bangkalan tahun 2022 menunjukkan kenaikan kejadian bencana yang signifikan dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022, kejadian rawan bencana berjumlah 59 kejadian dengan kejadian terbanyak di Kecamatan Blega yaitu 10 kejadian bencana. Untuk lebih jelasnya data kejadian bencana tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Kejadian Bencana di Kabupaten Bangkalan 2018-2022

NO	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bangkalan	3	4	5	2	7
2	Socah	0	1	1	4	4
3	Burneh	1	3	7	3	3
4	Kamal	0	2	1	0	4
5	Arosbaya	0	5	4	2	4
6	Geger	0	7	4	0	6
7	Klampis	0	1	1	0	0
8	Sepulu	0	0	2	0	0
9	Tanjung Bumi	0	0	2	2	1
10	Kokop	1	1	2	2	2
11	Kwanyar	0	0	1	1	1
12	Labang	0	0	3	3	3
13	Tanah Merah	0	1	1	1	3
14	Tragah	1	1	4	0	1
15	Blega	0	5	6	9	10
16	Modung	0	1	0	2	1
17	Konang	1	1	1	0	7
18	Galis	1	2	2	4	2
	Jumlah	8	35	47	35	59

Sumber: BPBD Kab. Bangkalan

3.7 Kondisi Iklim

Kabupaten Bangkalan memiliki 2 musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Pada 2022 Kabupaten Bangkalan mengalami suhu terendahnya pada Juli sebesar 22,2 derajat celcius. Sedangkan suhu tertinggi terjadi pada Januari dan September sebesar 35,5 derajat celcius. Dari segi kelembapan, minimum terjadi pada September sebesar 35, sedangkan tertinggi pada Januari sebesar 99.

Tabel 6 Suhu dan Kelembapan Kabupaten Bangkalan tahun 2022

Bulan	Suhu			Kelembapan		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	23,8	27,7	35,5	57	81,7	99
Februari	22,5	27,4	34	52	82,4	97
Maret	23,2	28,1	35	52	81,6	98
April	23,2	28,9	34,8	45	77,7	98
Mei	23,2	29	34,8	48	79,1	98
Juni	23,8	28,4	33,8	44	77,5	95
Juli	22,2	28,5	33,6	41	72,8	94
Agustus	23,8	28,7	34,6	40	70,8	92
September	24,6	29,5	35,5	35	69,4	94
Oktober	23,4	28,1	35,2	46	79	98
November	22,8	27,8	34,8	57	82,6	98
Desember	23,8	28,1	34,6	46	80,5	97

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Kecepatan angin di Kabupaten Bangkalan pada 2022 tertinggi hingga 22 m/sec yang terjadi pada bulan Maret, Sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada Mei sebesar 1001,4 dan tertinggi pada bulau September sebesar 1019,8.

Tabel 7 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Bangkalan 2022

Bulan	Kecepatan Angin (m/sec)			Tekanan Udara (mbar)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	0	1,8	15	1 003,4	1 008,5	1 012,1
Februari	0	1,7	17	1 003,6	1 008,0	1 011,5
Maret	0	2,2	22	1 003,1	1 007,6	1 011,9
April	0	1,9	13	1 003,8	1 008,2	1 012,2
Mei	0	2,9	16	1 001,4	1 008,5	1 012,2
Juni	0	2,8	15	1 004,7	1 008,9	1 011,6
Juli	0	4	15	1 005,4	1 009,0	1 011,8
Agustus	0	4,4	18	1 005,7	1 009,4	1 012,5
September	0	3,8	18	1 004,4	1 009,8	1 019,8
Oktober	0	2,4	23	1 004,2	1 008,9	1 013,1
November	0	1,9	14	1 004,0	1 008,5	1 012,7
Desember	0	2,8	19	1 001,6	1 007,3	1 012,0

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Pada 2022, jumlah curah hujan terendah terjadi pada September sebesar 0,6 mm, sedangkan tertinggi terjadi pada Februari sebesar 426,9 mm. Pada September hanya terjadi 1 hari hujan sehingga menjadi yang terendah, sedangkan pada Februari terjadi 23 hari hujan sehingga menjadi yang tertinggi. Penyinaran matahari dengan presentase terendah terjadi pada November sebesar 3,1%, sedangkan tertinggi terjadi pada Agustus sebesar 7,9%.

Tabel 8 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari Kab. Bangkalan 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
Januari	264,7	19	4,4
Februari	426,9	23	3,8
Maret	360,3	18	4,8
April	98,6	7	5,6
Mei	104,9	11	5,3
Juni	98,2	15	6,1
Juli	12,4	4	7,8
Agustus	1,3	2	7,9
September	0,6	1	6,8
Oktober	288	17	4,1
November	423,3	22	3,1
Desember	190,1	18	3,5

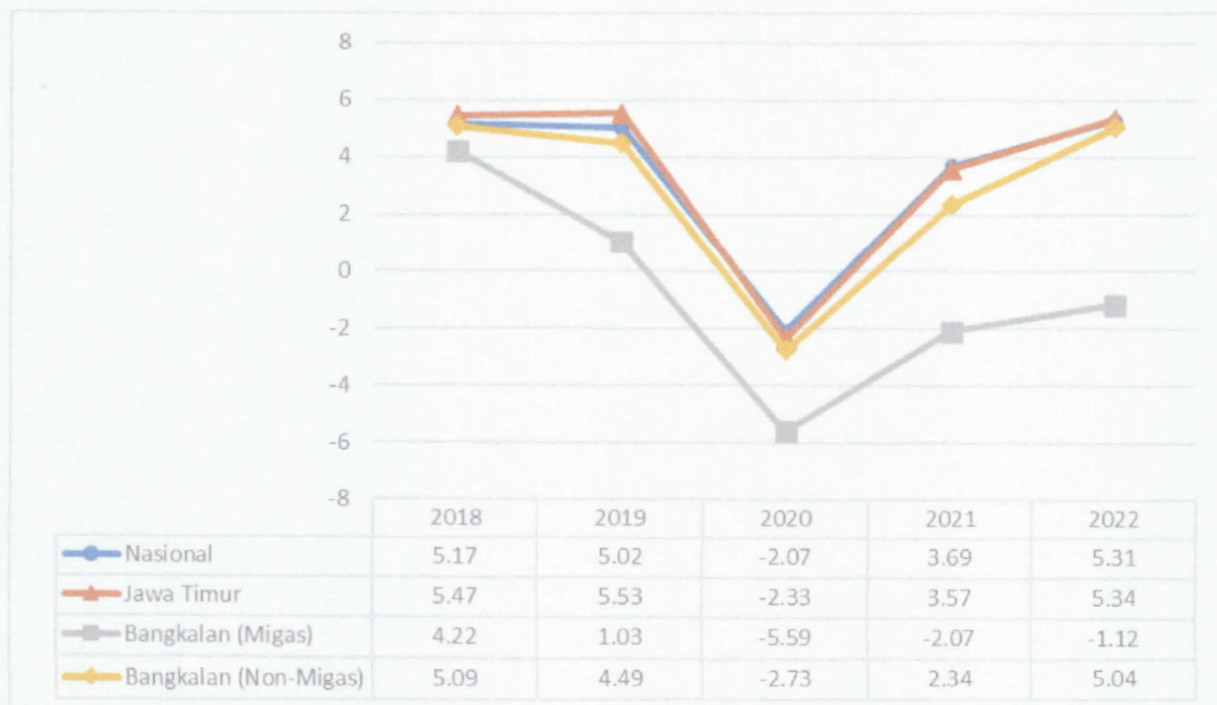
Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

3.8 Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Karakteristik makro pembangunan daerah yang ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah, harus dapat menginformasikan tingkat keberdayaan kebijakan dalam mendukung tujuan pembangunan. Representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah, dituangkan dalam Indikator Makro pembangunan daerah meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Pendapatan Perkapita; Inflasi; Struktur Perekonomian Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Pembangunan Manusia.

3.8.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan. Baik tidaknya kondisi perekonomian dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan.



Gambar 5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan Prov. Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Republik Indonesia

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari meningkatnya PDRB setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Gambaran umum perekonomian daerah dapat dideskripsikan dengan data tentang PDRB Kabupaten Bangkalan. Secara esensial, data dimaksud mampu memberikan informasi tentang struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta PDRB Perkapita Masyarakat Bangkalan. Perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan dimaksud dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 9 PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

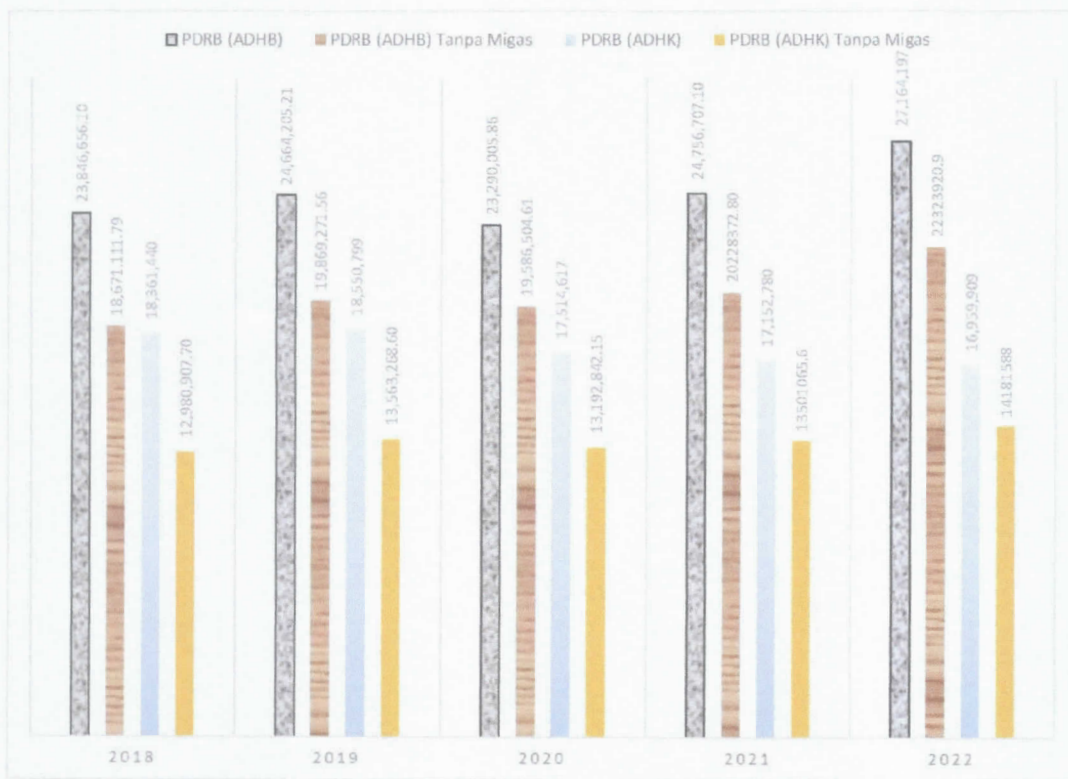
Kat.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 726,64	3 694,66	3 746,91	3 670,21	3 768,43
B	Pertambangan dan Penggalian	5 626,28	5 239,33	4 554,70	3 888,81	3 026,38
C	Industri Pengolahan	423,93	439,34	396,75	407,32	447,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,93	8,36	8,36	8,54	9,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,31	14,07	14,57	15,62	16,5
F	Konstruksi	2 106,32	2 279,88	2 122,80	2 166,70	2 316,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 720,68	2 905,45	2 674,91	2 889,15	3 090,66
H	Transportasi dan Pergudangan	246,74	263,58	239,16	250,66	299,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	204,21	220,09	203,29	210,42	226,01
J	Informasi dan Komunikasi	991,38	1 073,78	1 163,03	1 235,37	1 285,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	304,78	318,39	316,86	320,61	329,07
L	Real Estate	205,07	217,97	223,51	228,6	240,98
M,N	Jasa Perusahaan	41,41	44,02	41,18	41,83	41,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	888,74	923,86	902,05	899,51	921,97
P	Jasa Pendidikan	654,75	696,55	709,75	713,63	718,42

Kat.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,38	73,68	80,51	85,38	87,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	130,89	137,79	116,29	120,4	134,05
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8 361,44	18 550,80 1	7 514,62	17 152,78	16 959,91

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan di atas, maka pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditentukan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2018 dan 2022 jika dibandingkan menurun drastis. Data pertumbuhan ekonomi tahun 2018 adalah 4,22%, 2019 sebesar 1,03%. Sedangkan pada tahun 2020 pergerakan ekonomi melambat sampai dengan -5,59% dan di tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih negatif yaitu -2,07. Penurunan yang cukup tajam dikarenakan adanya shock dari musibah global berupa serangan Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 mengalami pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,12%.

Secara lengkap dapat diketahui perubahan PDRB ADHB dan ADHK baik dengan migas maupun non migas sebagaimana grafik berikut:



Gambar 6 Perkembangan PDRB ADHB dan DHK Kabupaten Bangkalan 2018-2022

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Sehubungan dengan pertumbuhan migas dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang tajam, sedangkan aktifitas pengeboran migas yang berada di lepas pantai dan tidak berpengaruh langsung pada perekonomian masyarakat, maka dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan menggunakan PDRB ADHK tanpa migas.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 10 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

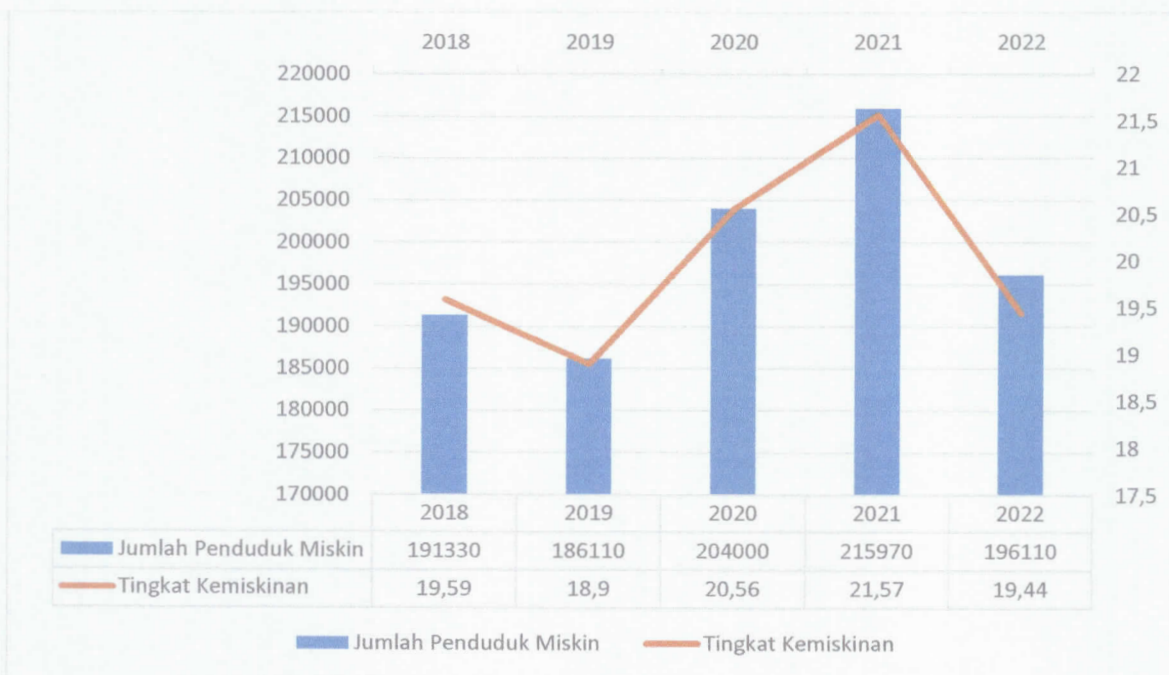
Kategori	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,89	-0,86	1,41	-2,05	2,68
B	Pertambangan dan Penggalian	2,26	-6,88	-13,07	-14,62	-22,18
C	Industri Pengolahan	6,28	3,64	-9,69	2,66	9,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,60	5,46	-0,04	2,18	6,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,10	5,72	3,53	7,25	5,61
F	Konstruksi	7,40	8,24	-6,89	2,07	6,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	6,79	-7,93	8,01	6,97
H	Transportasi dan Pergudangan	7,34	6,83	-9,27	4,81	19,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,54	7,7,8	-7,63	3,51	7,41
J	Informasi dan Komunikasi	8,11	8,31	8,31	6,22	4,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,93	4,47	-0,48	1,19	2,64
L	Real Estate	6,87	6,39	2,54	2,28	5,42
M,N	Jasa Perusahaan	6,53	6,30	-6,46	1,59	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,64	3,95	-2,36	-0,28	2,50
P	Jasa Pendidikan	6,84	6,38	1,90	0,55	0,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,50	7,75	9,27	6,04	2,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,70	5,27	-15,61	3,54	11,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,22	1,03	-5,59	-2,07	-1,12

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan, dimana adanya pandemi covid-19 mengakibatkan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bangkalan bahkan nasional dan dunia menjadi menurun dan hal ini menjadi sebab penurunan pertumbuhan ekonomi. Adapun aspek yang mengalami penurunan signifikan terkait pandemi covid- 19 tersebar pada beberapa lapangan usaha diantaranya jasa lainnya dan transportasi dan pergudangan.

3.8.2 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bangkalan mencapai 19,44 persen pada tahun 2022. Jumlah tersebut turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 21,57 persen. Berikut gambaran kemiskinan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 hingga 2022 dilihat dari jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2018-2019 jumlah kemiskinan dan tingkat kemiskinan menunjukkan trend menurun yang artinya memiliki makna positif dalam pembangunan. Namun pada tahun 2020 dan 2021, pada saat pandemi Covid-19 terjadi, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan meningkat cukup signifikan, bahkan lebih tinggi dari tahun 2018. Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia. Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi melambat dan tidak mampu mendorong aktivitas perekonomian masyarakat yang menurun drastis. Kemudian pada 2022 mengalami penurunan jumlah kemiskinan dan tingkat kemiskinan akibat dari pemulihan ekonomi pasca pandemi.



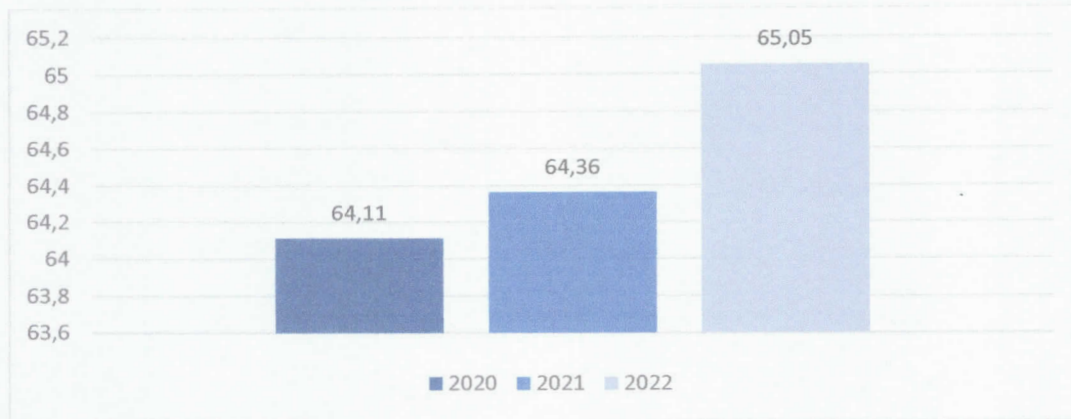
Gambar 7 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

3.8.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di mana hal ini merupakan cermin dari kualitas kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat. Sejak tahun 2010, BPS mengembangkan metode baru dalam melakukan perhitungan IPM. Dengan demikian, dalam perubahan RPJMD ini akan digunakan data perhitungan IPM Kabupaten Bangkalan dengan metode yang baru, sehingga terdapat perbedaan data dengan yang telah disajikan sebelumnya dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan.

Semakin tinggi nilai IPM mendiskripsikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap penanganan sosial budaya, semakin mengarah pada efektivitas, oleh karena itu, Kabupaten Bangkalan, senantiasa berupaya dalam meningkatkan IPM.

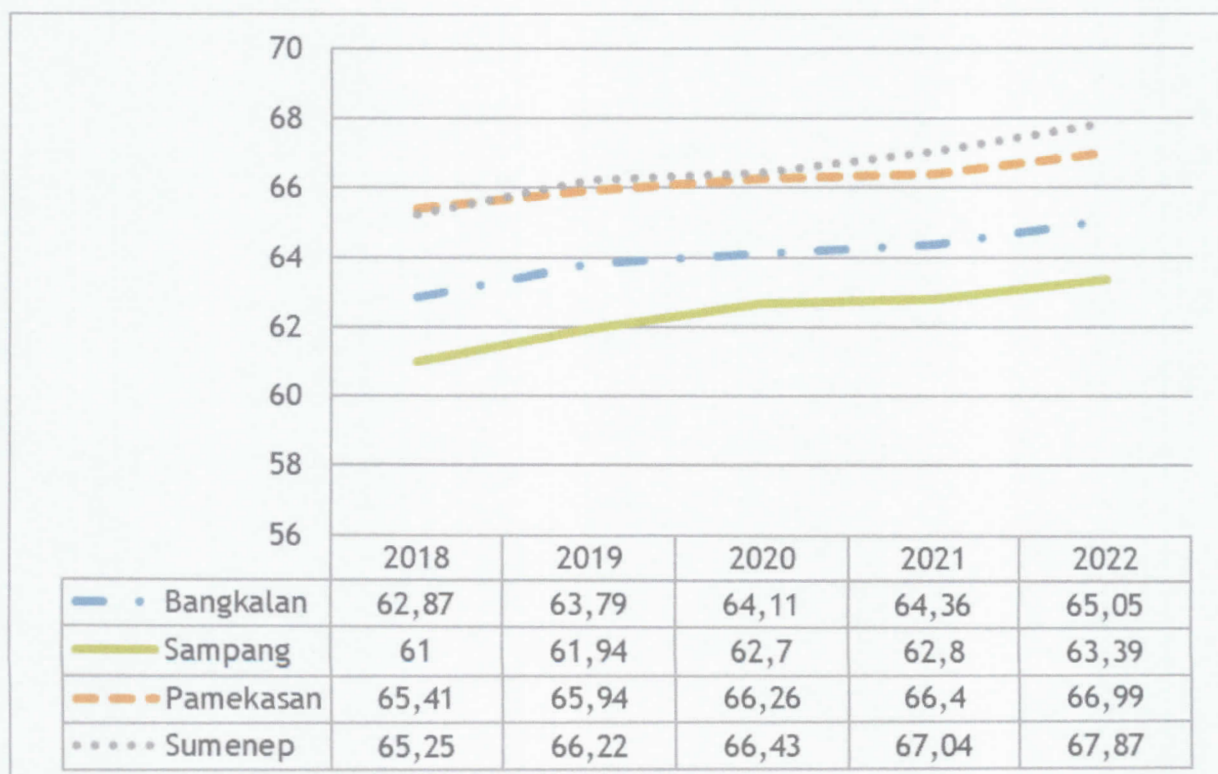


Gambar 8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2022

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari nilai IPM sejak tahun 2020-2022 ini terus meningkat. Pada tahun 2020 berada di posisi 64,11. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Bangkalan meningkat pada posisi 64,36. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 65,05. Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk terus berupaya mengejar ketertinggalan IPM dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya. Rendahnya IPM Kabupaten Bangkalan, disumbang oleh faktor rata-rata lama sekolah masyarakat yang masih rendah yaitu 5,97 (tahun 2022). Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat hanya berpendidikan hingga sekolah dasar. Sehingga Bangkalan masih harus mengejar ketertinggalan untuk memenuhi program wajib belajar 12 tahun.

Jika dibandingkan dengan IPM dari 4 Kabupaten di Pulau Madura, maka IPM Kabupaten Bangkalan masih kalah dengan Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Artinya, masih terendah kedua di Pulau Madura. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar ada akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan yang lebih masif agar terjadi percepatan peningkatan IPM. Berikut gambaran perbandingan IPM di 4 Kabupaten di Pulau Madura.



Gambar 9 Perbandingan IPM di 4 Kabupaten di Pulau Madura

Sumber: BPS Jawa Timur

3.8.4 Laju Inflasi

Tingkat inflasi PDRB Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yang tercermin dari laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB sebagaimana terlihat dalam di bawah ini:

Tabel 11 Laju Implisit PDRB Kabupaten Bangkalan 2018-2022

Kat.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	2,41	1,31	1,84	6,82
B	Pertambangan dan Penggalian	14,76	0,33	-9,77	41,44	37,40
C	Industri Pengolahan	2,35	1,36	0,53	2,85	4,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,31	1,64	-0,95	0,24	2,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	1,30	0,24	0,40	4,40
F	Konstruksi	0,78	0,68	0,46	0,22	6,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,75	1,67	2,11	1,55	5,11
H	Transportasi dan Pergudangan	2,28	1,80	0,68	-0,11	5,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	2,85	1,50	5,25	4,52
J	Informasi dan Komunikasi	0,11	0,23	0,73	0,29	2,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,86	1,06	0,19	1,86	6,38
L	Real Estate	3,63	2,01	0,71	0,72	1,50
M,N	Jasa Perusahaan	3,91	3,12	1,79	1,17	2,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76	6,80	4,95	-0,25	3,10
P	Jasa Pendidikan	1,78	1,69	1,02	0,12	1,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,40	0,72	0,51	5,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,69	1,03	1,35	2,85	4,14
	PRODUK	5,67	2,37	0,01	8,54	10,97

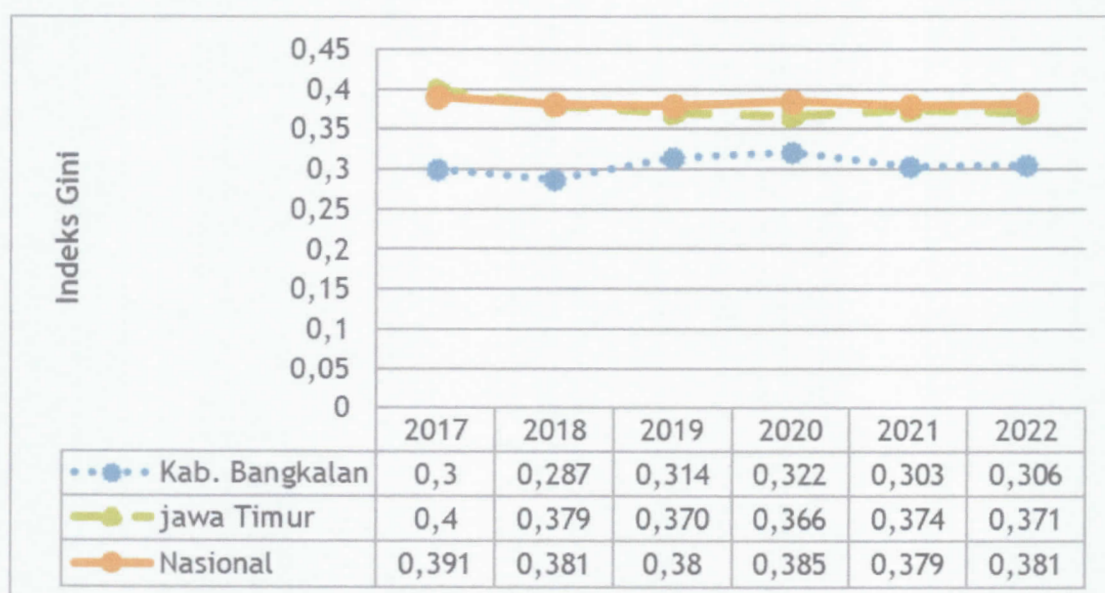
Kat.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
	DOMESTIK REGIONAL BRUTO					
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPAMIGAS	2,89	1,85	1,34	0,92	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa laju inflasi dengan menghitung Laju Implisit PDRB tahun 2017 sebesar 2,36% dan di tahun 2018 naik menjadi sebesar 2,89%. Sedangkan tahun 2019 menjadi 1,85% dan tahun 2020 sebesar 1,34% akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh sektor.

3.8.5 Indeks Gini

Indeks gini mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan antar penduduk. Indeks Gini berkisar antara nol sampai satu. Nilai nol berarti pemerataan sempurna, sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna terjadi.



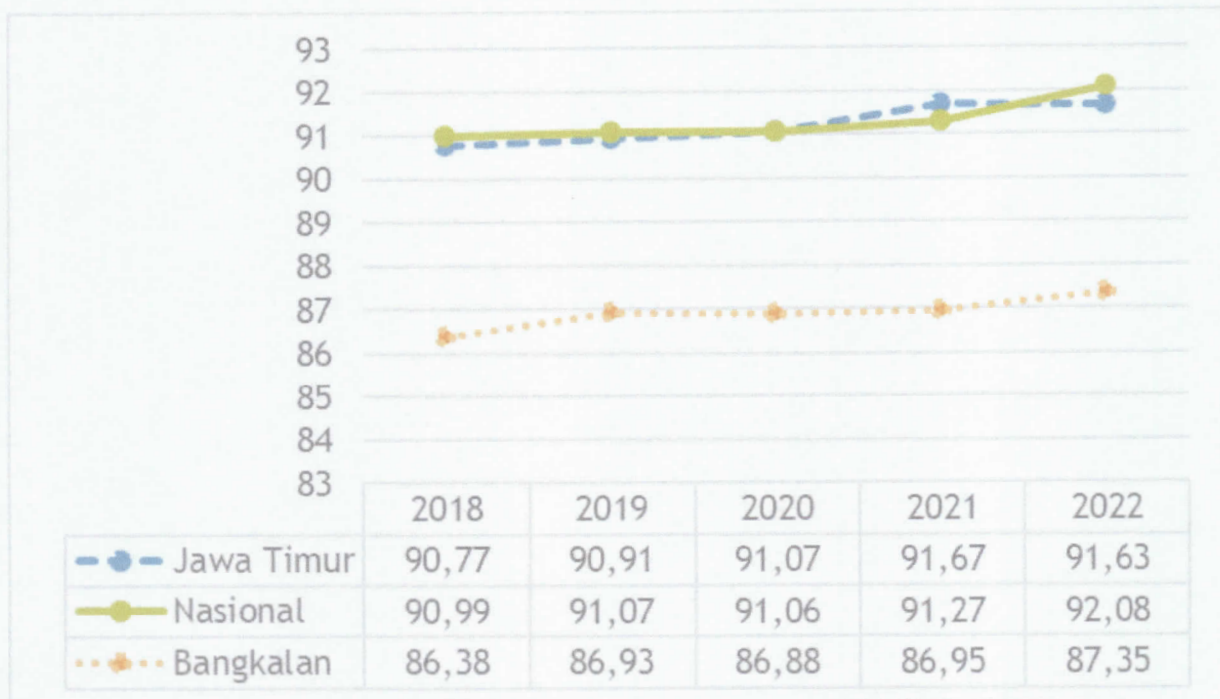
Gambar 10 Rasio Gini Kab. Bangkalan, Jawa Timur, dan Nasional 2017-2022

Sumber: BPS Nasional

Data lima tahun terakhir memperlihatkan rasio gini terendah terjadi pada tahun 2018, namun rasio gini meningkat kembali sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dan kembali semakin mendekati nol di tahun 2021 dan 2022, namun masih belum dapat mengembalikan keadaan seperti di tahun 2018. Tahun 2020 rasio gini kabupaten Bangkalan berada pada angka 0.32. Artinya, ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada level moderat.

3.8.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Adapun perbandingan IPG Kabupaten Bangkalan dengan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut:



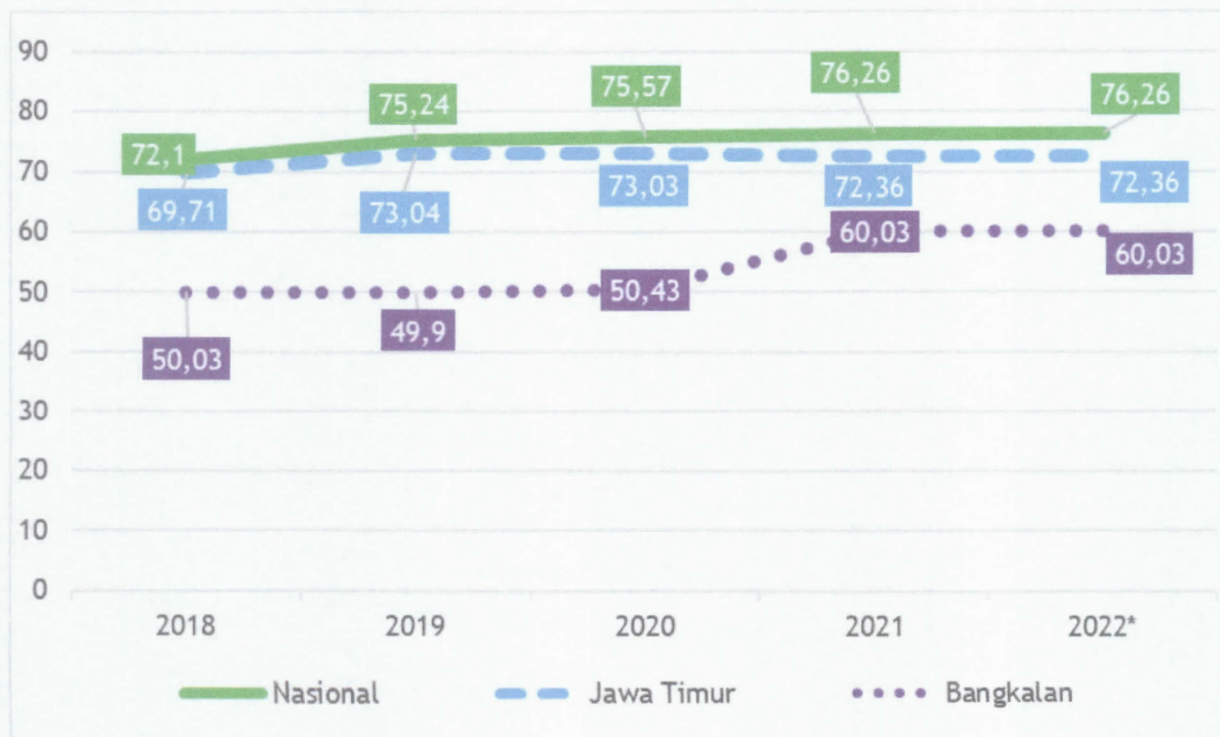
Gambar 11 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dan Nasional 2018-2022

Sumber: BPS Nasional

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IPG Kabupaten Bangkalan masih lebih rendah daripada Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

3.8.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, pengambil keputusan dalam bidang politik dan ekonomi dan lain-lain.



Gambar 12 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dan Nasional 2018-2022

Sumber: BPS Nasional

Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bangkalan cukup bagus meskipun ada penurunan angka di tahun 2019. Namun demikian upaya peningkatan peran perempuan terutama dalam dunia politik masih perlu ditingkatkan.

3.9 Kondisi Kependudukan

Data kependudukan merupakan informasi yang sangat penting dalam proses pembangunan. Penduduk berperan sebagai subjek sekaligus obyek dalam pembangunan. Oleh karena itu, perhatian terhadap penduduk bukan hanya pada sisi jumlah tetapi juga sisi kualitas. Penduduk yang berkualitas merupakan modal bagi pembangunan dan diharapkan mampu mengatasi berbagai akibat dari dinamika kependudukan. Di sisi lain, semakin bertambahnya penduduk mengandung konsekuensi yang besar dan bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan jika tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Jika jumlah penduduk bertambah dua kali lipat maka kebutuhan pangan, perumahan, fasilitas kesehatan, dan seluruh kebutuhan juga harus disediakan dua kali lipat.

Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemukiman liar dan kumuh, menurunnya kesehatan masyarakat, dan sarana pendidikan terbatas yang kemudian dapat memicu gangguan keamanan. Oleh karena itu, dalam pembangunan data kependudukan sangat penting untuk dapat mengendalikan kelahiran dan mempertajam kualitas penduduk melalui program-program jangka pendek, menengah maupun panjang.

Selain pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga sangat penting karena komposisi penduduk yang timpang akan menyebabkan daya dukung alam semakin berat. Kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan. Salah satu program yang dapat mengurangi kepadatan penduduk adalah transmigrasi.

3.9.1 Kuantitas Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu masalah klasik kependudukan yang terus menjadi perhatian pemerintah. Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.086.620 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,39 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021 yang mencapai 1.071.712 jiwa. Apabila dibandingkan jumlah penduduk saat dilakukan Sensus Penduduk Tahun 2010 (909.398 jiwa), jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan saat ini mengalami peningkatan sekitar 19,42 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu sembilan tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan telah mengalami penambahan penduduk sebesar 176.682 jiwa.

Tabel 12 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	1.060.377	1,54	98,98
2021	1.071.712	1,07	97,44
2022	1.086.620	1,39	97,00

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,39 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangkalan sebesar 1,54 persen dan cenderung mengalami penurunan ditahun selanjutnya. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,07 persen.

Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 sebesar 97,00 sedikit

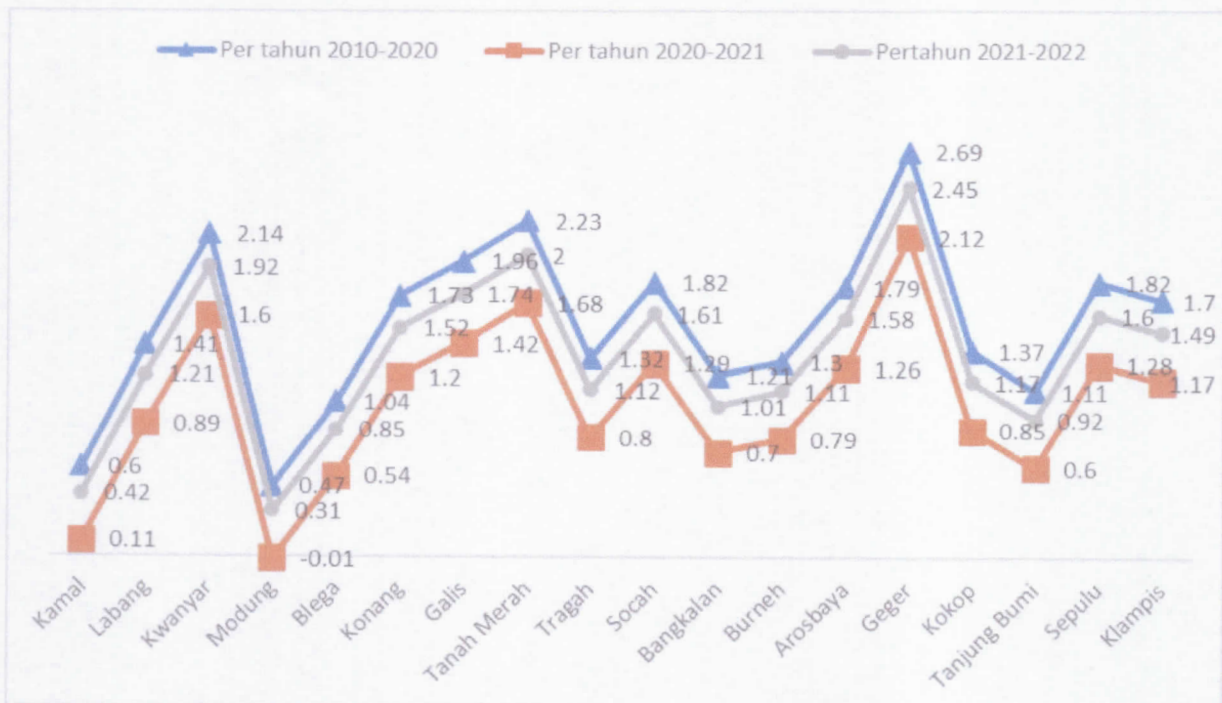
turun dibanding tahun 2021 sebesar 97,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan.

Tabel 13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

KECAMATAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			RASIO JENIS KELAMIN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bangkalan	43.111	43.400	43.545	44.292	44.589	44.811	97,33	97,33	97,17
Socah	31.620	31.898	30.865	32.543	32.866	32.081	97,16	97,05	96,21
Burneh	31.702	31.931	31.171	31.928	32.028	31.595	99,29	99,7	98,66
Kamal	24.225	24.226	24.138	25.297	25.369	25.237	95,76	95,49	95,65
Arosbaya	24.233	24.212	23.180	24.475	24.412	23.567	99,01	99,18	98,36
Geger	41.271	41.366	38.919	42.234	42.165	40.584	97,72	98,11	95,90
Klampis	28.224	28.329	26.624	29.557	29.577	27.958	95,49	95,78	95,23
Sepulu	23.032	22.996	21.203	23.918	23.852	22.147	96,3	96,41	95,74
Tanjung Bumi	27.419	27.127	26.043	28.512	28.137	27.088	96,17	96,41	96,14
Kokop	37.522	37.340	35.075	38.039	37.875	35.818	98,64	98,59	97,93
Kwanyar	25.859	25.941	25.009	26.700	26.781	25.859	96,85	96,86	96,71
Labang	19.009	19.100	18.805	19.903	19.844	19.597	95,51	96,25	95,96
Tanah Merah	35.665	35.709	34.058	36.681	36.750	34.990	97,23	97,17	97,34
Tragah	15.310	15.422	15.225	15.719	15.889	15.635	97,4	97,06	97,38
Blega	29.763	29.475	28.703	30.110	29.842	29.007	98,85	98,77	98,95
Modung	22.874	22.879	21.407	24.360	24.305	22.916	93,9	94,13	93,42
Konang	28.081	28.101	26.326	28.428	28.386	26.521	98,78	99	99,26
Galis	45.123	44.923	41.437	45.917	45.717	42.144	98,27	98,26	98,32
Jumlah	534.043	534.375	511.733	548.613	548.384	527.555	97,34	97,44	97,00

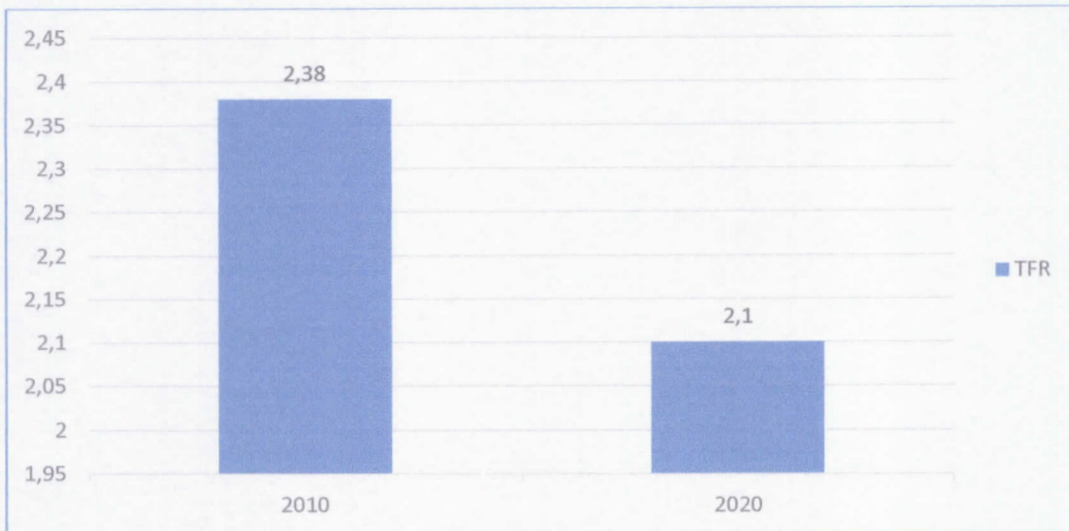
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan

Adapun pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 13 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021-2022

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

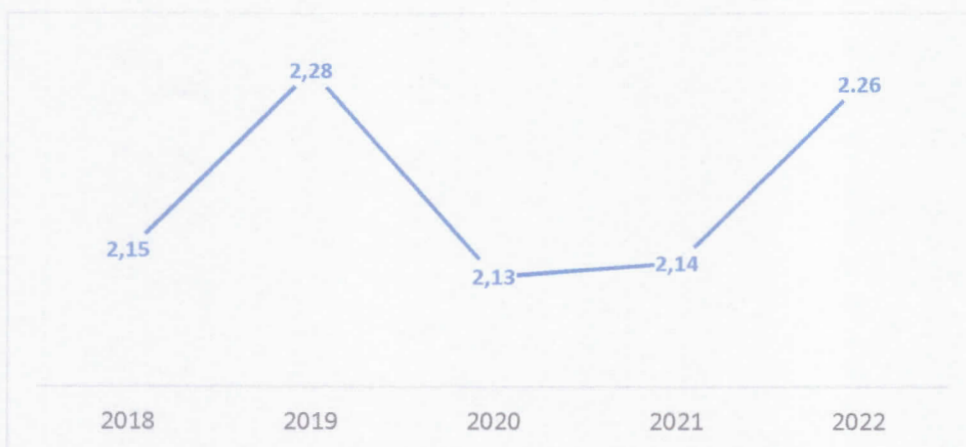


Gambar 14 Angka Fertilitas Total Kab. Bangkalan

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan

Fertilitas Kabupaten Bangkalan menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,38 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,10 yang berarti hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Pada tahun 2020, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,10. Angka ini semakin mendekati tingkat Replacement Level (2,1), artinya setiap wanita digantikan oleh dua anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi.



Gambar 15 Total Fertility Rate Kabupaten Bangkalan 2018-2022

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan

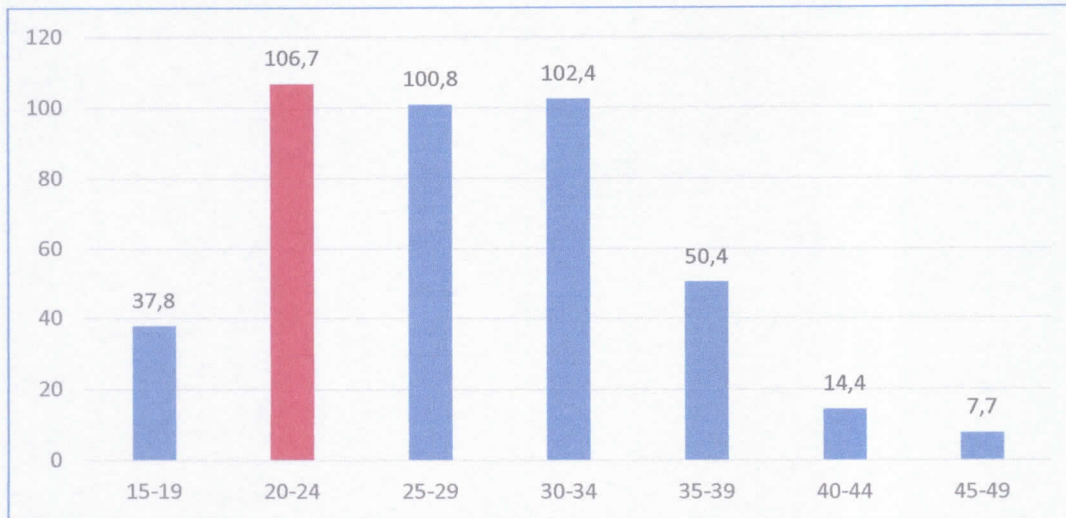
TFR (Total Fertility Rate) dapat menjadi indikator tingkat keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk, TFR dapat digunakan untuk membantu perencanaan program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, peningkatan pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak serta dapat berguna. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang awalnya 2.15 menjadi 2.26 di tahun 2022.

17,92

• Berdasarkan Hasil Long Form SP2020 mencatat 17 sampai 18 kelahiran hidup diantara 1.000 penduduk Kabupaten Bangkalan.

Gambar 16 Angka Kelahiran Kasar dan Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bangkalan

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020



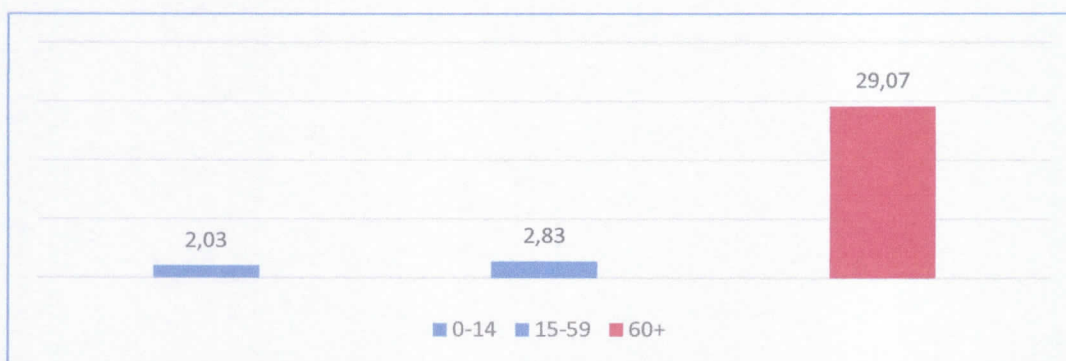
Gambar 17 Age Spesific Fertility Rate (ASFR) Kab. Bangkalan Hasil LF SP2020

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

Puncak ASFR terletak pada perempuan umur 20-24 tahun. Generasi Z masih mendominasi angka ASFR Kabupaten Bangkalan yaitu terdapat 106-107 kelahiran pada perempuan umur 20-24 tahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun.

5,52

• Berdasarkan Hasil Long Form SP2020 mencatat 5 sampai 6 kematian di antara 1.000 penduduk Kabupaten Bangkalan.



Gambar 18 Angka Kematian Kasar dan Angka Kematian Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bangkalan

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

Puncak ASDR terletak pada penduduk kelompok umur 60 tahun ke atas yaitu sebesar 29,07. Artinya, terdapat 29 sampai 30 kematian pada 1.000 penduduk kelompok umur 60 tahun ke atas di Kabupaten Bangkalan.

Indikator demografi yang penting salah satunya adalah Angka Beban Ketergantungan (Dependency ratio). Hal ini menunjukkan beban yang ditanggung penduduk produktif terhadap penduduk belum produktif dan tidak produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang

produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Begitu pula sebaliknya bila persentasenya rendah.

Pengendalian penduduk yang baik dapat ditunjukkan dengan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Hal tersebut tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan, akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan output dan kreatifitasnya.

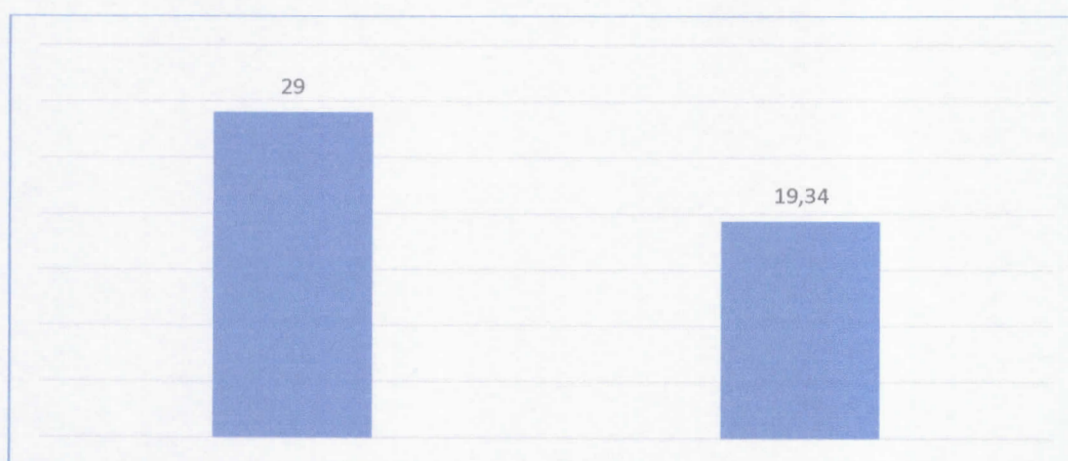
Tabel 14 Angka Beban Ketergantungan Berdasarkan Usia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	26,63	65,72	8,05	52,21
2021	24,80	66,23	8,97	51,00
2022	23,03	70,73	6,24	41,71

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022

Dependency ratio dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 52,21 persen kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 51,00 persen dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 41,71 persen Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 48 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Tercatat penduduk produktif yang menanggung penduduk usia dibawah 14 tahun sebesar 23,03 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 6,24 persen.

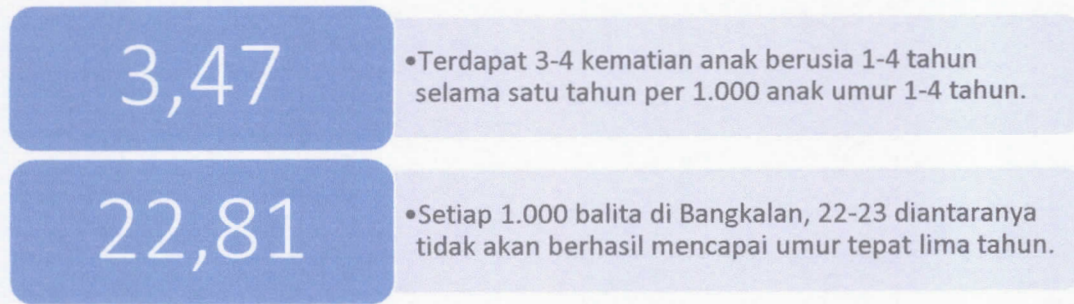
Pada Tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang mencapai 70,73 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Bangkalan menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas semakin menurun dari 8,97 persen pada tahun 2021 menjadi 6,24 persen pada tahun 2022.



Gambar 19 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangkalan

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

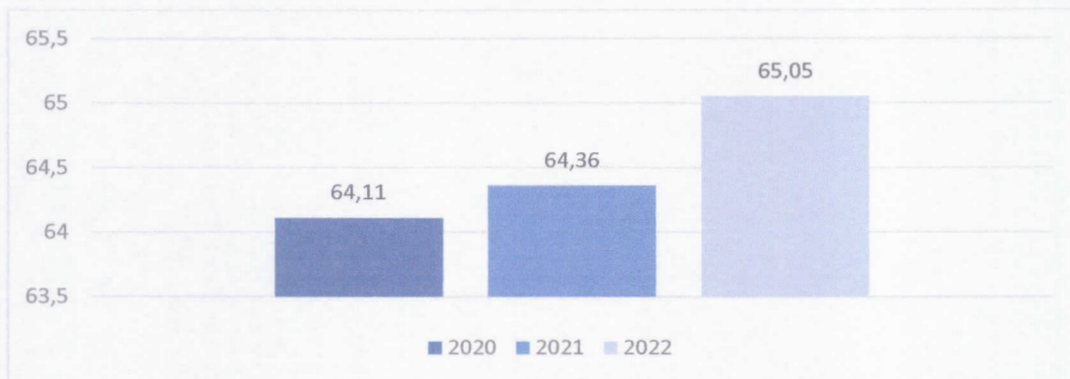
Angka Kematian Bayi (IMR) cenderung menurun dari 29 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup perempuan Bangkalan membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.



Gambar 20 Angka Kematian Anak Usia 1-4 Tahun dan Angka Kematian Balita Kabupaten Bangkalan

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

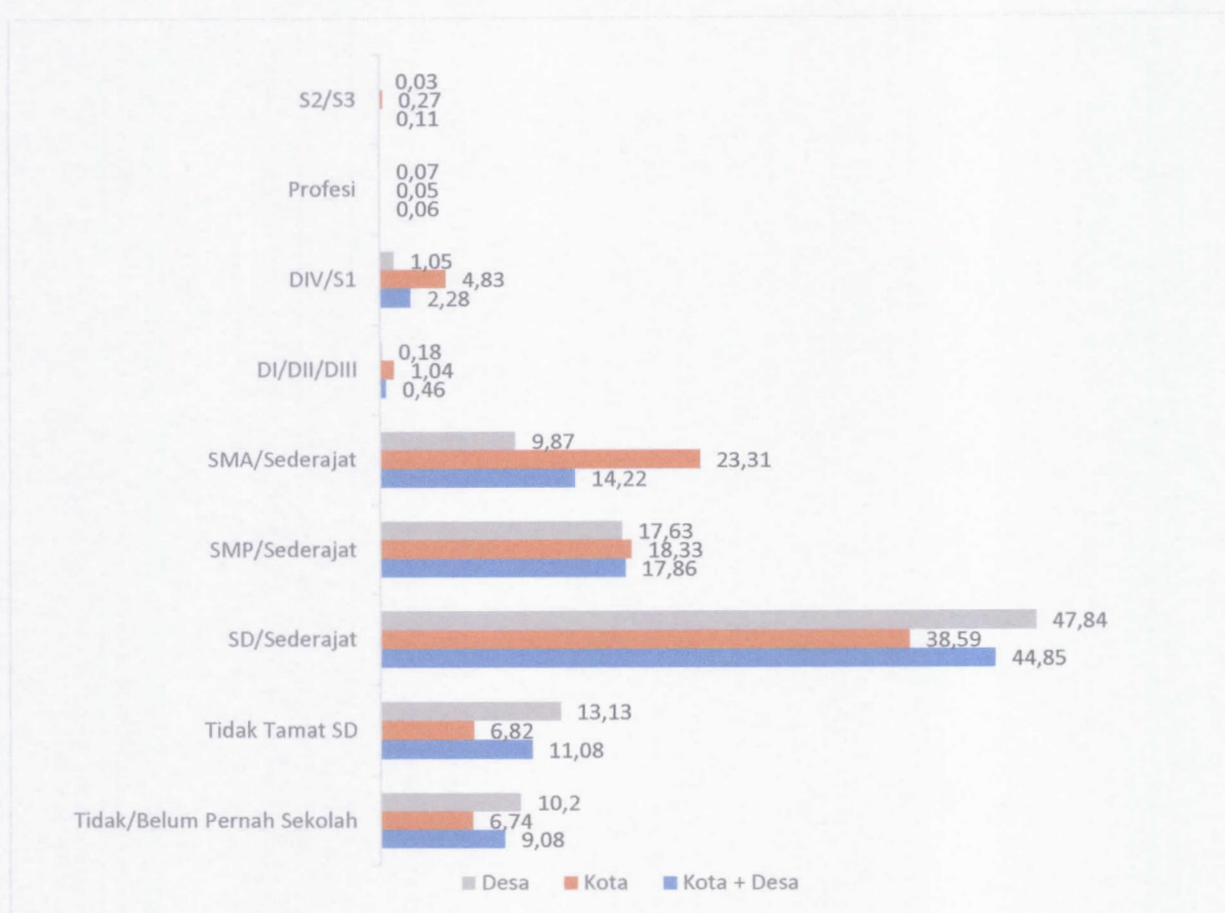
3.9.2 Kualitas Penduduk



Gambar 21 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan dalam 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, IPM Bangkalan sebesar 64,11. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 64,36. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 65,05.

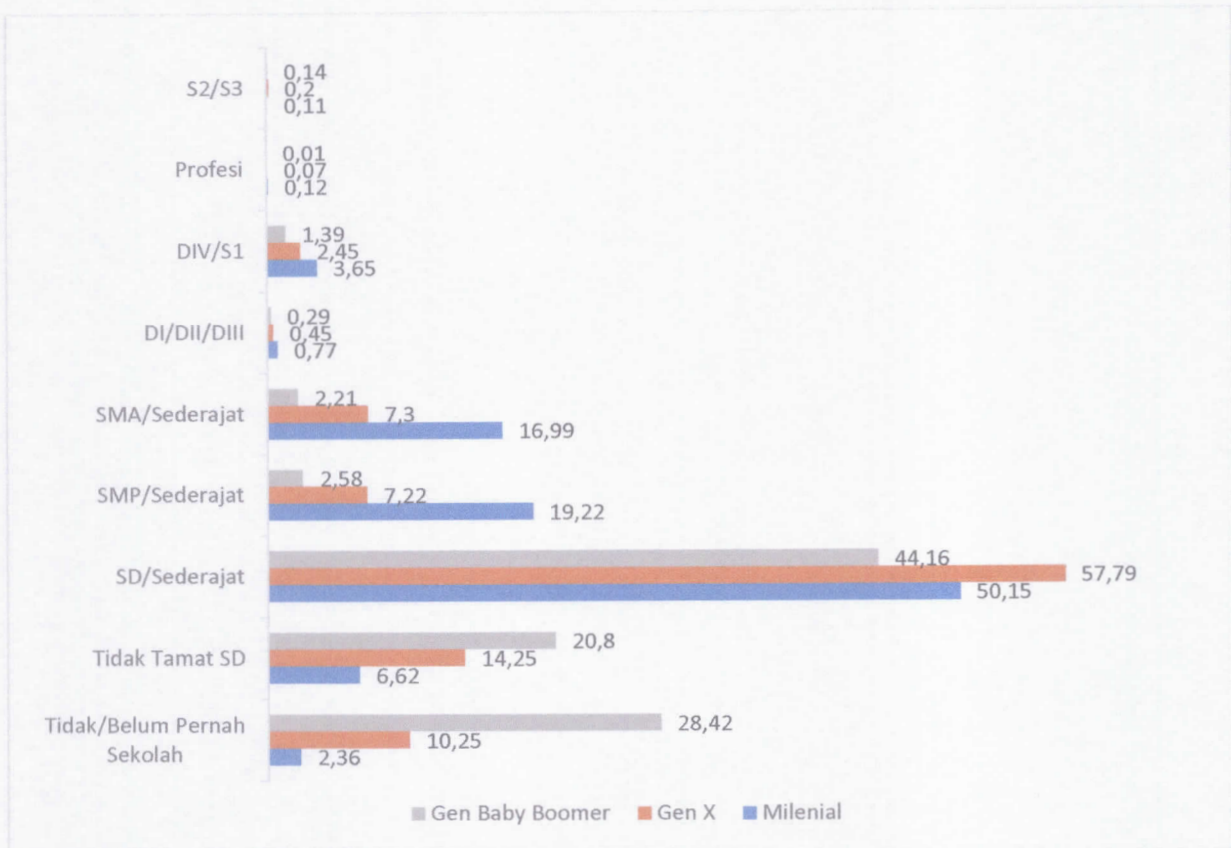


Gambar 22 Persentase Penduduk Umur 15 + Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Menurut Kota-Desa

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

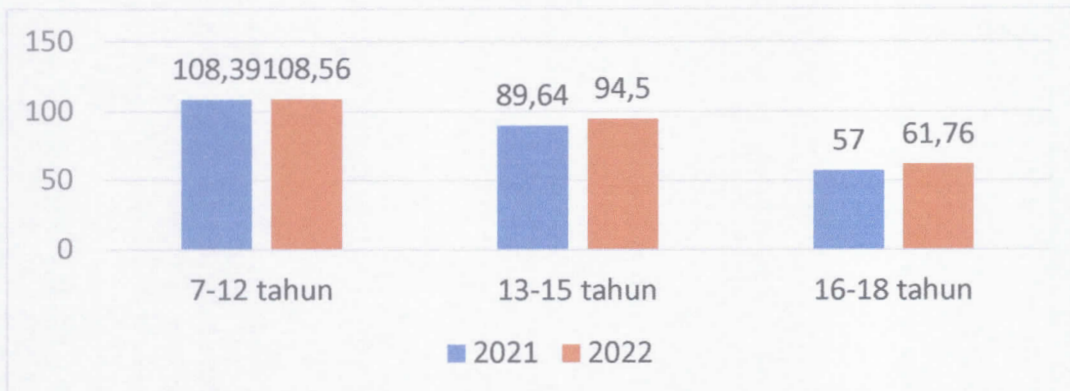
Mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat. Begitu juga, mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas baik di perkotaan maupun perdesaan berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat.

Mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Generasi Baby Boomer, Generasi X, dan Generasi Milenial di Kabupaten Bangkalan adalah SD/Sederajat.



Gambar 23 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pada Generasi Baby Boomer, Generasi X, dan Milenial (Persen)

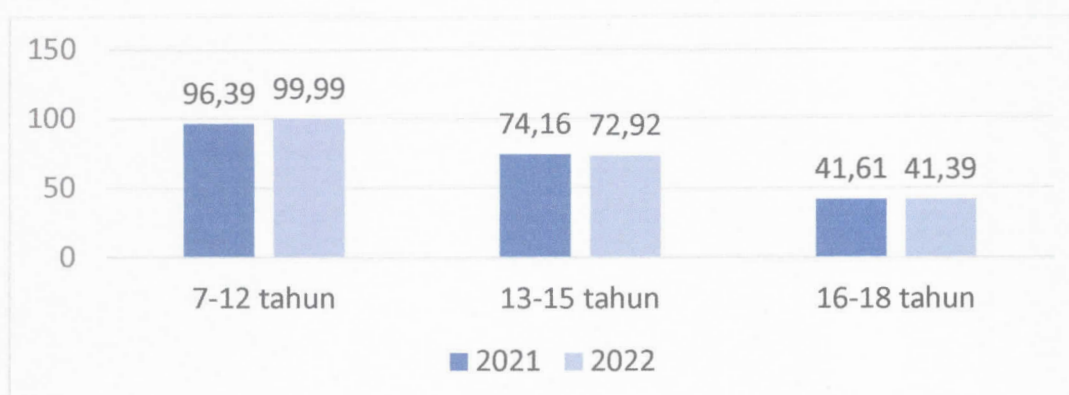
Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020



Gambar 24 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bangkalan 2021-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7-12 tahun mencapai angka optimal 108 persen pada periode 2 tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. APS pada kelompok usia 13-15 tahun mencapai rata-rata 92 persen. Kabupaten Bangkalan memiliki APS tertinggi pada kelompok usia 13-15 tahun mencapai 94,50 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Bangkalan memiliki APS 89,64 persen pada kelompok usia 13-15 tahun. APS pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami penurunan dari kelompok usia 13-15 tahun yakni memiliki rata-rata 59,38 persen. Kabupaten Bangkalan memiliki APS pada kelompok usia 16-18 tahun mencapai 57 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 APS Kabupaten Bangkalan mencapai 61,76 persen pada kelompok usia 16-18 tahun.



Gambar 25 Angka Partisipasi Murni Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bangkalan 2021-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar di atas, APM jenjang pendidikan SD usia 7-12 Tahun Kabupaten Bangkalan sebesar 96,39 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 APM jenjang pendidikan SD usia 7–12 tahun di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan yakni sebesar 99,99 persen. APM pada jenjang pendidikan SMP usia 13-15 tahun di Kabupaten Bangkalan sebesar 74,16 persen pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 Kabupaten Bangkalan memiliki APM mencapai 72,92 persen. APM pada jenjang pendidikan SMA usia 16-18 Tahun di Kabupaten Bangkalan sebesar 41,61 persen pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 41,39 persen.

Tabel 15 Penduduk Miskin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PENDUDUK MISKIN
1	BANGKALAN	8.829
2	SOCAN	5.561
3	BURNEH	3.060
4	KAMAL	3.062
5	AROSBAYA	7.333
6	GEGER	9.810
7	KLAMPIS	9.615
8	SEPULU	8.905
9	TANJUNG BUMI	9.680
10	KOKOP	16.559
11	KWANYAR	4.917
12	LABANG	3.726
13	TANAH MERAH	10.913
14	TRAGAH	4.172
15	BLEGA	12.858
16	MODUNG	7.865
17	KONANG	14.114
18	GALIS	13.285
	JUMLAH	154.264

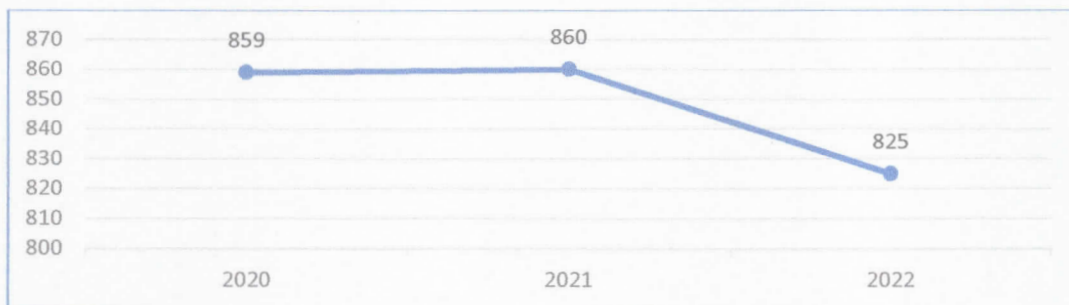
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Bangkalan mencapai 154.264 jiwa. Kecamatan Kokop menjadi kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak yakni sebesar 16.559 jiwa. Sedangkan Kecamatan Burneh menjadi kecamatan dengan penduduk miskin terkecil yakni sebesar 3.060 jiwa. Tingkat kemiskinan juga menjadi tolok ukur kualitas penduduk, karena semakin banyak penduduk miskin mengindikasikan bahwa kualitas penduduk masih rendah dalam suatu wilayah.

3.9.3 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Kepadatan penduduk Pulau Jawa dan luar Jawa masih timpang, begitu pula penduduk antara kota dan desa. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan (densitas) penduduk dan tekanan penduduk yang akan mempengaruhi daya dukung infrastruktur, lingkungan dan sosial di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk sangat besar dan ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena penyediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.



Gambar 26 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan sekitar 859 per jiwa km², tahun 2021 sekitar 860 jiwa per km², sedangkan pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan menjadi 825 jiwa per km².

Tabel 16 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan penduduk (per km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bangkalan	88356	35,02	2.523
Socah	62946	53,82	1.170
Burneh	62766	66,1	950
Kamal	49375	41,4	1.193
Arosbaya	46747	42,46	1.101
Geger	79503	123,31	645
Klampus	54582	67,1	813
Sepulu	43350	73,25	592
Tanjung Bumi	53131	67,49	787
Kokop	70893	125,75	564
Kwanyar	50868	47,81	1.064
Labang	38402	35,23	1.090
Tanah Merah	69048	68,56	1.007
Tragah	30860	39,58	780

Blega	57710	92,82	622
Modung	44323	78,79	563
Konang	52847	81,09	652
Galis	83581	120,56	693
Kabupaten Bangkalan	1.039.288	1.260,12	825

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan

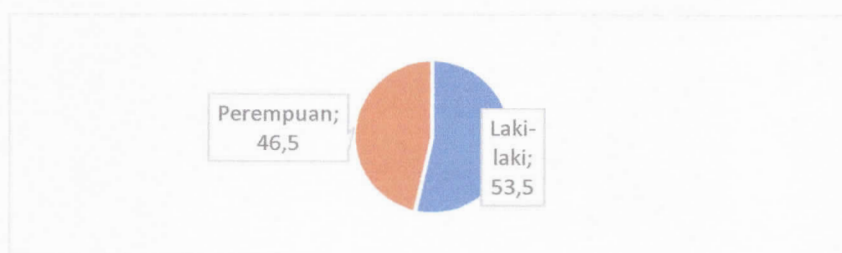
Kepadatan penduduk yang tertinggi pada tahun 2022 adalah Kecamatan Bangkalan yaitu sekitar 2.523 jiwa per km², kedua adalah Kecamatan Kamal sekitar 1.193 jiwa per km². Selanjutnya disusul Kecamatan Socah sekitar 1.170 jiwa per km² dan Kecamatan Arosbaya sekitar 1.101 jiwa per km². Adapun kecamatan lain kepadatannya lebih banyak yang di bawah 1.000 jiwa per km².

3,55%

- 3-4 dari 100 penduduk Bangkalan lahir di luar Bangkalan.

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

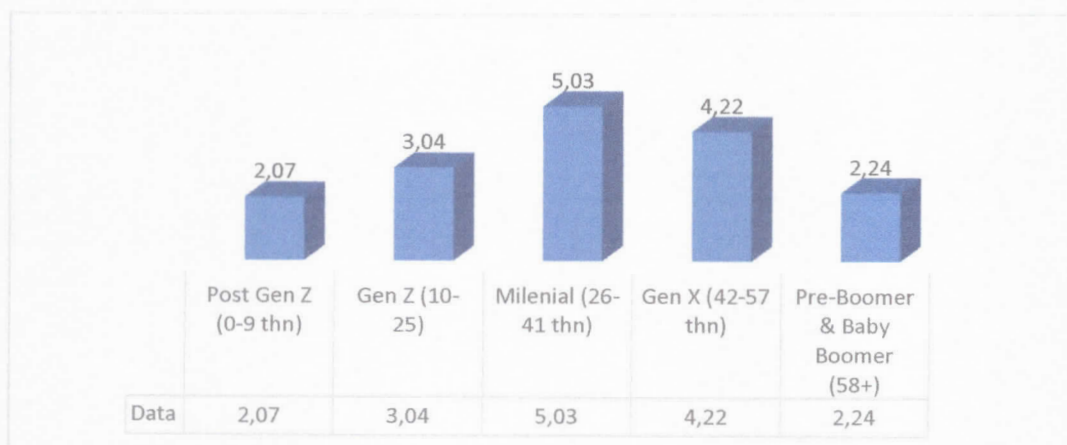
Gambar 8. Komposisi Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin (Persen)



Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

Lebih dari setengah migran seumur hidup di Kabupaten Bangkalan berjenis kelamin Laki-laki.

Gambar 9. Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi (persen)

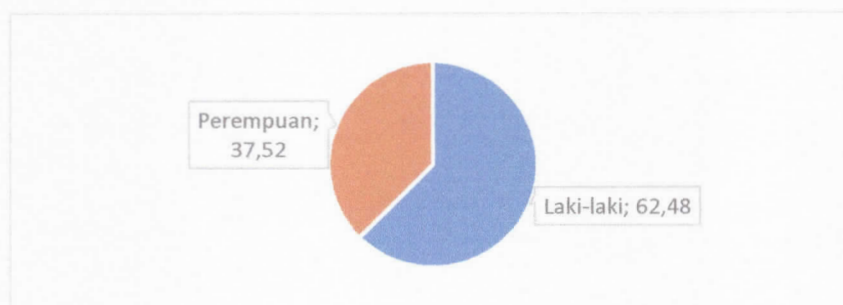


Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

Proporsi penduduk berstatus Milenial adalah paling tinggi dibanding dengan generasi lainnya, sedangkan yang paling rendah adalah generasi Post Gen. Sebanyak 5 dari 100 penduduk Milenial lahir di luar Kabupaten Bangkalan.

1,00%

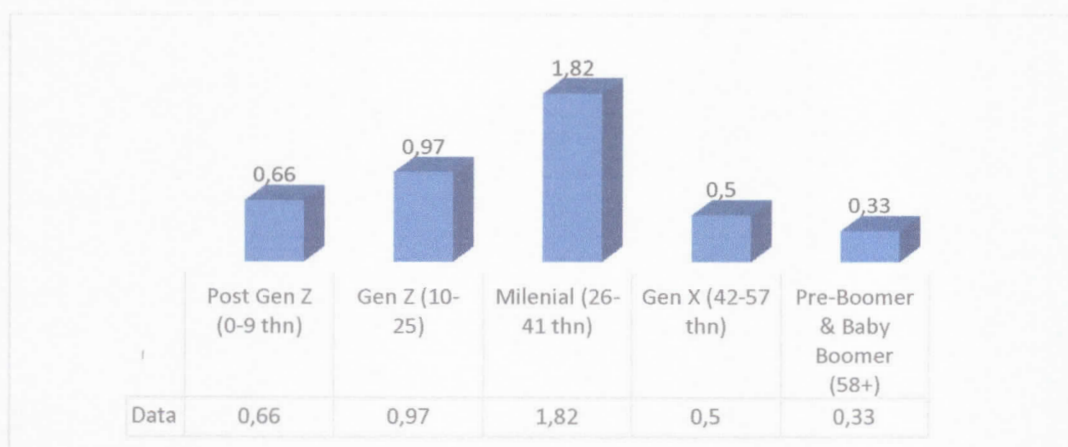
- Pada 2022, sebanyak 1 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Bangkalan bertempat tinggal di kabupaten/kota lain 5 tahun sebelumnya



Gambar 27 Komposisi Migran Risen Antar Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin (persen)

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

Lebih dari setengah migran risen di Kabupaten Bangkalan berjenis kelamin Laki-laki.



Gambar 28 Penduduk Berstatus Migran Risen Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi (persen)

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

- Sebanyak 1-2 dari 100 penduduk generasi milenial di Bangkalan merupakan migran risen.
- Generasi yang lebih muda (post gen z, generasi z, dan milenial) memperlihatkan proporsi migran risen lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua (generasi x, preboomer, dan baby boomer).

3.9.4 Pembangunan Keluarga

Tabel 17 Jumlah Pasangan Usia Subur Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

No	Kecamatan	PUS	PUS ber KB	PUS Tidak ber-KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangkalan	11,040	5,122	5,918
2	Socah	8,504	3,999	4,505
3	Burneh	5,626	2,321	3,305
4	Kamal	6,242	3,005	3,237
5	Arosbaya	5,855	2,232	3,623
6	Geger	8,795	4,043	4,752
7	Klampis	7,091	2,648	4,443

No	Kecamatan	PUS	PUS ber KB	PUS Tidak ber-KB
8	Sepulu	5,366	2,384	2,982
9	Tanjung Bumi	5,448	1,964	3,484
10	Kokop	5,666	2,625	3,041
11	Kwanyar	6,062	3,675	2,387
12	Labang	5,403	2,823	2,580
13	Tanah Merah	8,292	3,918	4,374
14	Tragah	3,924	2,164	1,760
15	Blega	6,959	3,487	3,472
16	Modung	5,389	2,538	2,851
17	Konang	7,626	2,429	5,197
18	Galis	11,304	4,831	6,473
Jumlah Total		124,592	56,208	68,384

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data di atas, kecamatan dengan PUS yang ber KB tertinggi di Kecamatan Bangkalan, Galis dan Geger. PUS yang ber KB di Kecamatan Bangkalan sebanyak 5.122, PUS yang ber KB di Kecamatan Galis sebanyak 4.831. PUS yang ber KB di Kecamatan Geger sebanyak 4.043. Kecamatan dengan PUS yang ber KB terendah di Kecamatan Tanjung Bumi sebanyak 1.964

Tabel 18 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

No	Kecamatan	Prevalensi KB
(1)	(2)	(3)
1	Bangkalan	46.39
2	Socah	47.02
3	Burneh	41.25
4	Kamal	48.14
5	Arosbaya	38.12
6	Geger	45.97
7	Klampus	37.34
8	Sepulu	44.43
9	Tanjung Bumi	36.05
10	Kokop	46.33
11	Kwanyar	60.62
12	Labang	52.25
13	Tanah Merah	47.25
14	Tragah	55.15
15	Blega	50.11
16	Modung	47.10
17	Konang	31.85
18	Galis	42.74
Jumlah Total		45.11

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan

Kecamatan dengan CPR tertinggi: Kecamatan dengan CPR tertinggi adalah Kwanyar dengan nilai 60.62. Kecamatan dengan CPR terendah: Kecamatan dengan CPR terendah adalah Konang dengan nilai 31.85. Rata-rata CPR: Rata-rata CPR untuk semua kecamatan di Kabupaten Bangkalan adalah 45.11. Perbedaan antar kecamatan: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kecamatan dengan CPR tertinggi dan terendah, menunjukkan variasi dalam penggunaan KB di Kabupaten Bangkalan

Tabel 19 Unmeet Need Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Unmet Need	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangkalan	11,040	2,395	21.69
2	Socah	8,504	2,146	25.24
3	Burneh	5,626	1,311	23.30
4	Kamal	6,242	1,585	25.39
5	Arosbaya	5,855	1,592	27.19
6	Geger	8,795	2,134	24.26
7	Klampus	7,091	1,705	24.04
8	Sepulu	5,366	1,000	18.64
9	Tanjung Bumi	5,448	912	16.74
10	Kokop	5,666	948	16.73
11	Kwanyar	6,062	923	15.23
12	Labang	5,403	1,255	23.23
13	Tanah Merah	8,292	1,489	17.96
14	Tragah	3,924	597	15.21
15	Blega	6,959	1,179	16.94
16	Modung	5,389	878	16.29
17	Konang	7,626	1,531	20.08
18	Galis	11,304	1,705	15.08
Jumlah Total		124,592	25,285	20.29

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data diatas kecamatan dengan Unmeet Need tertinggi di Kabupaten Bangkalan adalah Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Socah. Unmeet Need Kecamatan Arosbaya sebesar 27,19 persen, Kecamatan Kamal sebesar 25,39 persen, dan Kecamatan Socah sebesar 25,24 persen. Unmeet Need terendah di Kabupaten Bangkalan adalah Kecamatan Galis, Kecamatan Tragah, dan Kecamatan Kwanyar. Unmeet Need Kecamatan Galis sebesar 15,08 persen, Kecamatan Tragah sebesar 15,21 persen, dan Kecamatan Kwanyar sebesar 15,23 perse.

Tabel 20 Jumlah Penduduk dan Keluarga Prasejahtera di Kabupaten Bangkalan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Prasejahtera (Jiwa)	Jumlah Keluarga Prasejahtera (KK)
1	Bangkalan	8.829	2.802
2	Socah	5.561	1.863
3	Burneh	3.060	925
4	Kamal	3.062	1.061
5	Arosbaya	7.333	2.221
6	Geger	9.810	3.061
7	Klampus	9.615	3.039
8	Sepulu	8.905	2.719
9	Tanjung Bumi	9.680	3.136
10	Kokop	16.559	4.409
11	Kwanyar	4.917	1.552
12	Labang	3.726	1.223
13	Tanah Merah	10.913	3.287
14	Tragah	4.172	1.355

15	Blega	12.858	3.793
16	Modung	7.865	2.228
17	Konang	14.114	3.874
18	Galis	13.285	3.947
	Jumlah	154.264	46.495

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2023

Berdasarkan data diatas kecamatan dengan jumlah keluarga prasejahtera tertinggi di Kabupaten Bangkalan adalah Kecamatan Kokop, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Konang. Keluarga Prasejahtera Kecamatan Kokop sebesar 4.409 keluarga, Kecamatan Galis sebesar 3.947 keluarga, dan Kecamatan Konang sebesar 3.874 keluarga. Kabupaten Bangkalan pada 2023 memiliki total 46.495 keluarga prasejahtera dengan total penduduk prasejahtera 154.264 jiwa.

3.9.5 Administrasi Kependudukan

Sistem informasi manajemen merupakan faktor penting dalam berjalannya proses administrasi dalam organisasi. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah suatu sistem informasi yang ditumbuhkembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

SIAK melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan (population events) dan peristiwa penting (vital events) yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Data kependudukan yang tersimpan dalam basis data yang keluarannya antara lain: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas.

SIAK dalam Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki definisi bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang selanjutnya memasukan data- data tersebut kedalam satu pusat data (data center) di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan:

- meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendataan penduduk yang sah dan akurat, lengkap mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan
- Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pengelolaan **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan** bertujuan untuk memberikan penerima layanan dalam hal ini adalah masyarakat. Karena sukses tidaknya sistem ini tergantung dari manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, manfaat yang diperoleh berbagai pihak setelah diterapkannya SIAK. Peningkatan jumlah pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir

dan mudah diakses, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal.

Tabel 21 Jumlah Penduduk Ber-KK Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2022

NO (1)	KECAMATAN (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)
1	BANGKALAN	21.857	18.917	27.173
2	SOCAH	15.998	14.090	19.538
3	BURNEH	15.237	11.338	19.029
4	KAMAL	12.932	11.340	15.688
5	AROSBAYA	11.837	10.424	14.494
6	GEGER	20.217	17.331	25.738
7	KLAMPIS	14.065	12.831	17.416
8	SEPULU	10.989	9.094	13.956
9	TANJUNG BUMI	14.115	12.495	17.740
10	KOKOP	16.037	13.706	20.572
11	KWANYAR	11.854	9.366	15.300
12	LABANG	9.186	7.481	11.833
13	TANAH MERAH	16.237	13.274	20.618
14	TRAGAH	7.482	6.037	9.661
15	BLEGA	13.768	10.518	17.873
16	MODUNG	10.978	5.621	14.161
17	KONANG	12.189	9.811	16.032
18	GALIS	19.132	14.737	25.603
	JUMLAH	254.110	208.411	322.425

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

Tabel 22 Jumlah Penduduk Ber-KTP ELEKTRONIK Kab. Bangkalan Tahun 2020-2022

NO (1)	KECAMATAN (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)
1	BANGKALAN	59.326	60.304	63.981
2	SOCAH	42.560	43.547	46.738
3	BURNEH	41.405	42.504	45.982
4	KAMAL	34.578	35.004	37.114
5	AROSBAYA	23.869	25.090	34.552
6	GEGER	49.863	51.591	59.078
7	KLAMPIS	36.222	36.997	41.140
8	SEPULU	28.014	28.655	32.537
9	TANJUNG BUMI	34.934	34.726	39.536
10	KOKOP	41.629	42.806	51.019
11	KWANYAR	33.408	34.378	37.758
12	LABANG	25.667	26.300	28.431
13	TANAH MERAH	44.689	45.887	50.641
14	TRAGAH	20.042	20.783	22.744
15	BLEGA	37.292	37.786	42.174
16	MODUNG	29.155	29.685	32.912
17	KONANG	32.277	33.261	38.882
18	GALIS	52.462	54.039	62.184
	JUMLAH	667.392	683.343	767.403

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

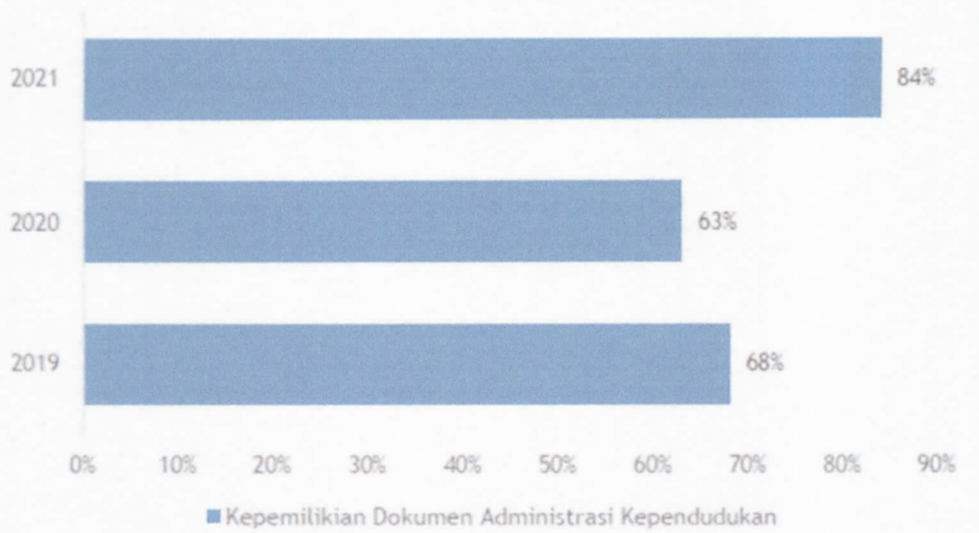
Tabel 23 Jumlah Penduduk Ber-AKTA Kab. Bangkalan Tahun 2020-2022

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BANGKALAN	35.360	39.327	42.481
2	SOCAH	23.900	26.424	28.693
3	BURNEH	26.109	29.100	31.619
4	KAMAL	17.028	19.276	21.084
5	AROSBAYA	20.865	22.512	24.332
6	GEGER	30.030	34.717	37.114
7	KLAMPIS	21.762	23.958	25.738
8	SEPULU	13.708	16.882	18.034
9	TANJUNG BUMI	18.339	21.293	22.977
10	KOKOP	14.846	25.530	27.629
11	KWANYAR	16.550	21.104	23.740
12	LABANG	13.932	16.019	17.475
13	TANAH MERAH	25.013	29.368	32.965
14	TRAGAH	10.936	12.322	13.844
15	BLEGA	18.250	21.597	25.136
16	MODUNG	13.243	16.879	18.782
17	KONANG	8.829	16.818	18.417
18	GALIS	20.540	29.654	33.992
	JUMLAH	349.240	422.780	464.052

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

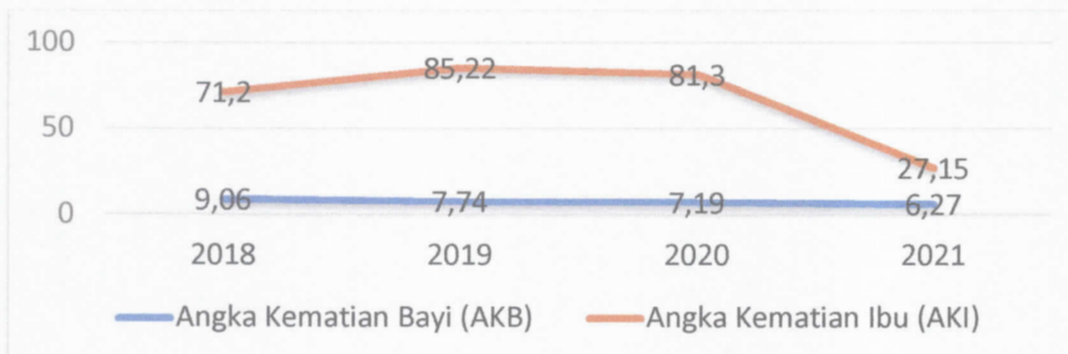
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta administrasi kependudukan dengan biaya yang relatif terjangkau.

Dengan makin membaiknya pelayanan administrasi kependudukan, seiring dengan dilaksanakannya penerapan e-KTP pada Tahun 2012, diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan KTP, KK dan Akta Kelahiran meningkat. Pada tahun 2018 diketahui kondisi awal Rata-rata Prosentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sebesar 66% dari jumlah penduduk. Pada tahun 2020 dan 2021 diharapkan sudah ada 71,5% dan 73% dari penduduk yang berdokumen administrasi kependudukan yang lengkap.



Gambar 29 Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kab. Bangkalan
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bangkalan

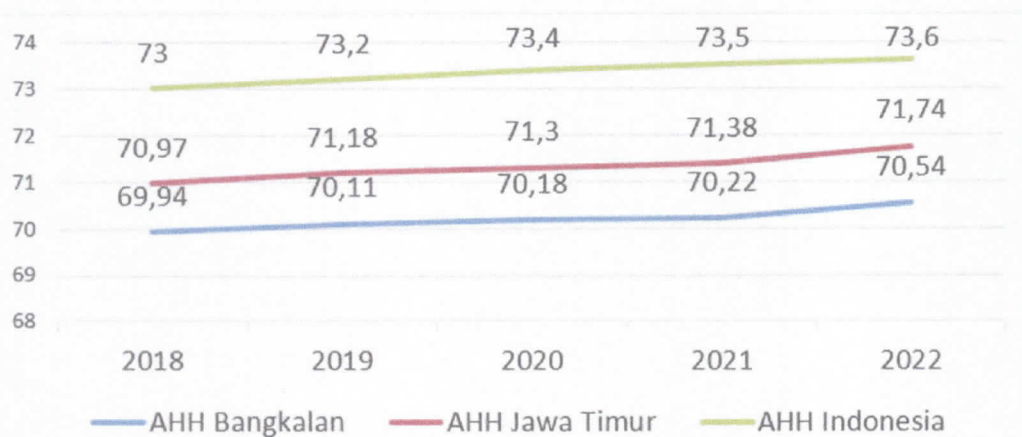
3.7 Kondisi Kesehatan



Gambar 30 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Tahun 2018-2022 Kabupaten Bangkalan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Angka kematian ibu mengalami trend penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKI adalah jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan.



Gambar 31 Angka Harapan Hidup Tahun 2017-2022 Kabupaten Bangkalan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 mencapai 69,94, naik sedikit dari tahun 2017 senilai 69,82. Perbaikan AHH kembali mengalami peningkatan menjadi 70,22 di tahun 2021. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan trend yang positif yang didorong oleh kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Bidang Kesehatan.

Pencapaian AHH selama 5 (lima) tahun terakhir sangatlah menggembirakan dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pencapaian ini tentunya memberikan derajat kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bangkalan sangat baik, meskipun masih di bawah rata-rata AHH pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur sebesar 71,74. Usia harapan hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi dan lingkungannya yang baik.

Tabel 24 Jumlah Gizi Buruk Tahun 2022 Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Balita Gizi Buruk		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangkalan	0	0	3
2	Socah	9	59	56
3	Burneh	1	5	0
4	Kamal	0	36	1
5	Arosbaya	27	8	34
6	Geger	6	0	8
7	Klampus	0	32	3
8	Sepulu	0	0	10
9	Tanjung Bumi	0	0	33
10	Kokop	6	12	78
11	Kwanyar	0	4	24
12	Labang	5	0	18
13	Tanah Merah	0	0	15
14	Tragah	0	40	27
15	Blega	14	0	22
16	Modung	35	30	36
17	Konang	0	11	5
18	Galis	2	1	47
Jumlah		105	238	420

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Data tersebut menunjukkan bahwa kecamatan dengan bayi gizi buruk tertinggi adalah Kecamatan Kokop, diikuti Kecamatan Socah, dan Kecamatan Galis. Hasil yang cukup bagus

bahwa banyak kecamatan yang angka gizi buruk tidak ada atau null (0). Upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi banyak dilakukan, antara lain melalui Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif, penimbangan balita secara rutin, cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, meningkatkan pemantauan gizi sehingga penanganan kasus bisa sedini mungkin, peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta pemberian MP ASI dan makanan tambahan bagi balita kurang gizi

Tabel 25 Jumlah Stunting Tahun 2022 Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Stunting		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangkalan	276	159	211
2	Socah	220	175	116
3	Burneh	141	88	75
4	Kamal	129	41	42
5	Arosbaya	141	139	132
6	Geger	152	61	65
7	Klampus	80	70	14
8	Sepulu	48	50	61
9	Tanjung Bumi	317	25	112
10	Kokop	277	343	244
11	Kwanyar	112	116	85
12	Labang	86	70	133
13	Tanah Merah	192	179	116
14	Tragah	218	169	168
15	Blega	97	55	69
16	Modung	238	222	151
17	Konang	119	53	23
18	Galis	451	272	99
Jumlah		3294	2287	1916

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Data tersebut menunjukkan bahwa kecamatan dengan stunting terbanyak adalah Kecamatan Kokop dengan jumlah 244, diikuti Kecamatan Bangkalan dengan jumlah 211 dan Kecamatan Tragah sebanyak 168. Total kasus Stunting di Kabupaten Bangkalan sejumlah 1916.

Tabel 26 Pemberian ASI Eksklusif Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

No	Kecamatan	Pemberian Asi Eksklusif		
		Kelahiran Bayi Usia < 6 Bulan	ASI Eksklusif	%
1	Bangkalan	438	81	18,5
2	Socah	157	82	44,1
3	Burneh	0	0	0
4	Kamal	18	18	100
5	Arosbaya	121	20	26
6	Geger	41	39	95,1
7	Klampus	27	17	63
8	Sepulu	88	40	45,5
9	Tanjung Bumi	205	39	19
10	Kokop	11	4	36,4

11	Kwanyar	64	32	50
12	Labang	129	22	17
13	Tanah Merah	164	48	29,3
14	Tragah	107	21	19,6
15	Blega	113	30	26,5
16	Modung	463	215	42,6
17	Konang	280	59	21,1
18	Galis	7	6	85,7
Jumlah		2.433	773	31,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Data tersebut menunjukkan bahwa kecamatan dengan presentase pemberian ASI Eksklusif terbesar adalah Kecamatan Kamal dengan 100%, diikuti Kecamatan Geger dengan 95,1% dan Kecamatan Galis sebanyak 85,7%. Secara keseluruhan presentase pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Bangkalan sebesar 31,8 %.

3.8 Kondisi Sarana Prasarana

3.8.1 Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana kesehatan di suatu wilayah menjadi hal yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Kabupaten bangkalan memiliki berbagai jenis sarana kesehatan, meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut merupakan jumlah dan persebaran sarana kesehatan di Kabupaten Bangkalan:

Tabel 27 Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Kecamatan	RS Umum	RS Khusus	Puskesmas
Bangkalan	3	1	1
Socah	-	-	2
Burneh	-	-	1
Kamal	-	-	1
Arosbaya	-	-	2
Geger	-	-	1
Klampus	-	-	1
Sepulu	-	-	1
Tanjung Bumi	-	-	1
Kokop	-	-	1
Kwanyar	-	-	1
Labang	-	-	1
Tanah Merah	-	-	1
Tragah	-	-	1
Blega	-	-	1
Modung	-	-	2
Konang	-	-	1
Galis	-	-	2
Kabupaten Bangkalan	3	1	22

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangkalan memiliki 3 Rumah Sakit Umum dan 1 Rumah Sakit Khusus, serta 22 puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan.

3.8.2 Perumahan dan Pemukiman

Kawasan perumahan adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Kawasan perumahan di Kabupaten Bangkalan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum diimbangi kemampuan penyediaan, baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang responsif (sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan), karena terbatasnya akses, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan perumahan. Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan.

Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu dimantapkan, baik melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan maupun kawasan permukiman yang berkelanjutan, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan di samping prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Secara fisik lingkungan, masih banyak ditemui kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Dampak semakin menurunnya daya dukung lingkungan di antaranya adalah dengan meningkatnya lingkungan permukiman kumuh pertahunnya, Secara visual wujud lingkungan, juga terdapat kecenderungan yang kurang positif bahwa sebagian kawasan perumahan dan permukiman telah mulai bergeser menjadi lebih tidak teratur, kurang berjati diri, dan kurang memperhatikan nilai-nilai kontekstual sesuai sosial budaya setempat serta nilai - nilai arsitektural yang baik. Selain itu, kawasan yang baru dibangun juga tidak secara berlanjut dijaga penataannya sehingga secara potensial dapat menjadi kawasan kumuh yang baru. Perumahan dan permukiman yang spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah juga semakin rawan keberlanjutannya, padahal merupakan asset budaya bangsa yang perlu dijaga kelestariannya

Bangunan rumah dengan atap bukan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau lainnya merupakan salah satu kriteria rumah layak huni, masih sekitar 9,77 persen rumahtangga yang belum memenuhi kriteria tersebut di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 28 Ketahanan Bangunan Rumah Tangga di Kabupaten Bangkalan

90,23%	Rumahtangga menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan
99,2%	Persentase rumahtangga menempati rumah dengan atap yang memenuhi syarat ketahanan bangunan
95,49%	Persentase rumahtangga menempati rumah dengan atap yang memenuhi syarat ketahanan bangunan
92,66%	Persentase rumahtangga menempati rumah dengan lantai yang memenuhi syarat ketahanan bangunan.

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangkalan terbagi atas kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan, luas kawasan permukiman perdesaan sebesar 10.561,98 Ha, sedangkan luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 6.892,30 Ha.

3.8.3 Fasilitas Pendidikan

Pada 2022, Kabupaten Bangkalan memiliki total 1.444 fasilitas pendidikan yang terdiri dari Sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 29 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Bangkalan

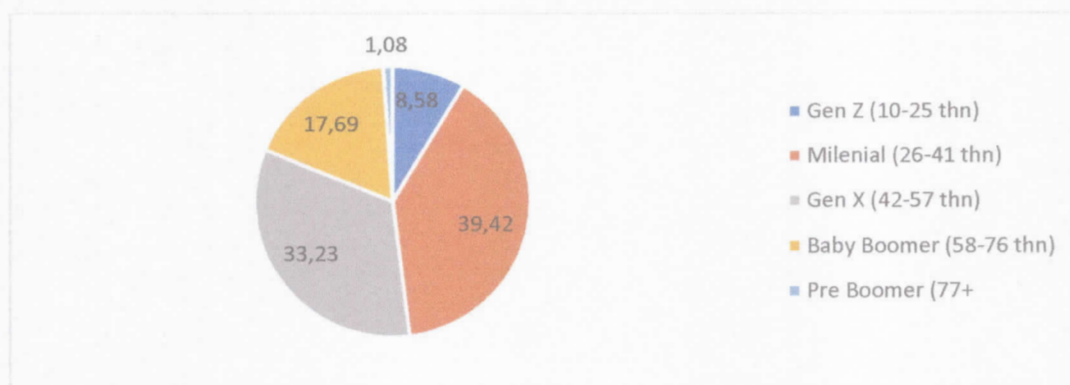
NO	FASILITAS	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	684
2	Madrasah Ibtidaiyah	146
3	Sekolah Menengah Pertama	256
4	Madrasah Tsanawiyah	144
5	Sekolah Menengah Atas	69
6	Sekolah Menengah Kejuruan	67
7	Madrasah Aliyah	73
8	Perguruan Tinggi	5

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023

3.8.4 Sarana Transportasi

Dengan keberadaan jembatan Suramadu dapat memperlancar arus penumpang, barang dan jasa. Kemudahan akses dan jarak tempuh yang lebih cepat melalui jembatan suramadu merupakan pilihan utama moda transportasi dari dan ke Madura. Dalam upaya meningkatkan pelayanan sektor transportasi publik wajib dilakukan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari MPU, Bis Umum, Bis Bukan Umum, Mobil Barang Umum, Mobil Barang Bukan Umum.

3.9 Kondisi Ketenagakerjaan

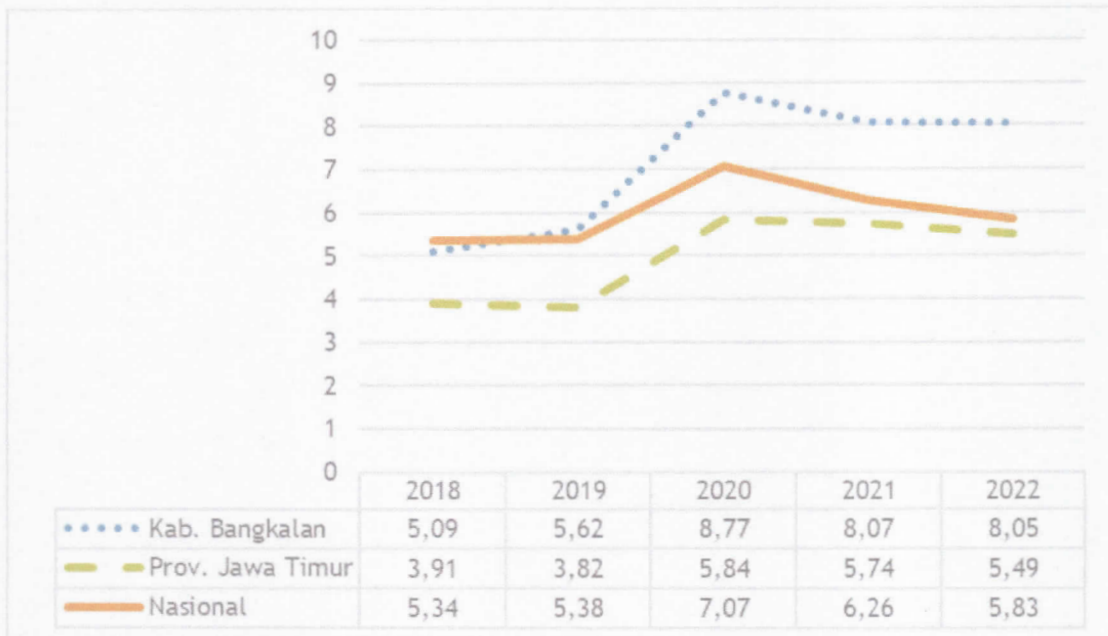


Gambar 32 Komposisi Penduduk Bekerja di Kabupaten Bangkalan Menurut Generasi (Persen)

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk Sensus Penduduk Kabupaten Bangkalan 2020

Komposisi penduduk bekerja didominasi oleh Milenial (39,42 persen), diikuti oleh Generasi X (33,23 persen), Baby Boomer (17,69 persen), Generasi Z (8,58 persen), dan Pre Boomer (1,08 persen).

Trend tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan masih meningkat, walaupun di tahun 2021 ada penurunan angka pengangguran. Oleh karena itu upaya untuk menurunkan angka TPT ini tentu menjadi prioritas bagi daerah. Adanya pandemi covid-19 tidak dipungkiri menjadi faktor penyumbang utama. Namun demikian, dengan adanya penurunan angka covid diharapkan bisa menurunkan tingkat pengangguran di Bangkalan. Hal ini telah terlihat pada menurunnya angka TPT di tahun 2022.



Gambar 33 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Bangkalan, Jawa Timur, dan Nasional

Sumber: BPS Nasional

Pada tahun 2022, kondisi Penduduk Usia Kerja, diketahui sebanyak 762.093 orang. Adapun data jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan menunjukkan angka sebesar 562.869 orang, dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 517.564 orang. Lebih jelasnya berikut dapat dikemukakan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 30 Situasi Umum Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja	717.771	726.233	734.621	746.659	762.093
2	Jumlah Angkatan Kerja	494.269	458.312	500.295	518.065	562.869
3	Jumlah Orang Yg. Bekerja	468.316	431.637	456.436	476.269	517.564
4	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	125	408	180	291	45.305

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bangkalan dan BPS Kab. Bangkalan

BAB IV

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional dan Daerah

4.1.1 Kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional dan Daerah

Kebijakan mengenai pembangunan kependudukan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik itu dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten. Penjabaran visi dan misi pembangunan di Kabupaten Bangkalan untuk 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global, nasional, regional, dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Visi RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan Yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal” ini selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”. Keselarasan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Bangkalan karena mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur “sebagai masyarakat sejahtera” sebagaimana diamanatkan dalam Undang– Undang Dasar 1945. Visi RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun juga selaras dengan visi RPJM Nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

4.1.2 Sasaran Kebijakan Pembangunan Kependudukan Nasional dan Daerah

A. RPJMN 2020-2024

Misi 3: Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Berikut merupakan sasaran, arah kebijakan, dan strategi untuk target 2024.

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, melalui:
 - a. Percepatan cakupan administrasi kependudukan
 - b. Integrasi sistem administrasi kependudukan
 - c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui:
 - a. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial

- b. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran
 - c. Perlindungan sosial adaptif
 - d. Peningkatan kesejahteraan social
 - e. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:
- a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
 - b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
 - c. Peningkatan pengendalian penyakit
 - d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - e. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:
- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - b. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
 - c. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
 - d. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah
 - e. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui:
- a. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya
 - b. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - c. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO
 - d. Peningkatan kualitas pemuda
6. Mengentaskan kemiskinan, melalui:
- 1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
 - 2. Keperantaraan usaha dan dampak social
 - 3. Reforma agrarian
 - 4. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial

7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
- b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
- c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi
- d. Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
- e. Penguatan pendamping pembangunan
- f. Pengelolaan manajemen talenta nasional

B. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2020-2024

Misi 2: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan. Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasilhasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.

Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan jaminan atas kesehatan, pendidikan maupun kedaulatan pangan menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan dasar diatas merupakan standar minimal dari pemenuhan atas hak ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (*inclusive economic order*). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur yang sehat, terdidik dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga yang terhormat, mulia dan merdeka. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur. Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada Misi 2:

1. Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan
- b. Meningkatnya Kemandirian PMKS.

2. Meningkatnya Kesetaraan Gender yang memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.

3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, yang memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas Pendidikan; dan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

4. Menurunnya Pengangguran, yang memiliki sasaran:

- a. Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat.

Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan antikorupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis complaint handling system secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada Misi 3:

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, yang memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
- b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;
- c. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
- d. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

b. Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.

- a. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- b. Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan
- c. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal

C. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin meningkatkan dan memantapkan penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Tujuan ini pun menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, dalam pembangunan. Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Kesalehan Sosial yang semakin membaik antar waktu. Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

- 1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup yang semakin tinggi
- 1.2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan yang diukur melalui Indeks Pendidikan yang semakin tinggi
- 1.3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang semakin meningkat
- 1.4. Meningkatkan kualitas Pembangunan Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan Indeks Pembangunan Pemuda yang meningkat setiap tahun
- 1.5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk yang diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang semakin membaik serta laju pertumbuhan yang terkendali.
- 1.6. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pencegahan dan penanganan konflik SARA / Politik/ bela negara dan upaya untuk menurunkan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda/Perkada.

Tujuan 2: Menurunkan Angka Kemiskinan

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin terus meningkatkan dan memantapkan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan, social dan pembangunan masyarakat dan desa. Tujuan ini pun menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan. Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan ini adalah tingkat pengangguran terbuka maupun persentase (tingkat) kemiskinan yang semakin menurun antar waktu, serta nilai indeks desa membangun yang semakin meningkat. Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

- 2.1. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosiasl (PPKS) yang terentaskan yang diukur melalui Persentase PPKS yang terentaskan yang semakin meningkat.
- 2.2. Meningkatnya Status Kemandirian Desa dengan ukuran Persentase Desa yang Meningkatkan Statusnya yang semakin tinggi
- 2.3. Menurunnya pengangguran yang ditandai dengan perubahan jumlah pengangguran (%).

Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan.

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin memantapkan pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial lokal Kabupaten Bangkalan yang mencakup pertanian (dalam arti luas), perdagangan, industri, pariwisata dan usaha mikro-koperasi yang didukung oleh investasi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang semakin meningkat kualitasnya. Tujuan ini diharapkan dapat menjawab isu strategis peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Indikator kinerja tujuan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung meningkat dan stabil, gini rasio yang semakin menurun, dan rata-rata kualitas infrastruktur yang terus meningkat, serta indeks resiko bencana yang semakin menurun. Sasaran-sasaran pembangunan dari tujuan ini adalah:

- 3.1. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian dalam arti luas yang terukur dari semakin meningkatnya nilai indikator Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan), peternakan (besar, sedang, dan V-16 unggas), dan perikanan
- 3.2. Meningkatnya realisasi investasi daerah dengan indikator pertumbuhan realisasi investasi daerah yang semakin meningkat dan stabil.

- 3.3. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan yang diukur melalui indikator pertumbuhan Pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan
- 3.4. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan yang diukur melalui pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan yang cenderung meningkat dan stabil.
- 3.5. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata yang diukur melalui pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat dan stabil
- 3.6. Meningkatnya produktifitas usaha ekonomi rakyat yang ditandai dengan indikator pertumbuhan omset usaha mikro dan koperasi yang cenderung meningkat dan stabil
- 3.7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator kinerja skor pola pangan harapan yang juga meningkat
- 3.8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman yang diukur melalui tiga indikator, yaitu Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik, Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik, dan Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik. Sasaran dikatakan berhasil jika nilai ketiga indikator tersebut semakin meningkat di setiap tahunnya.
- 3.9. Terjaganya kualitas lingkungan yang juga diukur melalui indikator, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat setiap tahunnya
- 3.10. Optimalnya penanganan bencana yang diukur Persentase Penanganan Bencana yang optimal, mendekati atau sama dengan 100%

Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan yang ingin memantapkan upaya-upaya penciptaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan, mencakup akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, profesionalitas aparatur sipili negara, maupun pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tujuan ini diarahkan untuk juga meningkatkan dan memantapkan upaya penciptaan ketentramana, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat. Tujuan ini pun diharapkan mampu menjawab isu strategis peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan atas tuntutan clean and good governance serta peningkatan pelayanan publik. Ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin lama semakin meningkat. Sementara itu, sasaran atau kondisi yang terjadi saat tujuan tercapai adalah:

- 4.1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik yang prima. Terdapat Sembilan (9) indikator kinerja sasaran ini, yaitu Nilai SAKIP, Status Kinerja LPPD, Opini BPK terhadap LKPD, level maturitas SPIP, indeks inovasi daerah, Rata-rata Konsistensi Program Perencanaan dengan Penganggaran Daerah, Kualitas Pengelolaan Arsip, Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indikator yang diharapkan adalah meningkat di setiap tahunnya.
- 4.2. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang diukur melalui indeks profesionalitas aparatur yang tinggi
- 4.3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga meningkat
- 4.4. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah yang diukur melalui pertumbuhan penghasilan asli daerah (PAD) yang semakin meningkat dan stabil.

4.2 Tinjauan Pencapaian Program Pembangunan Daerah

4.2.1 Program Pembangunan Kependudukan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, menyebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK umumnya dilakukan melalui lima pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Peraturan tersebut secara jelas menggambarkan mengenai cakupan perencanaan dan peran kebijakan perkembangan kependudukan terhadap sebuah wilayah. Pada kondisi eksisting, Kabupaten Bangkalan telah memiliki beberapa kebijakan strategis mengenai pembangunan kependudukan daerah yang termuat dalam rencana pembangunan Kabupaten Bangkalan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori program sesuai dengan lima pilar pembangunan untuk melihat sejauh mana ketercapaian program pembangunan kependudukan di Kabupaten Bangkalan. Program-program pembangunan kependudukan daerah di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 30 dan 31.

Tabel 30 menjelaskan mengenai kesesuaian antara program-program pada dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan secara umum telah selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, serta telah berusaha menyediakan layanan dasar, baik pendidikan dan kesehatan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun di sisi lain, strategi dan program tersebut belum sepenuhnya mengakomodir beberapa strategi dan program pembangunan kependudukan pada tingkat nasional dan provinsi, terutama pada pilar data dan administrasi kependudukan. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020 – 2024, terdapat beberapa strategi dan program yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang valid, meningkatkan integrasi data antar OPD/Instansi, serta meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya, pada Tabel 31 dijabarkan beberapa program Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang saat ini telah berjalan dan akan dilakukan berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bangkalan masih memerlukan adanya beberapa program tambahan guna mendukung pembangunan kependudukan di Kabupaten Bangkalan, terutama pada pilar kuantitas penduduk, kualitas penduduk, serta data dan administrasi penduduk.

Tabel 31 Strategi dan Program Pembangunan Kependudukan pada Dokumen-dokumen Perencanaan

No	Strategi dan Program Perpilar Kependudukan	RPJMN 2020-2024	RPJMD Jatim 2019-2024	RPD Bangkalan 2024-2026
A	Kuantitas Penduduk			
	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting			
	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan			
	Terpenuhinya Layanan Dasar Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar)			
	Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Dan Layanan Terpadu			
	Percepatan Perbaikan Gizi			

No	Strategi dan Program Pilar Kependudukan	RPJMN 2020-2024	RPJMD Jatim 2019-2024	RPD Bangkalan 2024-2026
	Masyarakat			
	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) Dan Kesehatan Reproduksi			
	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak, serta Pengaturan Kelahiran			
B	Kualitas Penduduk			
	Peningkatan Pengendalian Penyakit			
	Terpenuhinya Layanan Dasar Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar)			
	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat			
	Pemenuhan Dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan			
	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman			
	Akses Air Minum Perpipaan			
	Terpenuhinya Layanan Dasar Pendidikan (Fasilitas Pendidikan Sesuai Standar)			
	Peningkatan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Di Semua Jenjang Dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun			
	Peningkatan Profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan, Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Merata			
	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah			
	Pengentasan Kemiskinan			
	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga			
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing SDM			
C	Pembangunan Keluarga			
	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh			
	Peningkatan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk			
	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda			
	Penguatan Pelaksanaan Jaminan Sosial			
	Penguatan Pelaksanaan Pendampingan Dan Layanan			

No	Strategi dan Program Perpilar Kependudukan	RPJMN 2020-2024	RPJMD Jatim 2019-2024	RPD Bangkalan 2024-2026
	Terpadu			
	Peningkatan Perlindungan Perempuan, Termasuk Pekerja Migran Dari Kekerasan Dan TPPO			
	Pemberdayaan Masyarakat			
	Perencanaan Keluarga Sejahtera			
D	Persebaran dan Mobilitas Penduduk			
	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Industri 4.0			
	Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi			
	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			
	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Dan Pengoptimalan Potensi Unggulan Daerah			
	Peningkatan Ketrampilan Kerja Yang Memiliki Daya Saing Tinggi			
	Adanya Peraturan Daerah (Perda) Yang Mengatur Lembaga Penyaluran Tenaga Kerja Dan Calon Tenaga Kerja			
E	Data dan Administrasi Kependudukan			
	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan dan Perluasan Jangkauan Layanan			
	Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Masyarakat dalam Melakukan Pencatatan Data Kependudukan (Kelahiran, Kematian, Migrasi, Menikah, dsb)			
	Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagi Kelompok Khusus			
	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan			
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan			
	Membangun Jaringan dan Program Aplikasi Kependudukan Yang Tersambung di Setiap Kecamatan			
	Mengupayakan Penyediaan Data Kependudukan Yang Valid			

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 32 Program Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
A	KUANTITAS PENDUDUK							
1	Program Pengendalian Penduduk	Presentase Kampung KB	43%	58%	73%	88%	100%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan
		Presentase Cakupan Pelayanan KB	82%	84%	86%	88%	90%	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	24,45	22,2	19,95	17,7	15,45	
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	5,67	5,17	4,67	4,17	3,67	
		Age Specific Fertility Rate (ASFR) umur 15-19 tahun	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	
		Prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	59,1%	60%	61%	62%	63%	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23	25	25	25	25	
		Metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup (MKJP)	30%	35%	40%	45%	50%	
2	Program Pengendalian Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,33	1,28	1,23	1,18	1,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Total Fertility rate	2,01	1,92	1,83	1,74	1,65	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab	
			2028	2033	2038	2043	2048		
3	Program Pendewasaan Usia Pernikahan	Program Generasi Berencana (Genre) per 1000 kelahiran	25-30	35	40	45	50	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
B	KUALITAS PENDUDUK								
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	95,82	96,92	98,02	99,12	100	Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA	63,66	65,25	66,83	68,42	70		
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	82,32	84,32	86,32	88,32	90,32		
		Angka Partisipasi Murni SMA/MA	44,57	47,22	49,87	52,52	55,17		
2	Program Sosialisasi Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	7,36	8,52	9,68	10,84	12		
		Harapan Lama Sekolah	12,62	13,22	13,81	14,41	15		
3	Program peningkatan kualitas sarana pendidikan	Persentase jumlah sarana pendidikan yang sesuai dengan standar	14,7 %	26,82%	48,28%	60,62%	88,4%		
4	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	Persentase Jumlah Tenaga Pendidik yang Telah Memenuhi Sertifikasi	19,15%	26,31%	35,77%	42,27%	52,03%		
5	Program pemenuhan akses layanan kesehatan	Persentase jumlah sarana kesehatan yang telah memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%		Dinas Kesehatan
6	Program penyediaan alat kesehatan sesuai dengan standar	Persentase ketersediaan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	70%	75%	80%	85%	90%		
7	Program peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	70%	75%	80%	85%	90%		
8	Program sosialisasi dan edukasi perilaku	Persentase tumah tangga berperilaku	50%	55%	60%	65%	70%		

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
	hidup bersih dan sehat	hidup bersih dan sehat						
9	Program pendampingan dan pembinaan kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	26,4%	21%	16%	11%	6%	
10	Program jaminan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	94%	96%	98%	100%	100%	
11	Program penguatan sektor padat karya dan bernilai tambah	Persentase penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor padat karya dan bernilai tambah	40%	50%	60%	70%	80%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
12	Program pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi dengan kebutuhan industri dan potensi daerah	Tingkat produktivitas tenaga kerja	80%	85%	90%	95%	100%	
11	Program penguatan ekosistem digital pada sektor ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi digital	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5	Program Pendampingan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Gizi Buruk	0,65	0,55	0,45	0,35	0,25	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan
		Persentase Stunting Anak	11,86	10,86	9,86	8,86	7,86	
		Persentase Pemberian ASI Eksklusif	37,8	42,8	47,8	52,8	57,8	
4	Standar Hidup Layak	Pendapatan Perkapita (juta	30,78	35,605	40,43	45,255	50,08	Dinas Perindustrian

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
		rupiah)						dan Tenaga Kerja dan Dinas Sosial
		Gini Ratio	0,3	0,295	0,29	0,285	0,28	
		Tingkat Pengangguran	7,924	7,819	7,714	7,609	7,504	
		Tingkat Kemiskinan	18,42	17,57	16,72	15,87	15,02	
		Dependency Ratio	44,71	47,21	49,71	52,21	54,71	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49	76,99	79,49	81,99	84,49	
5	Program Peningkatan Kualitas penduduk	Indeks Pembangunan Manusia	67,45	69,45	71,45	73,45	75,45	
C	PERSEBARAN & MOBILITAS PENDUDUK							
1	Persebaran Penduduk	Kepadatan Penduduk	935	997	1061	1126	1192	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Mobilitas Penduduk	Migrasi Masuk Seumur Hidup	4,15	4,65	5,15	5,65	6,15	
3	Program pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Sarana Dan Prasarana Air Minum Yang Dibangun	62%	67%	72%	77%	82%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun	32%	37%	42%	47%	52%	
		Persentase Ruas Jalan Kabupaten Yang Baik	71%	76%	81%	86%	91%	
		Persentase Kawasan Permukiman Yang Ditangani	64,2%	69%	74%	79%	84%	
4	Program Penguatan Keterampilan dan daya saing SDM	Tingkat pengangguran terbuka	7,92	7,82	7,71	7,61	7,5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	Program pemanfaatan potensi unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Tenaga
6	Program penanaman modal pengembangan usaha	Persentase nilai Investasi PMA, PMDN	7%	9,5%	12%	14,5%	17%	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
								Kerja, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
D	PEMBANGUNAN KELUARGA							
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Prasejahter	Penduduk Prasejahter	13,64	12,64	11,64	10,64	9,64	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Keluarga Prasejahter	13,22	12,22	11,22	10,22	9,22	
2	Peningkatan Pembangunan gender	Indeks Pembangunan gender	87,98	88,505	89,03	89,555	90,08	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat kelompok rentan	Persentase jumlah keluarga mandiri ekonomi	20%	30%	40%	50%	60%	
4	Program pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Persentase jumlah kepala keluarga perempuan mandiri ekonomi	30%	40%	50%	60%	70%	
5	Program Pendampingan dan pembinaan keluarga	Persentase capaian peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	50%	65%	80%	95%	100%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program sosialisasi dan pembinaan pra nikah	Persentase capaian peningkatan akses informasi, pengetahuan, dan kesiapan sebagai calon orang tua	50%	65%	80%	95%	100%	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
7	Program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	Partisipasi Keluarga Dalam Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	60%	70%	80%	90%	100%	
		Partisipasi Keluarga Dalam Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga	60%	70%	80%	90%	100%	
		Partisipasi Remaja Dalam Kegiatan Generasi Berencana	60%	70%	80%	90%	100%	
		Persentase Kampung KB Aktif	43,11%	58,11%	73,11%	88,11%	100%	
		Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	50%	65%	80%	95%	100%	
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	60	65	70	75	80	
		Partisipasi Tri Bina (BKB, BKR, BKL)	60%	70%	80%	90%	100%	
		Partisipasi SOTH	60%	70%	80%	90%	100%	
		Partisipasi Selantang	60%	70%	80%	90%	100%	
8	Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) \geq 20 tahun	79%	84%	89%	94%	100%	
9	Program pembinaan, keterampilan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	11,5%	16,5%	21,5%	26,5%	31,5%	
E	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
1	Program dokumen kependudukan	Persentase Penduduk Punya KTP	94%	96%	98%	99%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
		Presentase penduduk Punya Akta Kelahiran	93%	96%	99%	100%	100%	Sipil, dan Dinas Komunikasi dan Informatika
		Presentase penduduk Punya KK	90%	93%	96%	99%	100%	
2	Program pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	90%	93%	96%	99%	100%	
3	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	90%	93%	96%	99%	100%	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	80%	85%	90%	95%	100%	
5	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	75%	80%	85%	90%	95%	
6	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	75%	80%	85%	90%	95%	
7	Program aplikasi informatika	Persentase aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	40%	50%	60%	70%	80%	

4.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Pencapaian Program Pembangunan Kependudukan

Analisis gap atau yang dikenal dengan analisis kesenjangan merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan antara kondisi eksisting dengan target kinerja program pembangunan kependudukan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan program pembangunan kependudukan di masa mendatang. Analisis ini dilakukan berdasarkan kategori program yang mengacu kepada lima pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan (database penduduk).

4.3.1 Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berkualitas (KB). Kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak. Kabupaten Bangkalan telah memiliki beberapa program kependudukan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan kuantitas penduduk. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing program.

A. Program Pengendalian Penduduk

Peningkatan kuantitas penduduk yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada beberapa aspek kehidupan seperti lingkungan, ekonomi, keamanan, dll. Maka perlu sebuah program pengendalian penduduk yang sesuai pada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Program Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan kuantitas penduduk. Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi:

1. Pendewasaan usia perkawinan;
2. Pengaturan kehamilan yang diinginkan
3. Pembinaan kesertaan keluarga berencana
4. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan
5. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana

Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa Kampung KB Aktif telah mencapai 28% yang memiliki arti bahwa masih seperempat dari seluruh kampung/desa di Kabupaten Bangkalan telah aktif mengikuti program KB. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program KB mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Tabel 33 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk

Indikator	2020	2021	2022
Laju pertumbuhan penduduk	1,54	1,07	1,39
Total Fertility Rate	2,13	2,14	2,27
Unmeet Need	-	-	20,29
Penggunaan Kontrasepsi (CPR)	-	-	45,11

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Bangkalan 2023

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Salah satu arah kebijakan dari program Keluarga Berkualitas (KB) yaitu Pembinaan Keluarga Berencana. Pada awal pengenalan program pada masyarakat perlu dilakukannya pembinaan supaya dalam prosesnya sesuai dengan yang diharapkan dan program KB berhasil. Berdasarkan Profil Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, indikator program ini yaitu Persentase Cakupan Pelayanan KB. Pada tahun 2022 tingkat cakupan pelayanan KB di Bangkalan mencapai 79,71%. Artinya bahwa masih ada 20,29% yang belum menikmati layanan KB.

4.3.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Berdasarkan dokumen Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, disebutkan bahwa peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM

merupakan indikator penting yang dibentuk oleh tiga dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) dan berfungsi untuk mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Bangkalan telah memiliki beberapa program kependudukan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing program kependudukan di Kabupaten Bangkalan yang termasuk ke dalam kategori variabel IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingginya kebutuhan dan permintaan jasa pendidikan menuntut adanya penyediaan fasilitas sekaligus penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada dokumen kebijakan rencana pembangunan Kabupaten Bangkalan, baik pada jangka panjang, menengah, dan pendek, terdapat beberapa program mengenai peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan, meliputi:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Masing-masing program tersebut memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan keberhasilan kinerja pelaksanaan program. Secara umum, indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Berikut merupakan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bangkalan:

Tabel 34 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tahun	Umur		
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA/SMK
1	2021	108,39 %	89,64 %	57,00 %
2	2022	108,56 %	94,50 %	61,76 %

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7-12 tahun mencapai angka optimal 108 persen pada periode 2 tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. APS pada kelompok usia 13-15 tahun mencapai rata-rata 92 persen. Kabupaten Bangkalan memiliki APS tertinggi pada kelompok usia 13-15 tahun mencapai 94,50 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Bangkalan memiliki APS 89,64 persen pada kelompok usia 13-15 tahun. APS pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami penurunan dari kelompok usia 13-15 tahun yakni memiliki rata-rata 59,38 persen. Kabupaten Bangkalan memiliki APS pada kelompok usia 16-18 tahun mencapai 57 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 APS Kabupaten Bangkalan mencapai 61,76 persen pada kelompok usia 16-18 tahun.

Faktor yang mempengaruhi capaian APS tertinggi dan terendah bisa dilihat pada jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan di setiap kabupaten/kota sesuai dengan kelompok usia tertentu. Faktor ekonomi juga dapat memengaruhi APS, apabila ekonomi suatu penduduk tinggi maka pendidikan akan juga semakin tinggi.

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Adapun data yang diperlukan dalam menghitung angka partisipasi murni yakni jumlah penduduk pada perhitungan APM serta data jumlah penduduk menurut kelompok umur standar yang berkaitan dengan jenjang pendidikan. Berikut data angka partisipasi murni menurut kelompok umur sekolah pada Kabupaten Bangkalan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 35 Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tahun	Umur		
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA/SMK
1	2021	96,39 %	74,16 %	41,61 %
2	2022	99,99 %	72,92 %	41,39 %

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan tabel di atas, APM jenjang pendidikan SD usia 7-12 Tahun Kabupaten Bangkalan sebesar 96,39 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 APM jenjang pendidikan SD usia 7-12 tahun di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan yakni sebesar 99,99 persen. APM pada jenjang pendidikan SMP usia 13-15 tahun di Kabupaten Bangkalan sebesar 74,16 persen pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 Kabupaten Bangkalan memiliki APM mencapai 72,92 persen. APM pada jenjang pendidikan SMA usia 16-18 Tahun di Kabupaten Bangkalan sebesar 41,61 persen pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 41,39 persen.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan dalam APM disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan permasalahan individu karena rendahnya motivasi dan minat untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dan anggapan bahwa pendidikan sudah cukup hanya dengan mampu membaca dan menulis. Sementara faktor eksternal bisa dipengaruhi karena faktor ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, serta kemudahan akses ke fasilitas pendidikan dan budaya pada lingkungan suatu wilayah tersebut.

3. Sarana Pendidikan

Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan ialah dengan penyediaan sarana fisik pendidikan yang memadai. Secara umum, fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan telah tersebar di seluruh kecamatan. Berikut merupakan jumlah dan persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten bangkalan:

Tabel 36 Jumlah dan Persebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Bangkalan

Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
Bangkalan	52	193	38	3	18	5	9	4	10
Socah	32	225	41	2	6	5	2	1	1
Burneh	43	123	37	4	18	9	8	4	3
Kamal	34	347	26	1	6	2	1	0	1
Arosbaya	20	389	34	3	11	6	5	3	3
Geger	40	620	46	18	25	8	4	7	5
Klampus	24	369	35	6	11	7	1	3	2
Sepulu	25	212	34	2	8	5	3	2	2

Tanjung Bumi	22	158	38	4	10	10	3	5	1
Kokop	31	165	51	15	30	11	4	7	6
Kwanyar	19	361	32	4	14	4	2	1	7
Labang	21	299	24	3	8	4	2	3	5
Tanah Merah	35	615	51	7	15	9	3	1	3
Tragah	19	45	20	3	10	0	1	0	2
Blega	16	519	44	17	17	20	10	7	7
Modung	17	255	35	6	16	12	8	11	5
Konang	11	218	46	20	18	9	3	6	2
Galis	25	282	52	28	15	18	0	8	2
Kabupaten Bangkalan	486	5.395	684	146	256	144	69	73	67

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Geger sebagai pusat aktivitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah sarana pendidikan paling banyak, yaitu 773 unit dengan jenis sarana pendidikan terbanyak ialah RA (620 unit). Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah sarana pendidikan paling sedikit adalah Kecamatan Tragah, yaitu 100 unit. Sementara itu, apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, dari tabel di atas menunjukkan bahwa RA merupakan jenis sarana pendidikan paling banyak di Kabupaten Bangkalan, yaitu sebanyak 5.395 unit.

4. Tenaga Kependidikan

Salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan ialah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan yang memadai. Berikut merupakan jumlah tenaga kependidikan di Kabupaten Bangkalan:

Tabel 37 Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bangkalan

Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
Bangkalan	231	13	613	29	382	135	315	283	161
Socah	98	21	369	16	77	55	17	13	6
Burneh	170	17	353	39	222	103	95	45	38
Kamal	98	37	261	29	165	29	60	49	-
Arosbaya	72	37	286	23	143	92	108	73	53
Geger	121	56	329	160	191	89	29	27	83
Klampus	77	42	258	60	98	72	6	8	31
Sepulu	80	20	212	12	100	59	27	47	22
Tanjung Bumi	58	12	300	40	123	115	64	26	51
Kokop	94	20	409	136	206	149	45	41	78
Kwanyar	72	34	265	33	135	41	51	68	18
Labang	61	31	231	36	99	68	14	82	56
Tanah Merah	99	63	375	64	172	110	22	43	28
Tragah	58	3	160	33	105	-	12	16	-
Blega	54	57	360	149	168	203	96	75	67
Modung	56	22	271	69	136	150	46	47	122
Konang	19	35	295	194	119	114	21	20	63
Galis	88	36	398	234	127	217	-	17	72

Kabupaten Bangkalan	1 606	556	5 745	1 356	2 768	1 801	1 028	980	949
---------------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

B. Kesehatan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penduduk ialah melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan disertai dengan tenaga kesehatan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Upaya tersebut diarahkan agar tempat pelayanan kesehatan mudah dikunjungi dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pada dokumen kebijakan rencana pembangunan Kabupaten Bangkalan, baik pada jangka panjang, menengah, dan pendek, terdapat beberapa program mengenai peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Bangkalan, meliputi:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Masing-masing program tersebut memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan keberhasilan kinerja pelaksanaan program. Secara umum, indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Sarana Kesehatan

Pada tahun 2022, terdapat 26 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Terdiri dari rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan puskesmas. Puskesmas menjadi jenis dengan jumlah terbanyak yakni 22 unit.

Tabel 38 Jumlah dan Persebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Kecamatan	RS Umum	RS Khusus	Puskesmas
Kamal	-	-	1
Labang	-	-	1
Kwanyar	-	-	1
Modung	-	-	2
Blega	-	-	1
Konang	-	-	1
Galis	-	-	2
Tanah Merah	-	-	1
Tragah	-	-	1
Socah	-	-	2
Bangkalan	3	1	1
Burneh	-	-	1
Arosbaya	-	-	2
Geger	-	-	1
Kokop	-	-	1
Tanjungbumi	-	-	1
Sepulu	-	-	1
Klampus	-	-	1
Kabupaten Bangkalan	3	1	22

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

2. Masyarakat

Keberhasilan pembangunan kesehatan juga dipengaruhi oleh peran serta atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya kesehatan. Salah satu wadah yang menampung peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan adalah Posyandu Balita, POSBINDU, Posyandu Lansia, UKK, POSKESTREN dan UKBM lainnya.

C. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak dapat dilihat melalui daya beli masyarakat yang meliputi jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan sebagainya. Terdapat beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, meliputi:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Masing-masing program tersebut memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan keberhasilan kinerja pelaksanaan program. Secara umum, indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan mempengaruhi output produksi.

Tabel 39 Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran 2020-2022

TAHUN	ANGKATAN KERJA	PENDUDUK BEKERJA		PENGANGGURAN	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
2020	500.295	456.436	91,23	43.859	8,77
2021	518.065	476.269	91,93	41.796	8,07
2022	562869	517.564	91,95	45.305	8,05

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 2022

Berdasarkan dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja semakin meningkat setiap tahun. Sedangkan angka pengangguran semakin menurun setiap tahunnya. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat yang disebabkan jumlah penduduk usia produktif meningkat, namun jumlah penduduk bekerja bertambah dan angka pengangguran berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan mampu mengelola ketenagakerjaan dengan baik dengan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat menekan angka pengangguran.

2. Jumlah pengangguran Terbuka

Dalam urusan tenaga kerja, tren dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) selalu menjadi indikator keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Bangkalan sebesar 8,77 persen, angka ini tergolong lebih tinggi dari tahun-tahun lainnya karena pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 8,07 persen. Dan pada

tahun 2022 menjadi 8,05 persen, hal ini karena sudah melalui pemulihan ekonomi pasca pandemi.



Gambar 34 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka 2020-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

3. Jumlah Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Kemiskinan terjadi karena rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan dan juga rendahnya pendapatan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada 2020 mengalami kenaikan akibat dari pandemi Covid-19. Dan tren kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2021, kemudian kembali bisa ditekan pada 2022.



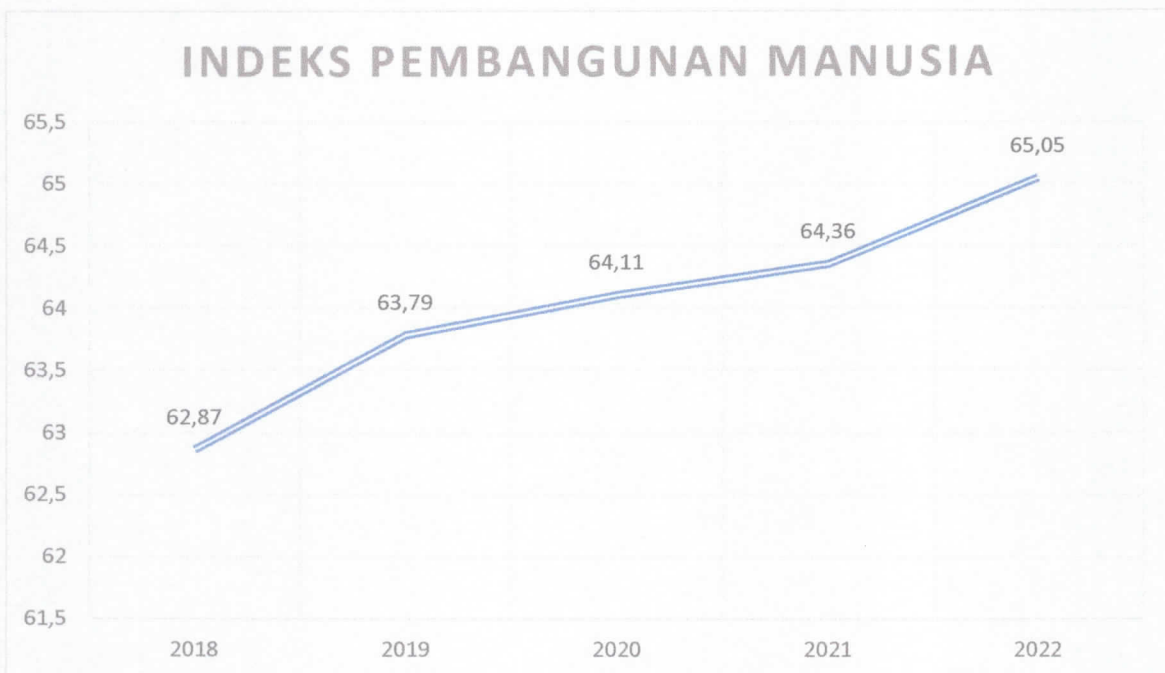
Gambar 35 Persentase Penduduk Miskin Bangkalan 2018-2022

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Ketiga aspek yang telah dibahas sebelumnya, meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak merupakan faktor pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan melalui kemampuan daya belinya, kesehatan, pendidikan. Pembangunan manusia dinilai berhasil apabila penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, IPM Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan, meskipun masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional. Peningkatan nilai IPM menjadi 64,11 pada tahun 2020 menjadikan Kabupaten Bangkalan menjadi Kabupaten dengan IPM sedang. Kemudian pada 2021 menjadi 64,36, dan pada 2022 menjadi 65,05. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui peningkatan IPM.

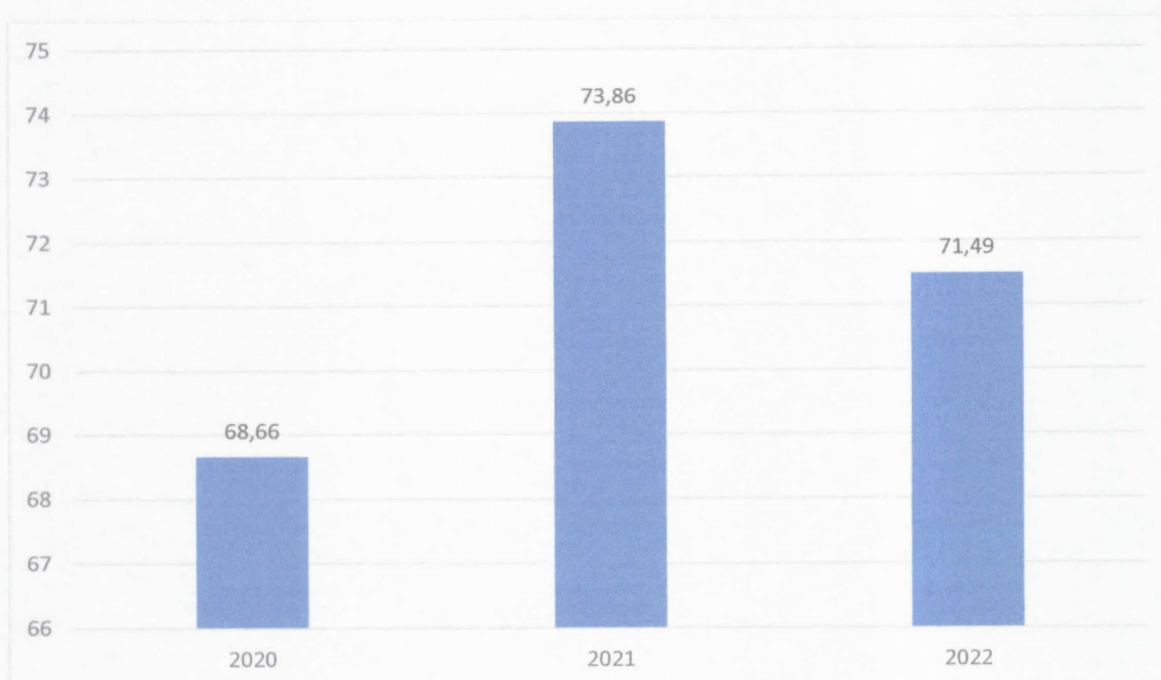


Gambar 36 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Bangkalan 2018-2022

Sumber: Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

Meskipun jika dilihat dari data selama lima tahun tren IPM Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 ini masih berada di urutan ke-2 terendah pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM di lakukan terus menerus utamanya pada indeks pendidikan yang masih di bawah rata-rata nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Timur melalui kejar paket A, B dan C. Di samping itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat banyak di lakukan dengan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat di berbagai bidang di seluruh wilayah baik di pedesaan maupun di perkotaan. Melalui program Pendidikan hebat, Kesehatan hebat dan UMKM hebat akan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Bangkalan di tahun mendatang.

TPAK juga dijadikan sebagai indikator kualitas penduduk sebagai perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan, hal tersebut mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yang masih fluktuatif dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan penduduk usia kerja yang juga terus mengalami peningkatan. Sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, ditambah lagi semenjak terjadi covid-19 di tahun 2020 yang telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat, termasuk tatanan dunia pasar kerja. Data ini dapat dilihat dibawah:



Gambar 37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Bangkalan 2020-2022

4.3.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Kabupaten Bangkalan telah memiliki beberapa program kependudukan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan kuantitas penduduk. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing program.

Informasi mengenai struktur perkawinan penduduk pada kurun waktu dan wilayah tertentu bermanfaat bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Perkawinan dibawah umur (usia muda) menjadi salah satu permasalahan meskipun angka atau tingkat perkawinan di bawah umur tidak tinggi akan tetapi terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pernikahan di bawah umur mengakibatkan kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Sehingga perkawinan di bawah umur akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, hal tersebut dikarenakan ketika memutuskan untuk menikah di usia yang tergolong dibawah umur maka sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas. Berikut merupakan tabel jumlah pernikahan di bawah umur Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Tabel 40 Jumlah PUS Menurut Usia Kawin Pertama

No	Kecamatan	JUMLAH PUS	WANITA			
			< 20 TAHUN		≥ 20 TAHUN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Bangkalan	11,040	1,526	13.82	9,514	86.18
2	Socah	8,504	2,441	28.70	6,063	71.30
3	Burneh	5,626	1,096	19.48	4,530	80.52
4	Kamal	6,242	1,350	21.63	4,892	78.37
5	Arosbaya	5,855	1,367	23.35	4,488	76.65
6	Geger	8,795	2,220	25.24	6,575	74.76
7	Klampis	7,091	1,632	23.02	5,459	76.98
8	Sepulu	5,366	1,185	22.08	4,181	77.92

9	Tanjung Bumi	5,448	1,646	30.21	3,802	69.79
10	Kokop	5,666	1,591	28.08	4,075	71.92
11	Kwanyar	6,062	1,777	29.31	4,285	70.69
12	Labang	5,403	1,600	29.61	3,803	70.39
13	Tanah Merah	8,292	2,245	27.07	6,047	72.93
14	Tragah	3,924	1,147	29.23	2,777	70.77
15	Blega	6,959	2,146	30.84	4,813	69.16
16	Modung	5,389	1,571	29.15	3,818	70.85
17	Konang	7,626	2,867	37.60	4,759	62.40
18	Galis	11,304	2,953	26.12	8,351	73.88
Jumlah Total		124,592	32,360	25.97	92,232	74.03

Sumber: Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 25,97 persen wanita yang menikah di Bangkalan adalah dibawah usia 20 tahun. Kecamatan blega menjadi wilayah yang memiliki jumlah wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun yakni sebesar 30,84 persen. Sedangkan Kecamatan Bangkalan menjadi wilayah dengan jumlah wanita menikah dibawah usia 20 tahun yakni sebesar 13.82 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur antara lain karena rendahnya perekonomian di dalam keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan yang rendah, kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, serta faktor budaya atau adat-istiadat (misal: perjodohan yang dilakukan oleh orang tua sejak kecil). Diperlukan beberapa upaya untuk menurunkan jumlah pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai batasan usia menikah dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur, sosialisasi kepada masyarakat terkait wajib pendidikan 12 tahun, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Masalah kemiskinan juga berpengaruh terhadap kualitas sebuah keluarga. Kemiskinan ialah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat diakibatkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan memberikan dampak yang sangat kompleks dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Faktor-faktor yang mempengaruhi PPKS salah satunya yaitu kemiskinan. Dalam menangani masalah kesejahteraan sosial maka perlu melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan, sehingga diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat.

4.3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan ketika merumuskan arah dan kebijakan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah.

A. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bangkalan dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.461,18 jiwa per km², sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pudak dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 188,61 jiwa per km². Berikut ini merupakan persebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 41 Kepadatan Penduduk dan Persentase Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan penduduk (per km ²)	Persentase Penduduk (%)
Bangkalan	88356	35,02	2.523	8,50
Socah	62946	53,82	1.170	6,06
Burneh	62766	66,1	950	6,04
Kamal	49375	41,4	1.193	4,75
Arosbaya	46747	42,46	1.101	4,50
Geger	79503	123,31	645	7,65
Klampus	54582	67,1	813	5,25
Sepulu	43350	73,25	592	4,17
Tanjung Bumi	53131	67,49	787	5,11
Kokop	70893	125,75	564	6,82
Kwanyar	50868	47,81	1.064	4,89
Labang	38402	35,23	1.090	3,70
Tanah Merah	69048	68,56	1.007	6,64
Tragah	30860	39,58	780	2,97
Blega	57710	92,82	622	5,55
Modung	44323	78,79	563	4,26
Konang	52847	81,09	652	5,08
Galis	83581	120,56	693	8,04
Kabupaten Bangkalan	1.039.288	1.260,12	825	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh faktor demografi berdasarkan kepadatan penduduk. Kesenjangan sosial akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Adapun beberapa dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata diantaranya yaitu:

1. Munculnya masalah sosial seperti permukiman kumuh di daerah yang penduduknya padat
2. Terjadinya kesenjangan dalam hal pembangunan, perekonomian, dan akses pendidikan akibat persebaran yang tidak merata. Sehingga menimbulkan terpusatnya kegiatan ekonomi pada daerah tertentu.
3. Kurangnya tenaga kerja di wilayah penduduk dengan tingkat kepadatan rendah, dan tingginya angka pengangguran di wilayah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam
5. Terjadinya kemacetan di wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi.

Berdasarkan beberapa dampak yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk yang tidak merata diatas, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya yaitu:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan di daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.
2. Pengurangan pertumbuhan penduduk dengan memberlakukan program Keluarga Berkualitas (KB).
3. Melakukan program transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang memiliki penduduk padat menuju daerah yang jarang penduduknya.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur sehingga gap antara daerah dengan padat penduduk dan daerah dengan jarang penduduk semakin kecil.

B. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Pergerakan tersebut bersifat sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap. Mobilitas penduduk dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik. Salah satu faktor pendorong yaitu daerah asal, dimana daerah asal sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi dorongan dari daerah asal meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar pendorong dalam melakukan mobilitas penduduk untuk bermigrasi meninggalkan tempat tinggal mereka. Pada umumnya mobilitas penduduk dilakukan karena seseorang ingin merubah taraf hidup menjadi lebih baik.

2. Faktor Pendidikan

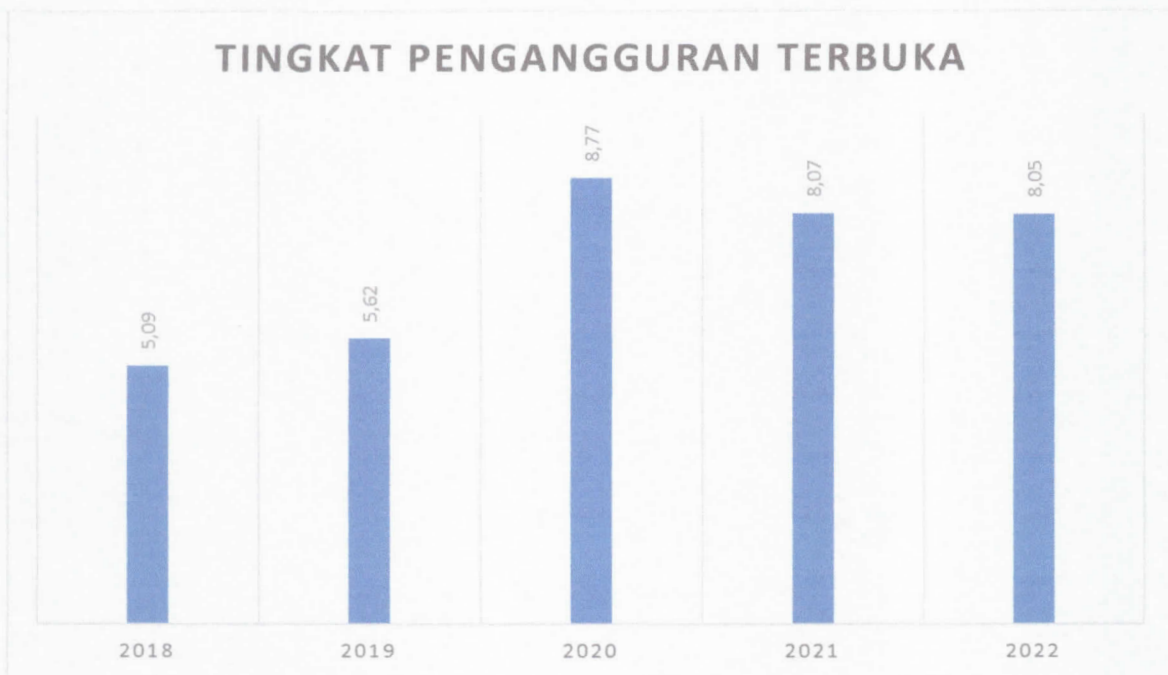
Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor pendorong datangnya para imigran untuk melakukan mobilitas penduduk. Volume migrasi dalam salah satu wilayah tertentu berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan dari suatu wilayah tertentu yang merupakan daya tarik bagi penduduk dari berbagai jenis pendidikan.

3. Faktor Transportasi

Tersedianya sarana transportasi merupakan salah satu pendorong mobilitas. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya alat transportasi yang lengkap masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses keluar daerah untuk meningkatkan ekonomi disuatu daerah dan mempermudah orang-orang untuk bekerja atau bersekolah. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat desa akan semakin sering untuk melakukan perjalanan ke kota dengan ongkos murah. Sedangkan faktor penarik mobilitas penduduk diantaranya:

- a. Tersedianya lapangan pekerjaan.
- b. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
- c. Kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan.
- d. Keadaan lingkungan yang menyenangkan.
- e. Kemajuan di tempat tujuan

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat mobilitas penduduk yaitu dengan pemerataan lapangan pekerjaan diseluruh wilayah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah yang dimiliki.



Gambar 38 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangkalan 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Terjadinya pengangguran pada umumnya disebabkan karena ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Angka pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bangkalan menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,77 persen %. Peningkatan tersebut disebabkan akibat dampak pandemik Covid 19. Dampak pengangguran di bidang pembangunan diantaranya yaitu dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan perkapita masyarakat, sumber utama kemiskinan, hingga pemborosan sumber daya, dan potensi yang ada. Masalah pengangguran sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Berdasarkan hal tersebut maka masalah pengangguran perlu diatasi kedepannya dikarenakan dapat menyebabkan masalah kemiskinan jangka panjang dan terjadi kesenjangan sosial terhadap pemerataan ekonomi.

4.3.5 Administrasi Kependudukan

Pada pilar ke lima yaitu database kependudukan, memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan. Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

1. Penataan dan pengelolaan database kependudukan
2. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan
3. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa
4. Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi

Berikut merupakan penjelasan dari tiap program pada pilar ini yang disertai capaian dan target kinerja program. Penjelasan akan dibedakan dalam 2 aspek yaitu yang pertama mengenai administrasi kependudukan dan yang kedua membahas mengenai publikasi informasi kependudukan.

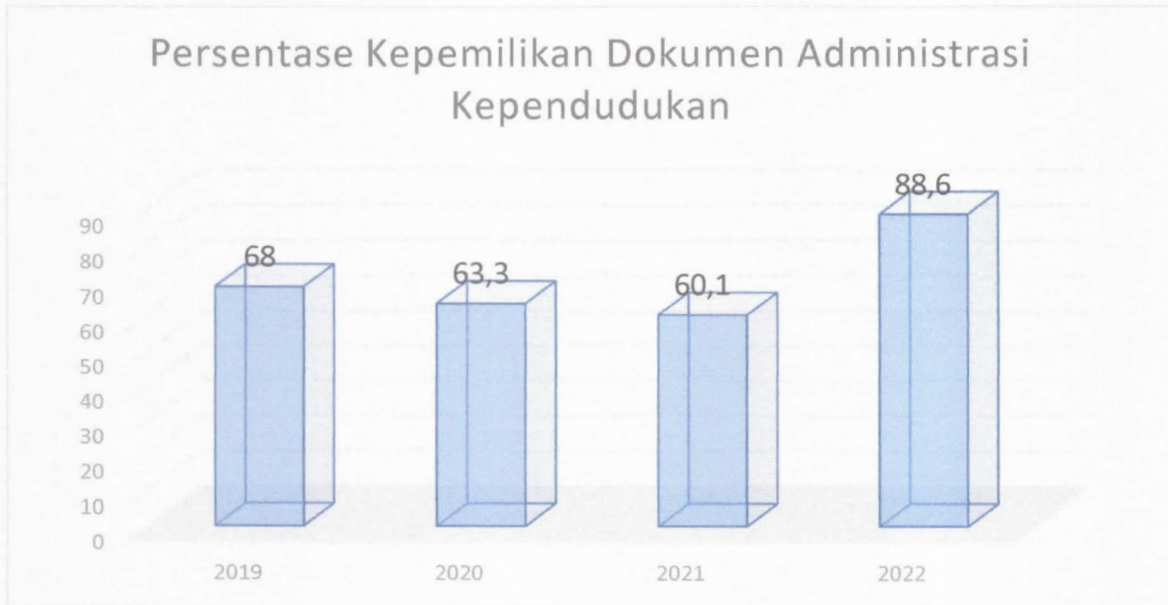
A. Administrasi Kependudukan

Aspek pertama yang akan dijelaskan yaitu administrasi kependudukan. Pada aspek ini akan dibahas mengenai pendataan penduduk. Terdapat 3 program yaitu Program Pendaftaran

Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Program Pendaftaran Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah sangat penting dalam perhitungan kebutuhan daerah tersebut seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Maka data jumlah penduduk harus sesuai dengan kenyataannya. Untuk mencapai angka yang riil maka seluruh penduduk yang mendiami suatu daerah perlu melakukan pendaftaran pada instansi setempat. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 program pendaftaran penduduk memiliki indikator yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Berikut data capaian program.



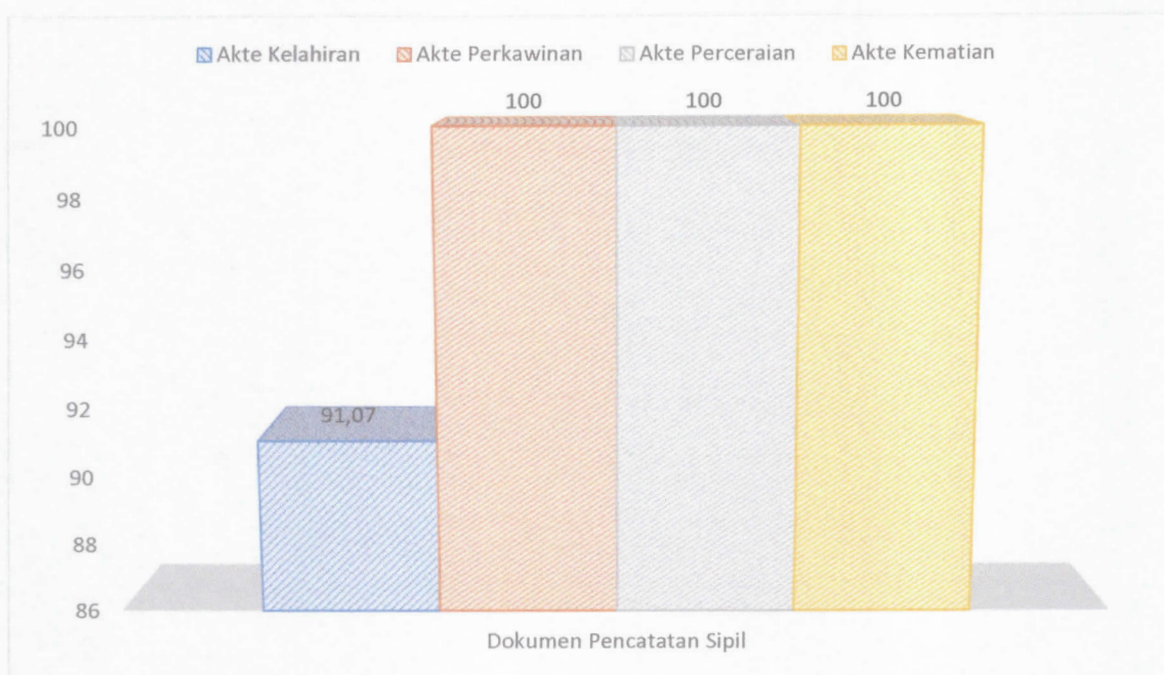
Gambar 39 Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Sumber: RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 persentase kepemilikan administrasi kependudukan sebesar 68%. Kemudian mengalami penurunan pada 2020 menjadi 63,3% dan pada 2021 menjadi 60,10%. Pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 88,60%. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Peningkatan angka kepemilikan dokumen kependudukan yang dapat disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran kependudukan dan upaya stakeholder terkait untuk mengajak masyarakat melakukan pendaftaran. Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan target capaian indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada tahun 2048 sebesar 100%, maka hal tersebut merupakan hal yang menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder terkait baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk dapat mempertahankan angka tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan angka kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bangkalan, seperti meningkatkan akses pada fasilitas kependudukan baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan kependudukan, pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya.

2. Program Pencatatan Sipil

Program kedua yaitu Pencatatan Sipil. Catatan sipil yaitu catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Terdapat 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan penggantian nama. Berikut data capaian program.



Gambar 40 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Sumber: RPD Kab. Bangkalan 2024-2026

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua jenis dokumen pencatatan sipil sebesar 100%. Hanya dokumen akte kelahiran yang pada tahun 2022 belum mencapai 100% hanya mencapai angka 91,07 persen. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan angka kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Bangkalan, seperti meningkatkan akses pada fasilitas pencatatan sipil baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan pencatatan sipil, pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya data dan dokumen kependudukan terus meningkat, maka administrasi kependudukan pada suatu daerah dapat mencapai 100%. Selanjutnya instansi terkait perlu melakukan pengelolaan terhadap informasi kependudukan tersebut. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program pengelolaan informasi administrasi kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Data Kependudukan yang Valid. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa data kependudukan yang valid telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan yang terdaftar di Kabupaten Bangkalan telah valid. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bangkalan telah menyadari bahwa kebenaran administrasi kependudukan merupakan hal penting. Target kinerja dari program ini di tahun 2024-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.

B. Publikasi Informasi Kependudukan

Data kependudukan yang telah diolah oleh pemerintah akan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses dan hak untuk mengetahui informasi kependudukan tersebut. Dengan mengikuti perkembangan zaman, maka publikasi informasi kependudukan tidak hanya berupa dokumen hardcopy namun juga melalui online seperti website pemerintah. Pelayanan publik lain yang harus disediakan pemerintah yaitu penyediaan wadah untuk komunikasi dengan masyarakat mengenai informasi kependudukan. Program mengenai publikasi informasi kependudukan terbagi menjadi 3 program yaitu Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Aplikasi Informatika.

1. Program pengelolaan profil kependudukan

Data profil kependudukan masyarakat perlu dikelola dengan bijak oleh stakeholder terkait. Maka dari itu perlu program yang mengatur mengenai pengelolaan profil kependudukan. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program pengelolaan profil kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan. Data capaian program tersebut dalam RPD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan di Kabupaten Bangkalan telah dimanfaatkan dengan bijak. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah digunakan untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat. Target kinerja dari program ini di tahun 2024- 2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di Kabupaten Bangkalan.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Berjalannya kinerja instansi pemerintah tidak hanya 1 arah, namun juga 2 arah sehingga masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Program Informasi dan Komunikasi Publik dimaksudkan sebagai wadah untuk masyarakat agar mendapat hak dalam memperoleh informasi kependudukan dan mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan kependudukan. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program informasi dan komunikasi publik memiliki indikator yaitu Persentase Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Pemda yang Tertangani. Data capaian program tersebut dalam RPD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Penunjang urusan pemerintahan daerah telah mencapai 96,71% yang memiliki arti bahwa hampir seluruh masyarakat merasa puas terhadap layanan urusan pemerintahan daerah.

3. Program Aplikasi Informatika

Publikasi informasi kependudukan selain melalui dokumen juga perlu melalui online. Selain berisi mengenai publikasi informasi, aplikasi online dapat menjadi fasilitas untuk layanan publik lainnya seperti pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini akan mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor instansi terkait. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program aplikasi informatika memiliki indikator yaitu Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang Terintegrasi. Data capaian program tersebut dalam RPD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih sebesar 35% yang memiliki arti bahwa sepertiga layanan pemerintah dan publik di Kabupaten Bangkalan telah terintegrasi dalam aplikasi/online. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik melalui aplikasi telah dilakukan secara optimal. Diharapkan program ini lebih menyeluruh untuk seluruh layanan dan dapat ditingkatkan lagi di Kabupaten Bangkalan supaya seluruh kebutuhan dan layanan yang diperlukan masyarakat melalui online dapat terintegrasi.

BAB V

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

5.1 Data Dasar Kependudukan Daerah

5.1.1 Data Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kabupaten Bangkalan memiliki persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebesar 49,28 persen dan perempuan 50,72 persen. Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Bangkalan berada pada kelompok umur 20-24 tahun dengan komposisi penduduk jenis kelamin laki-laki sebesar 50.340 jiwa dan perempuan sebesar 47.362 jiwa.

Tabel 42 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	25.550	23.907	49.457
5-9	44.079	41.192	85.271
10-14	46.650	44.675	91.325
15-19	48.161	45.936	94.097
20-24	50.340	47.362	97.702
25-29	46.760	45.401	92.161
30-34	46.013	46.062	92.075
35-39	43.731	44.541	88.272
40-44	37.230	39.391	76.621
45-49	31.684	34.833	66.517
50-54	27.615	32.817	60.432
55-59	24.266	28.288	52.554
60-64	19.526	22.370	41.896
65-69	13.243	14.588	27.831
70-74	7.554	10.296	17.850
75+	23.120	29.439	52.559
Bangkalan	535.522	551.098	1.086.620

Sumber Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2023

5.1.2 Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, menderita penyakit tertentu dan lain-lain. Pelayanan kesehatan yang semakin baik serta kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak menjadi faktor pendukung penurunan angka kematian ibu.

Angka Kematian Ibu yang tercatat di Kabupaten Bangkalan pada lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena keterlambatan diagnosa, keterlambatan merujuk, keterlambatan mendapatkan pelayanan yang adekuat serta karena adanya penyakit penyerta yang memperparah kondisi ibu hamil sampai meninggal. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah untuk mengurangi AKI melalui pengembangan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, rumah bersalin, praktik dokter, apotek, laboratorium, perusahaan farmasi, dan asuransi kesehatan dan pengetahuan ibu tentang kehamilan dan kesehatan ibu dan anak. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan AKI yaitu

pengadaan kelas ibu hamil, mendekatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui bidan desa dan poskesdes serta meningkatkan promosi kesehatan melalui media massa dan media sosial. Pada tahun 2018 sebesar 71,2 kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 106,1.

Tabel 43 Angka Kematian Ibu Bangkalan Tahun 2018-2022

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	2018	2019	2020	2021	2022
	71,2	85,22	81,3	27,15	106,1

Sumber: RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026

5.1.3 Data Kelahiran dan Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian Angka Kematian Bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Idealnya untuk AKB paling banyak adalah 23/1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi yang tercatat di Kabupaten Bangkalan pada lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 sempat mengalami kenaikan yang signifikan, namun sampai dengan tahun 2021 semakin menurun. Ada banyak faktor yang memengaruhi AKB, tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis terampil, serta kesediaan masyarakat untuk mengubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap AKB, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia pernikahan dan kehamilan, ibu hamil dengan komplikasi dan masih berkembangnya mitos-mitos tentang kehamilan di masyarakat.

Angka kematian bayi terus menurun meskipun jumlah kematian bayi sempat bertambah pada tahun 2018 dan 2022. Sementara itu angka kematian ibu sempat mengalami kenaikan drastis di tahun 2022. Tingkatan kabupaten tidak menghitung AKI karena perhitungan AKI adalah per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di Kabupaten Bangkalan rata-rata jumlah kelahiran hidup adalah 15.000. Sedangkan untuk jumlah kematian Ibu di tahun 2021 adalah 42 orang (25 diantaranya disebabkan oleh covid- 19). Sedangkan di tahun 2022 jumlah kematian ibu menurun yaitu sebesar 16 orang.

Tabel 44 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2022

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran	2018	2019	2020	2021	2022
	9,06	7,74	7,19	6,27	9,1

Sumber: RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026

Tabel 45 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan Tahun 2022

NO	Kecamatan	Jumlah kelahiran
1	Bangkalan	1385
2	Socah	854
3	Burneh	907
4	Kamal	765
5	Arosbaya	646
6	Geger	1064
7	Klampus	789
8	Sepulu	617
9	Tanjung Bumi	851
10	Kokop	853
11	Kwanyar	1252
12	Labang	609
13	Tanah Merah	901
14	Tragah	448
15	Blega	858
16	Modung	339
17	Konang	672
18	Galis	1245
Jumlah		15055

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten bangkalan

5.1.4 Migrasi Masuk dan Keluar

Dalam arti luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen (Tjiptoherijanto, 2009). Dalam pengertian yang demikian tersebut tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, serta tidak dibedakan antara migrasi dalam negeri dengan migrasi luar negeri (Lee, 2011). Migrasi penduduk tidak bisa dicegah, bahkan dilarang, karena sama artinya dengan melarang pendatang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di wilayah lain. Oleh karenanya, inklusivitas dalam pembangunan wilayah perlu diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan wilayah untuk semua, termasuk bagi para pendatang.

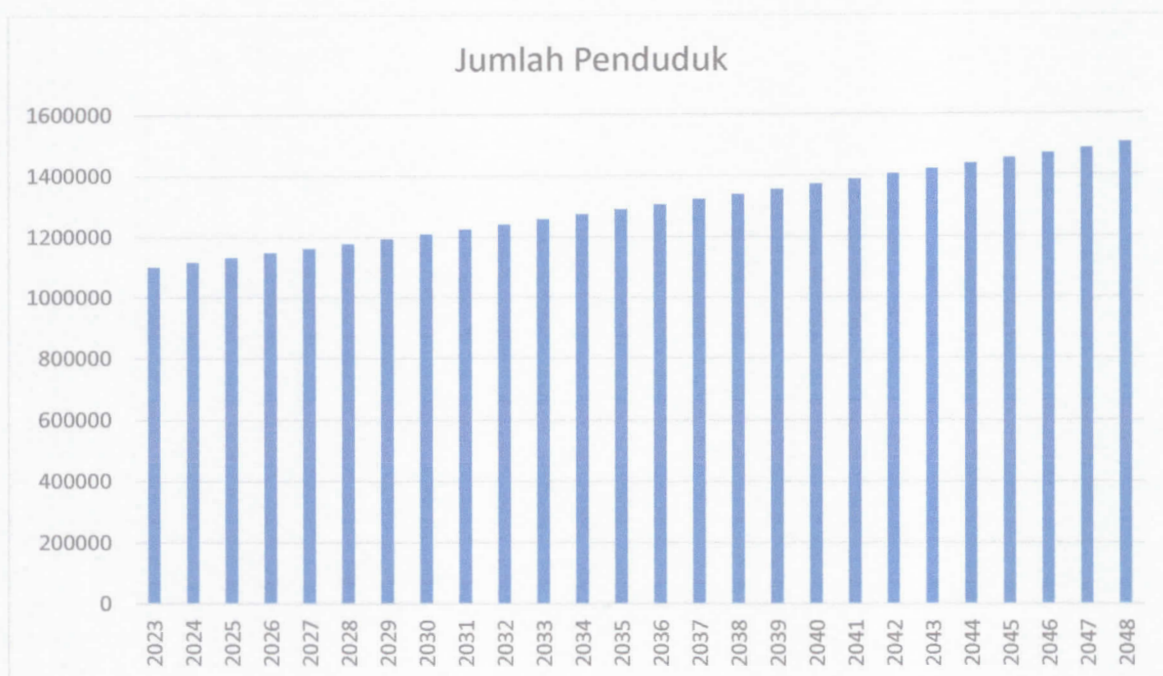
Tabel 46 Migrasi Masuk dan Keluar Kabupaten Bangkalan

Migrasi Masuk Seumur Hidup	Migrasi keluar seumur hidup	Migrasi Masuk Risen	Migrasi Keluar Risen
38.549	237.392	10.173	18.084

Sumber: Statistik Migrasi Provinsi Jawa Timur Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

5.2 Proyeksi Penduduk Ideal

Proyeksi penduduk merupakan suatu cara untuk menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada beberapa asumsi komponen yang bekerja di dalamnya, meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi memegang peranan penting dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan penduduk merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap demand pembangunan, baik infrastruktur, perekonomian, dsb. Proyeksi penduduk di Kabupaten Bangkalan akan dihitung menggunakan rumus proyeksi penduduk eksponensial. Penentuan rumus tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan penduduk yang berlangsung terus menerus akan bertambah sedikit demi sedikit seiring dengan adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu.



Gambar 41 Proyeksi Jumlah Penduduk Ideal

Sumber: Hasil Analisis

5.3 Analisis Kondisi Ideal Kependudukan

5.3.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk. Kuantitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.086.620 jiwa. Berikut merupakan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan untuk 25 tahun mendatang.

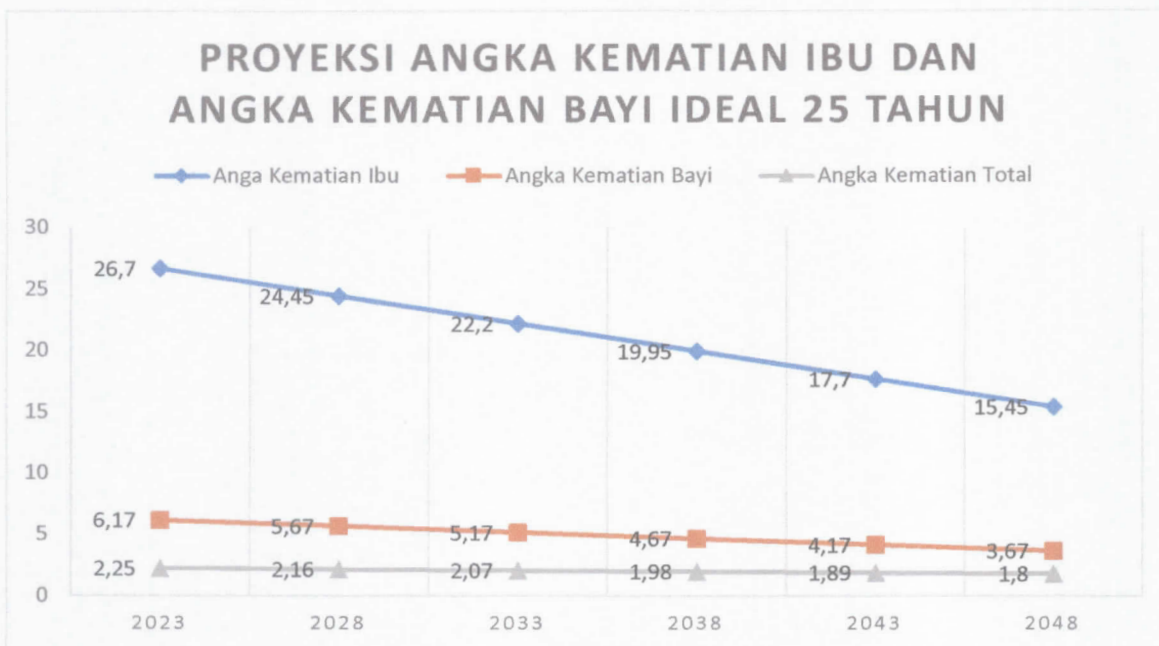


Gambar 42 Jumlah Penduduk Ideal Kabupaten Bangkalan 25 Tahun

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk 25 tahun mendatang pada gambar di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk akan terus meningkat. Hal tersebut tentunya perlu suatu program pengelolaan berupa pengendalian kuantitas penduduk yang dimaksudkan supaya pelayanan

publik lebih optimal dan pembangunan penduduk di suatu wilayah dapat berjalan dengan lebih efektif dan cepat. Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berkualitas (KB). Kuantitas Penduduk perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan dampak buruk yang terjadi dikemudian hari, selain itu kebutuhan dan pelayanan publik dapat terpenuhi dengan optimal. Pengendalian kuantitas penduduk tidak hanya mengenai angka kelahiran namun juga harus memperhitungkan angka kematian yang terjadi pada ibu dan bayi, serta Angka Kematian Total (TFR) di Kabupaten Bangkalan. Berikut merupakan proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan TFR di Kabupaten Bangkalan.



Gambar 43 Proyeksi AKI, AKB, dan TFR Ideal Kabupaten Bangkalan 25 tahun

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan proyeksi pada kedua gambar di atas, dapat dilihat bahwa menggunakan skenario intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, berupa program peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi di Kabupaten Bangkalan. Intervensi program tersebut nyata-nyatanya sangat berpengaruh positif terhadap pengendalian mortalitas di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 hingga 2048. Dengan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pada fasilitas kesehatan, angka kematian ibu dan bayi dapat secara berangsur menurun.

A. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk diperlukan karena peningkatan kuantitas penduduk yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada beberapa aspek kehidupan seperti lingkungan, ekonomi, keamanan, dll. Program ini sesuai dengan yang tercantum pada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dengan indikator program yaitu Persentase Kampung KB Aktif. Tujuan umum Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan keluarga berkualitas. Program Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan kuantitas penduduk. Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berkualitas meliputi:

1. Pendewasaan usia perkawinan;
2. Pengaturan kehamilan yang diinginkan

3. Pembinaan kesertaan keluarga berencana
4. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan
5. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana

Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa Kampung KB Aktif telah mencapai 43% yang memiliki arti bahwa hampir separuh kampung di Kabupaten Bangkalan telah aktif mengikuti program KB. Target kinerja dari program ini di adalah 100% sehingga diharapkan program ini lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di seluruh kampung Kabupaten bangkalan. Disamping itu, penggunaan alat kontrasepsi masih sebesar 45,11%. Dengan data tersebut maka pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama. Pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap fasilitas KB di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan dan memberi sosialisasi pada masyarakat, di sisi lain masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan manfaat dari program KB.

B. Program Pembinaan Keluarga

Salah satu arah kebijakan dari program Keluarga Berkualitas (KB) yaitu Pembinaan Keluarga Berencana. Pada awal pengenalan program pada masyarakat perlu dilakukannya pembinaan supaya dalam prosesnya sesuai dengan yang diharapkan dan program KB berhasil. Hal ini juga penting dilakukan supaya angka presentase akseptor KB dapat meningkat dan mencapai 100%.

Angka Pelayanan KB di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 masih sebesar 79,71%. Sehingga perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB baru di Kabupaten Bangkalan, seperti meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana, mengadakan kegiatan pembinaan untuk keluarga berencana, pemerataan pelayanan pembinaan keluarga berencana, dan sebagainya. Meskipun tidak dapat langsung meningkat menjadi 100% namun dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kondisi ideal cakupan pelayanan KB secara menyeluruh dapat tercapai.

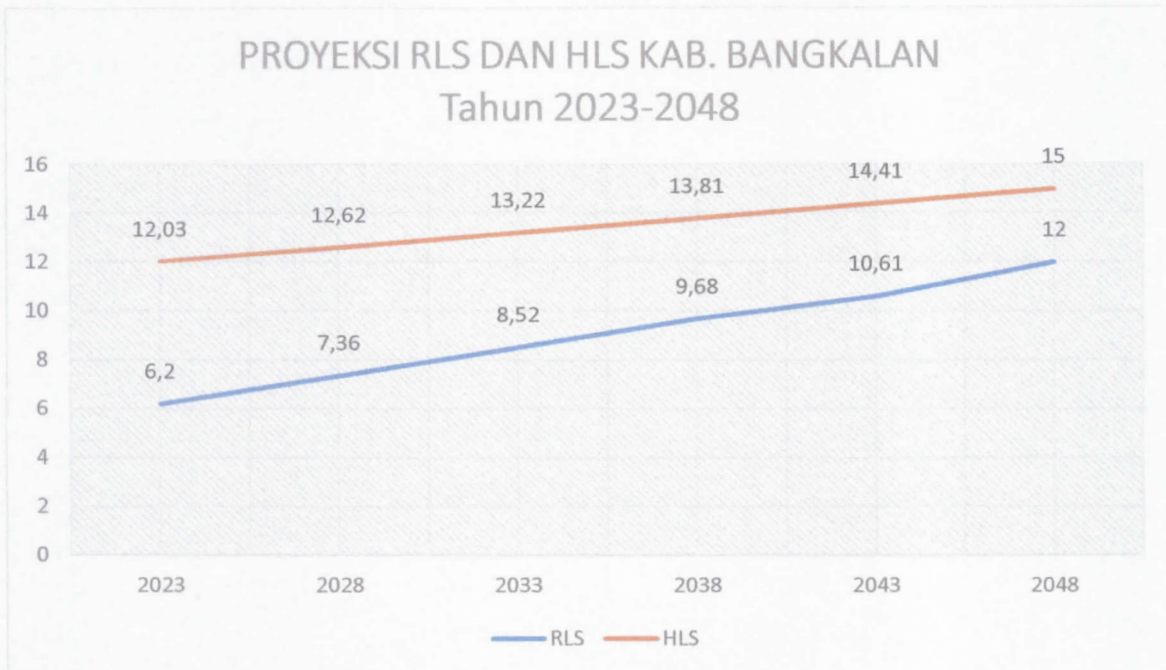
5.3.2 Kualitas Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Indikator utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kualitas penduduk ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

A. Pendidikan

Kondisi yang diharapkan melalui peningkatan kualitas penduduk pada dimensi pendidikan ialah meningkatnya indeks pendidikan di Kabupaten Bangkalan yang masih di bawah rata-rata provinsi maupun nasional, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat dua permasalahan utama pada kondisi pendidikan di Kabupaten Bangkalan ialah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah, yaitu 5,97 tahun yang berarti berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD), serta Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,91 tahun atau berada pada jenjang SMA. Kondisi tersebut dapat terjadi karena rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bangkalan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang

pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Jika suatu daerah apabila memiliki nilai APS semakin tinggi maka hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pula usia sekolah yang bersekolah pada daerah tersebut.



Gambar 44 Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangkalan 25 Tahun
Sumber: Hasil Analisis

Tabel 47 Proyeksi APS SMP, APS SMA, APM SMP, dan APM SMA Kab. Bangkalan 25 Tahun

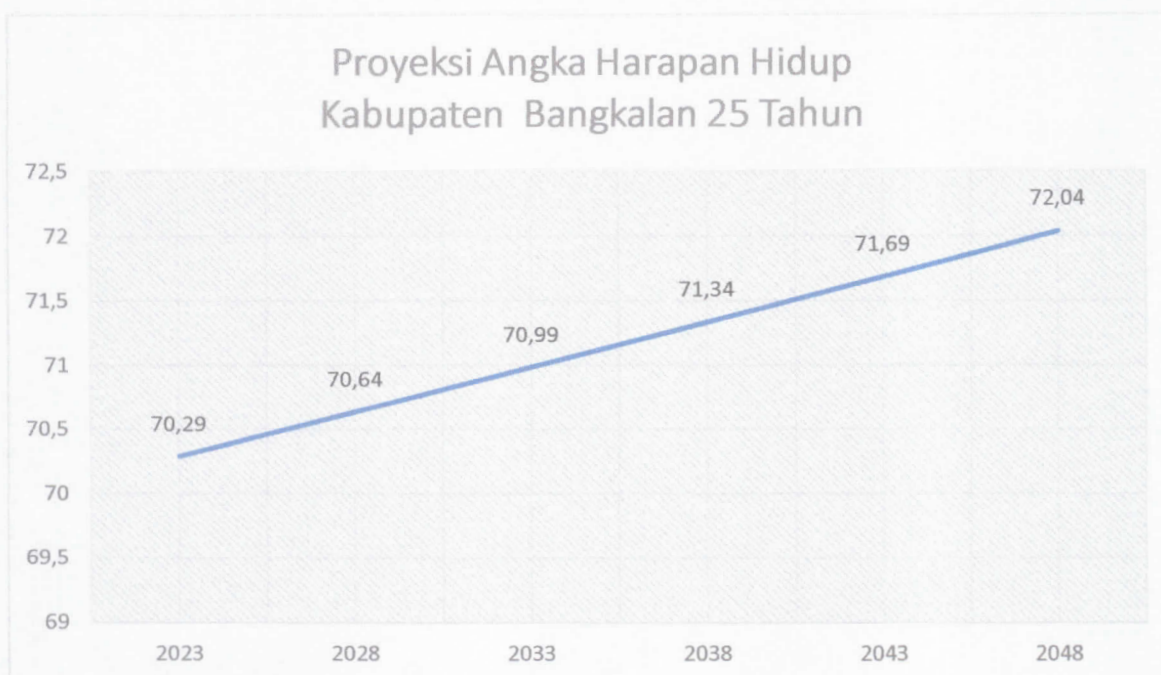
Uraian	2023	2028	2033	2038	2043	2048
APS SMP	94,72	95,82	96,92	98,02	99,12	100
APS SMA	62,08	63,66	65,25	66,83	68,42	70
APM SMP	80,32	82,32	84,32	86,32	88,32	90,32
SPM SMA	41,92	44,57	47,22	49,87	51,51	55,17

Sumber: Hasil Analisis

Peningkatan rata-rata lama sekolah dan partisipasi sekolah diharapkan dapat terjadi seiring dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang perlu terus ditingkatkan dari sisi jumlah, kualitas, dan pemerataannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu melakukan beberapa upaya untuk mendorong kenaikan dua indikator tersebut, hingga dapat mencapai target di atas rata-rata provinsi dan nasional pada 5 tahun hingga 25 tahun mendatang.

B. Kesehatan

Kondisi yang diharapkan melalui peningkatan kualitas penduduk pada dimensi kesehatan ialah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik pada sarana dan prasarananya, maupun pada tenaga kesehatannya yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar. Peningkatan akses masyarakat selanjutnya akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan AHH menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. AHH merupakan standar suatu daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.



Gambar 45 Proyeksi Angka Harapan Hidup Kab. Bangkalan 25 Tahun

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan dapat ditingkatkan melalui beberapa upaya, seperti:

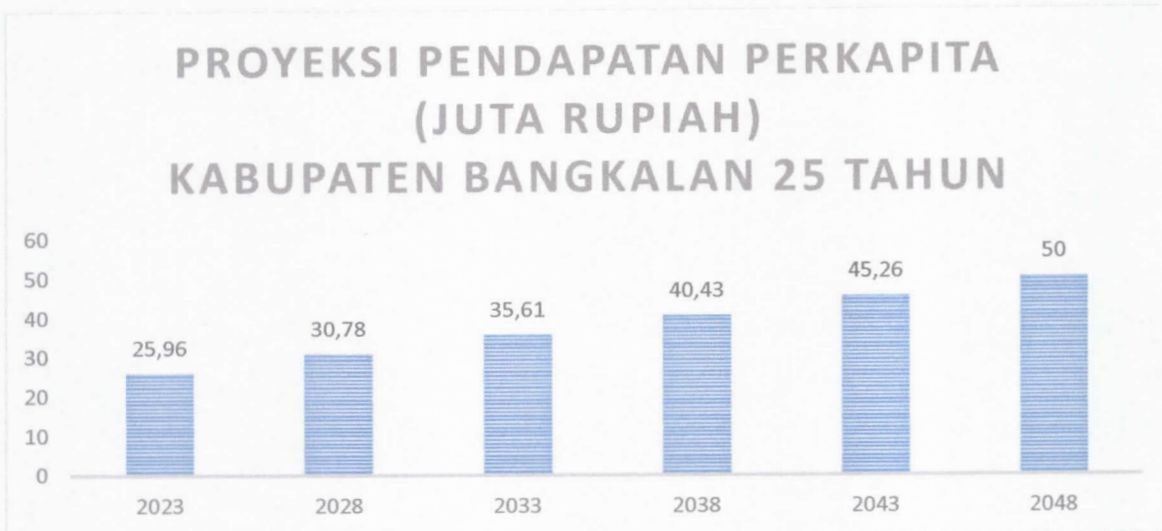
1. Peningkatan akses ke fasilitas kesehatan
2. Penyediaan sarana kesehatan sesuai dengan standar
3. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kesehatan
4. Peningkatan kemudahan pembiayaan fasilitas kesehatan melalui pemanfaatan asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah
5. Pendampingan dan pembinaan untuk pengendalian penyakit dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai gizi
6. Peningkatan layanan kesehatan untuk penduduk lanjut usia

Program-program peningkatan kualitas dan pelayanan fasilitas kesehatan diproyeksikan dapat meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan hingga 2 tahun. Kondisi tersebut dapat terjadi seiring dengan semakin baiknya derajat kesehatan suatu masyarakat.

C. Standar Hidup layak

Kondisi yang diharapkan dari peningkatan kualitas penduduk pada dimensi standar hidup layak terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat ialah meningkatnya daya beli masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan pendapatan perkapita, dan penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, penyediaan program pelatihan tenaga kerja, peningkatan hubungan kerjasama, dan beberapa upaya guna mendorong terciptanya kesempatan kerja. Adapun permasalahan mengenai tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan ialah masih kurangnya sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan, rendahnya kualitas kompetensi dan daya saing pencari kerja, rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha karena keterbatasan modal, serta rendahnya kualitas lembaga pelatihan kerja. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui pengoptimalan beberapa peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan, seperti kerjasama dengan lembaga swasta dan bursa kerja untuk melaksanakan pelatihan dan perekrutan tenaga

kerja, maupun mengembangkan potensi daerah, seperti pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja baru.



Gambar 46 Proyeksi Pendapatan Perkapita Kabupaten Bangkalan 25 tahun

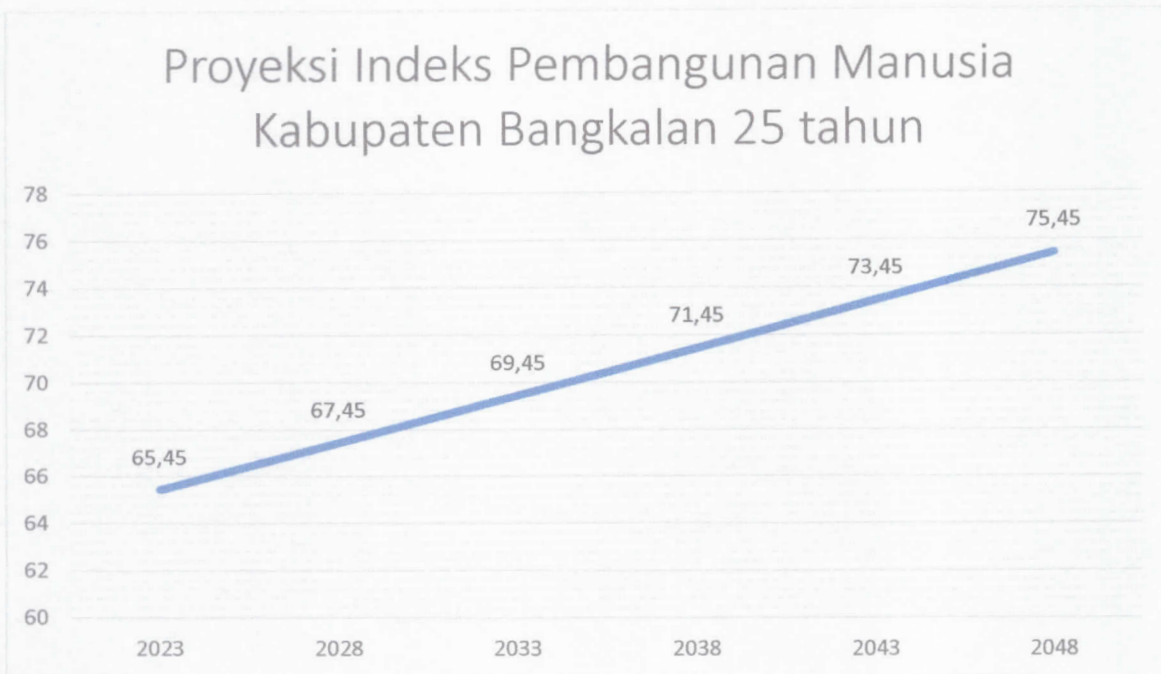
Sumber: Hasil Analisis

Tabel 48 Proyeksi Gini Ratio, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan 25 tahun

Uraian	2023	2028	2033	2038	2043	2048
Gini ratio	0,305	0,300	0,295	0,290	0,285	0,280
Tingkat Pengangguran	8,03	7,92	7,82	7,71	7,61	7,5
Tingkat Kemiskinan	19,27	18,42	17,57	16,72	15,87	15,02
TPAK	71,99	74,49	76,99	79,49	81,99	84,49

Sumber: Hasil Analisis

Penurunan tingkat pengangguran secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, terutama pada penduduk miskin. Berdasarkan hasil proyeksi, diketahui bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan akan mengalami penurunan hingga 2,5% pada tahun 2048 seiring dengan semakin banyaknya kesempatan bekerja di Kabupaten Bangkalan dan menurunnya tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran juga akan berdampak terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dan peningkatan pendapatan perkapita di Bangkalan.



Gambar 47 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan 25 Tahun

Sumber: Hasil Analisis

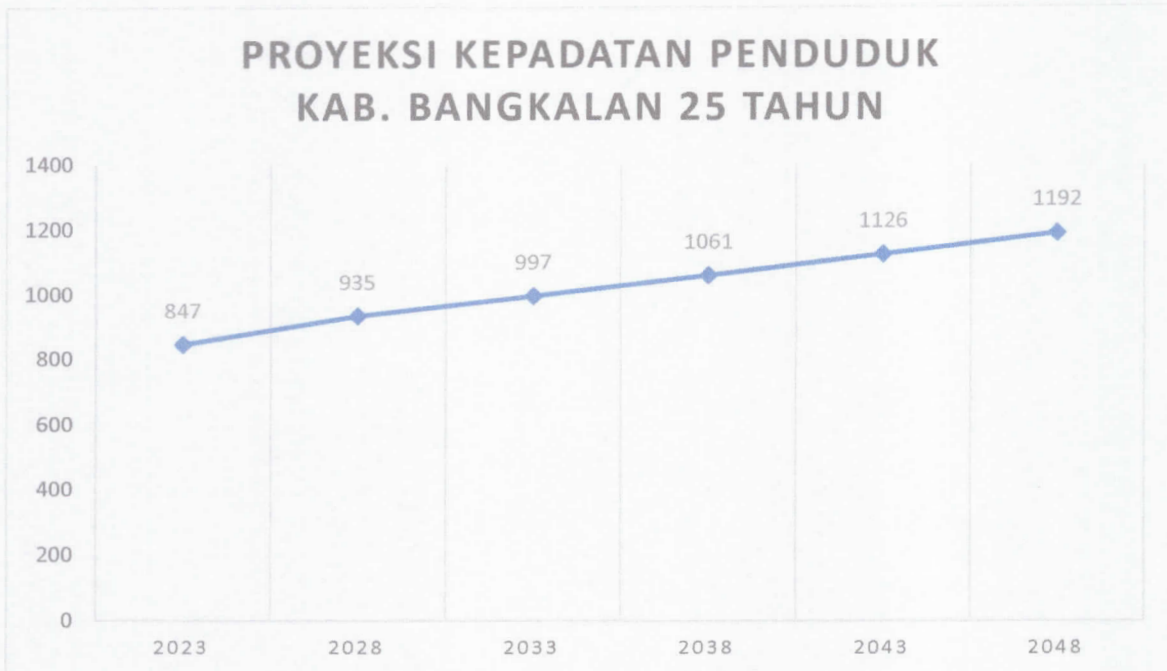
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Berdasarkan hasil proyeksi pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa melalui upaya peningkatan kualitas penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, diharapkan dapat meningkatkan nilai IPM hingga mencapai 75,45 pada tahun 2048. Nilai tersebut tergolong dalam kategori IPM sedang, sehingga melalui peningkatan IPM yang terjadi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Selain melalui peningkatan ketiga dimensi pembentuk IPM (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak), peningkatan IPM juga dapat didukung oleh kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pembangunan wilayah.

5.3.3 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Keputusan Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyatakan bahwa kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang seimbang dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya, tentunya menghendaki penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi yang diinginkan ini dapat terwujudkan kawasan-kawasan permukiman sebagai embrio dari wilayah perkotaan (kota-kota kecil) baru. Kawasan permukiman tersebut dapat diwujudkan dalam bermacam-macam skema pembangunan sebagaimana yang diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, membangun keterkaitan desa kota mewujudkan pusat pertumbuhan baru yang bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi.

Sedangkan berdasarkan aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih seimbang antar wilayah di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut bertujuan agar konsentrasi penduduk tidak semakin besar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang memang sudah padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya. Akan tetapi perlu disadari

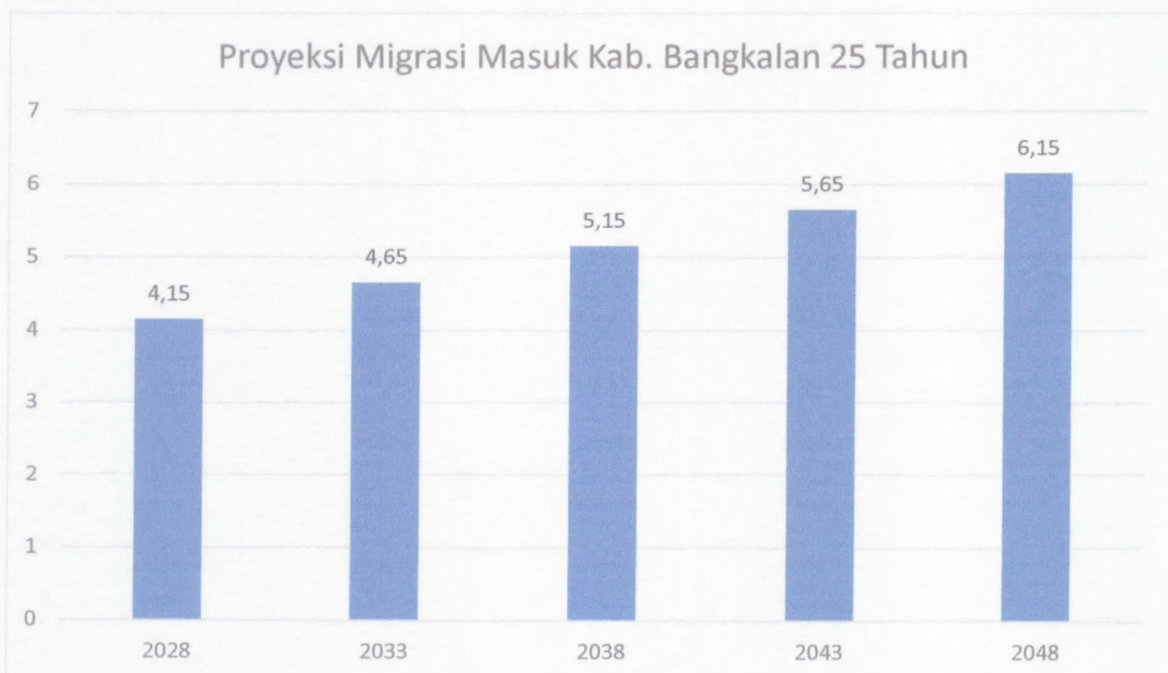
bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah dengan kategori urban sudah semakin banyak karena fasilitas dan hasil pembangunan yang merata.



Gambar 48 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan 25 Tahun

Sumber: Hasil Analisis

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, tentunya kepadatan penduduk di Bangkalan akan terus meningkat hingga 25 tahun mendatang. Pada 2048 diproyeksikan menjadi 1192 jiwa/km². Disisi lain, migrasi masuk diharapkan terus meningkatkan sebagai upaya dalam mendorong peningkatan perputaran ekonomi di daerah. Sedangkan migrasi keluar terus ditekan dengan perbaikan ekonomi di daerah.



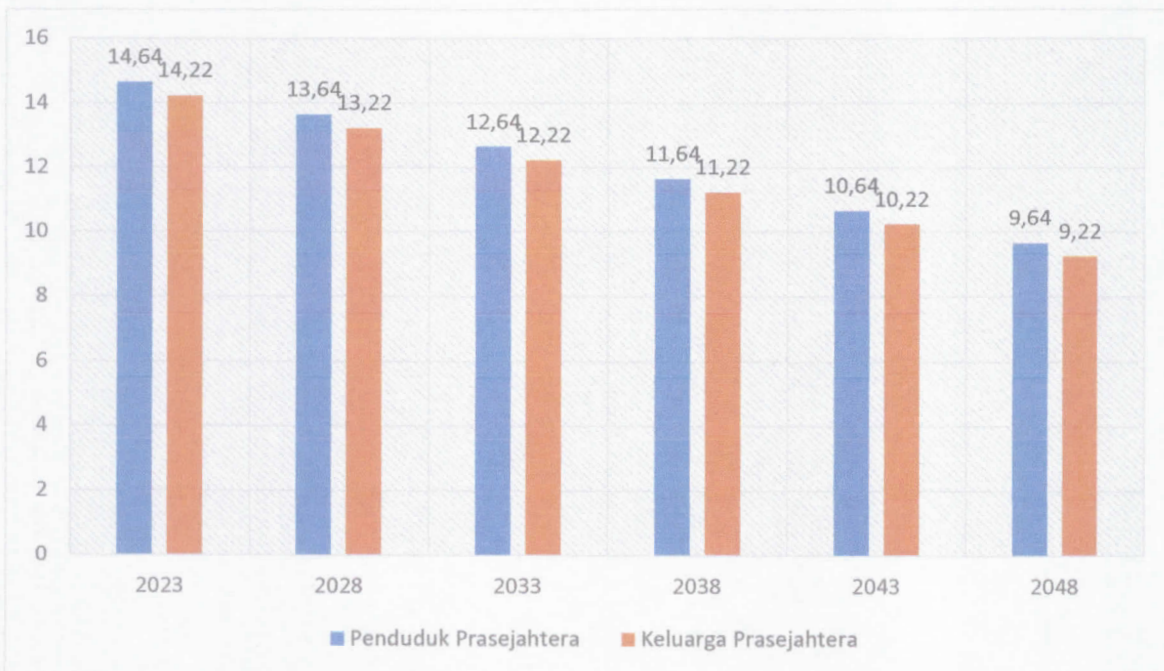
Gambar 49 Proyeksi Migrasi Masuk Kabupaten Bangkalan 25 Tahun

Sumber: Hasil Analisis

5.3.4 Pembangunan Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu Pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam

masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan keluarga ini diukur dengan presentase penduduk dan keluarga prasejahter, dan juga indeks pembangunan gender.



Gambar 50 Proyeksi Penduduk Prasejahtera dan Keluarga Prasejahtera Kabupaten Bangkalan 25 Tahun

Sumber: hasil Analisis



Gambar 51 Proyeksi Indeks Pembangunan Gender Kab. Bangkalan 25 Tahun

Sumber: hasil Analisis

5.3.5 Administrasi Kependudukan

Pilar ke lima yaitu database kependudukan, memiliki tujuan utama terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat

ketepatan sasaran pembangunan. Database kependudukan yang terintegrasi juga akan mempermudah jalannya pelayanan publik mengenai kependudukan. Sayangnya saat ini pelayanan publik belum terintegrasi dan masih terpisah antar badan/lembaga pemerintahan yang menyebabkan kinerja program terhambat. Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan dalam database kependudukan meliputi:

1. Penataan dan pengelolaan database kependudukan
2. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan
3. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa
4. Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

Berikut merupakan penjelasan dari tiap program pada pilar ini yang disertai capaian dan target kinerja program serta bagaimana kondisi ideal yang diharapkan. Penjelasan akan dibedakan dalam 2 aspek yaitu yang pertama mengenai administrasi kependudukan dan yang kedua membahas mengenai publikasi informasi kependudukan.

A. Administrasi Kependudukan

Aspek pertama dalam pilar database kependudukan yaitu administrasi kependudukan. Pada aspek ini akan dibahas mengenai pendataan penduduk. Terdapat 3 program yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Program Pendaftaran Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah sangat penting dalam perhitungan kebutuhan daerah tersebut seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan selain itu data jumlah penduduk akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Maka data jumlah penduduk harus sesuai dengan kenyataannya. Untuk mencapai angka yang riil maka seluruh penduduk yang mendiami suatu daerah perlu melakukan pendaftaran pada instansi setempat. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program pendaftaran penduduk memiliki indikator yaitu Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Berikut data capaian program.

Tabel 49 Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	2019	2020	2021	2022
	68%	63,30%	60,10%	88,60%

Sumber: RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021 persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan terus mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 88,60 persen. Hal ini menjadi tanggungjawab seluruh stakeholder terkait baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk dapat terus meningkatkan angka tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten bangkalan, seperti meningkatkan akses pada fasilitas kependudukan baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan kependudukan, pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya. Jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik maka kepemilikan dokumen kependudukan akan mencapai kondisi ideal pada 5-25 tahun mendatang.

2. Program Pencatatan Sipil

Catatan sipil yaitu catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Terdapat 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan penggantian nama. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program pencatatan sipil memiliki indikator yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil. Berikut data capaian program.

Tabel 50 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Akte Kelahiran	Akte Perkawinan	Akte Perceraian	Akte Kematian
91,07%	100%	100%	100%

Sumber: RPD Kabupaten Bangkalan 2024-2026

Berdasarkan data tersebut, bahwasanya dari keempat dokumen pencatatan sipil, hanya akte kelahiran yang belum mencapai 100% pada tahun 2022. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan angka kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Bangkalan, seperti meningkatkan akses pada fasilitas pencatatan sipil baik online ataupun offline, menyediakan prasarana/ruang pendukung pelayanan pencatatan sipil, pemerataan pelayanan di seluruh wilayah terutama desa, dan sebagainya.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten bangkalan diberikan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan ini adalah adanya peningkatan kompetensi dan kinerja dari petugas pelayanan. Peningkatan kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ini juga menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan telah meningkat.



Gambar 52 Proyeksi Capaian Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan proyeksi diatas, diharapkan pada tahun 2048 kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat sudah mencapai 100 persen. Target capaian program ini juga didukung dengan peningkatan kualitas dan pelayanan kepengurusan administrasi yang memperhatikan juga Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya data dan dokumen kependudukan terus meningkat, maka administrasi kependudukan pada suatu daerah dapat mencapai 100%. Selanjutnya instansi terkait perlu melakukan pengelolaan terhadap informasi kependudukan tersebut. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program pengelolaan informasi administrasi kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Data Kependudukan yang Valid. Data capaian program tersebut dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa data kependudukan yang valid telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan yang terdaftar di Kabupaten Bangkalan telah valid. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bangkalan telah menyadari bahwa kebenaran administrasi kependudukan merupakan hal penting. Peningkatan kinerja urusan administrasi kependudukan menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan telah meningkat.

B. Publikasi Informasi Kependudukan

Data kependudukan yang telah diolah oleh pemerintah akan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses dan hak untuk mengetahui informasi kependudukan tersebut. Dengan mengikuti perkembangan zaman, maka publikasi informasi kependudukan tidak hanya berupa dokumen hardcopy namun juga melalui online seperti website pemerintah yang disebut e-government. Pelayanan publik lain yang harus disediakan pemerintah yaitu penyediaan wadah untuk komunikasi dengan masyarakat mengenai informasi kependudukan. Program mengenai publikasi informasi kependudukan terbagi menjadi 3 program yaitu Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Aplikasi Informatika.

1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Data profil kependudukan masyarakat perlu dikelola dengan bijak oleh stakeholder terkait. Maka dari itu perlu program yang mengatur mengenai pengelolaan profil kependudukan. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program pengelolaan profil kependudukan memiliki indikator yaitu Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan dimaksudkan untuk keperluan pemerintah dalam menyusun kebijakan agar sesuai dengan kondisi eksisting penduduknya. Data capaian program tersebut dalam RPD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa seluruh data kependudukan di Kabupaten Bangkalan telah dimanfaatkan dengan bijak. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pemanfaatan data kependudukan telah digunakan untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat. Target kinerja dari program ini di tahun 2024-2026 juga 100% sehingga diharapkan program ini dapat mencapai kondisi ideal pada 5-25 tahun kedepan dengan lebih menyeluruh dan dapat dipertahankan di Kabupaten Bangkalan.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Berjalannya kinerja instansi pemerintah tidak hanya 1 arah, namun juga 2 arah sehingga masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Program Informasi dan Komunikasi Publik dimaksudkan sebagai wadah untuk masyarakat agar mendapat hak dalam memperoleh informasi kependudukan dan mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan kependudukan. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif

terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Program Aplikasi Informatika

Publikasi informasi kependudukan selain melalui dokumen juga perlu melalui online. Selain berisi mengenai publikasi informasi, aplikasi online dapat menjadi fasilitas untuk layanan publik lainnya seperti pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini akan mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor instansi terkait. Di era keterbukaan tata kelola pemerintahan saat ini tidak hanya good governance yang ingin diwujudkan namun smart governance, maka dibutuhkan dukungan teknologi dan informasi beserta kecepatannya. Disrupsi teknologi dan digitalisasi data dalam tata kelola pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan. Namun sampai saat ini penerapan e-government di Kabupaten Bangkalan belum optimal mengakibatkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal. Salah satu faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan e-government di Kabupaten Bangkalan adalah belum terintegrasinya aplikasi e-government. Aplikasiaplikasi tersebut masih parsial di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 program aplikasi informatika memiliki indikator yaitu Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi. Data capaian program tersebut dalam RPD Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa aplikasi layanan pemerintah dan publik yang terintegrasi telah mencapai 35%% yang memiliki arti bahwa masih sepertiga dari seluruh layanan pemerintah dan publik yang sudah terdigitalisasi.

BAB VI

VISI MISI, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

6.1 Isu Strategis Kependudukan 25 tahun

Isu strategis memuat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten bangkalan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kependudukan di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 51 Isu Strategis Kependudukan Kabupaten Bangkalan

PILAR KEPENDUDUKAN	ISU STRATEGIS
Kuantitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stunting pada anak 2. Gizi Buruk pada anak 3. Angka kementian Ibu dan Bayi yang belum rendah 4. Peningkatan angka kelahiran 5. Keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai standar 6. Tingginya unmeet need 7. Tingginya pernikahan dibawah umur 8. Rendahnya peserta KB aktif
Kualitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah tenaga kependidikan yang sesuai standar 2. Rendahnya fasilitas pendidikan yang standar 3. Rendahnya rata-rata lama sekolah 4. Rendahnya indeks pembangunan manusia 5. Fenomena putus sekolah 6. Keterbatasan saran dan tenaga kesehatan yang standar 7. Tingginya angka kemiskinan 8. Tingginya angka pengangguran
Persebaran dan Mobilitas Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya jumlah lapangan kerja 2. Minimnya program padat karya 3. Pemerataan pembangunan yang masih rendah 4. Tingginya jumlah migrasi keluar/merantau 5. Fenomena PMI non prosedural 6. Kenyamanan tempat tinggal 7. Rendahnya kemauan/motivasi berwiraswasta 8. Tingginya pengangguran
Pembangunan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya pernikahan dini 2. Pola pengasuhan anak dari ibu 3. Tingginya keluarga prasejahter 4. Rendahnya rumah tangga mandiri ekonomi 5. Pemberdayaan masyarakat rentan masih rendah 6. Rendahnya biaya bantuan sosial

Data dan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian masyarakat terhadap registrasi penduduk rendah 2. Keterlambatan pendaftaran dan pelaporan anak 3. Sinkronisasi data kependudukan dantar OPD 4. Ketersediaan data kependudukan 5. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan 6. Keterbatasan sarana infoormasi dan komunikasi yang terintegrasi
---	---

6.2 Visi Misi Pembangunan Kependudukan 25 tahun

Dalam penyusunannya, RPD Tahun 2024-2026 telah menyesuaikan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dengan visi “Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, Dan Jasa Yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani”. Berdasarkan RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 maka dirumuskan visi GDPK Kabupaten Bangkalan adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Madani”. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 3 misi yang terdiri dari:

1. Mewujudkan kuantitas penduduk yang terkendali
2. Mewujudkan penduduk yang berkualitas dan sejahtera
3. Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi

6.3 Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kependudukan 25 tahun

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi, maka disusun strategi dan arah kebijakan kependudukan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan cakupan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kualitas tenaga kerja
2. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berkualitas.
3. Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengaturan fertilitas, penurunan mortalitas dan pengarahannya mobilitas penduduk
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk mengendalikan persebaran dan mobilitas penduduk.
5. Mengoptimalkan pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan melalui sistem data kependudukan yang terintegrasi

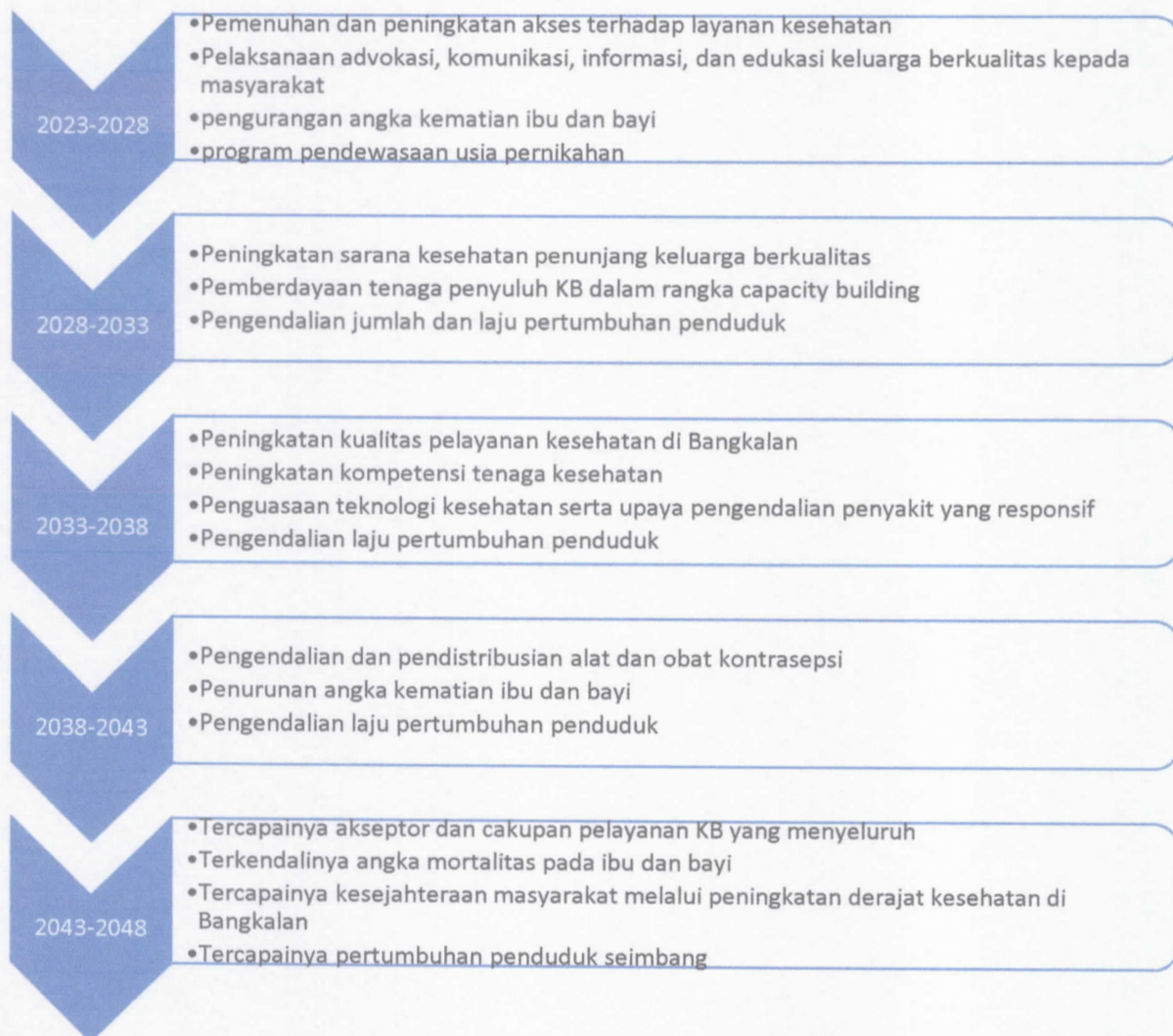
BAB VII

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

7.1 Penetapan Target 25 Tahun

7.1.1 Kuantitas Penduduk

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Bangkalan mencakup waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2048 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk tersebut dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan awal dapat berjalan dengan sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode. Roadmap pengendalian kuantitas penduduk mengacu pada data kependudukan dan analisis yang telah dilakukan dengan data tersebut. Pada roadmap pengendalian kuantitas penduduk sasaran yang dijadikan target meliputi pengendalian jumlah penduduk berupa pengurangan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Berikut merupakan roadmap pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Bangkalan.



Gambar 53 Roadmap Pengendalian Penduduk Bangkalan 2023-2048

7.1.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan salah satu pilar dalam lima pilar pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan program pembangunan kependudukan. Berdasarkan dokumen Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, disebutkan bahwa peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting yang dibentuk oleh tiga dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) dan berfungsi untuk mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tiga dimensi tersebut menjadi landasan dalam penentuan target pada 25 tahun mendatang.

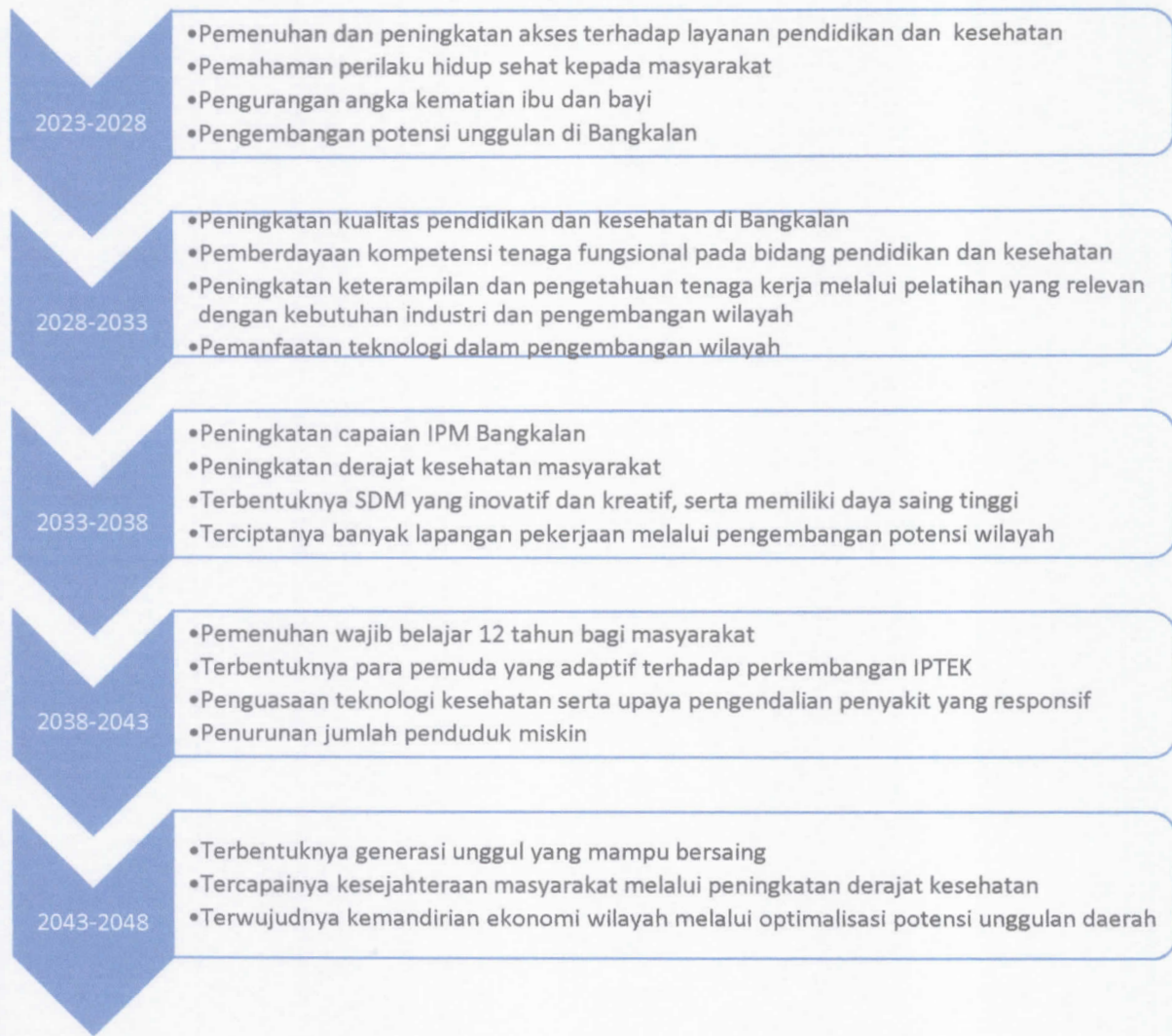
Pada tahun 2045 mendatang, Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah upaya dalam membangun generasi emas sebagai penerus bangsa Indonesia pada 100 tahun emas Indonesia merdeka. Penyusunan visi tersebut juga dilakukan dalam rangka mewujudkan “Impian Indonesia 2015-2085” yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari empat pilar utama, yaitu:

1. Pembangunan Manusia Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemanjangan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Melalui keempat pilar tersebut, diharapkan pada tahun 2045, Indonesia telah mencapai beberapa target, yaitu:

1. Manusia Indonesia yang Unggul, Berbudaya, serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan
3. Pembangunan yang Merata dan Inklusif
4. Negara yang Demokratis, Kuat, dan Bersih

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan target 25 tahun mendatang pada pengembangan kualitas kependudukan di Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan mengacu kepada visi Indonesia Emas 2045 dan fokus pada penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pada pengembangan kependudukan pilar kualitas penduduk, target 25 tahun mendatang difokuskan kepada tiga dimensi pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berikut merupakan roadmap pengembangan kualitas kependudukan di Kabupaten Bangkalan:



Gambar 54 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bangkalan 2023-2048

7.1.3 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan determinan penting dalam kerangka pengendalian penduduk. Persebaran dan mobilitas penduduk sangat berkaitan dengan aktivitas pembangunan suatu daerah. Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi antar kawasan dan daerah menjadi alasan utama bagi seseorang untuk melakukan perpindahan atau migrasi. Saat ini, Bangkalan masih memiliki disparitas pembangunan wilayah yang relatif kurang baik. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah migrasi penduduk yang dapat mempengaruhi keseimbangan penduduk di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui upaya pemerataan pembangunan, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, intervensi penguatan ekonomi masyarakat, dan penyediaan pelayanan sosial. Adapun roadmap pengendalian penduduk melalui pengarahannya persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Bangkalan 25 tahun mendatang sebagai berikut:

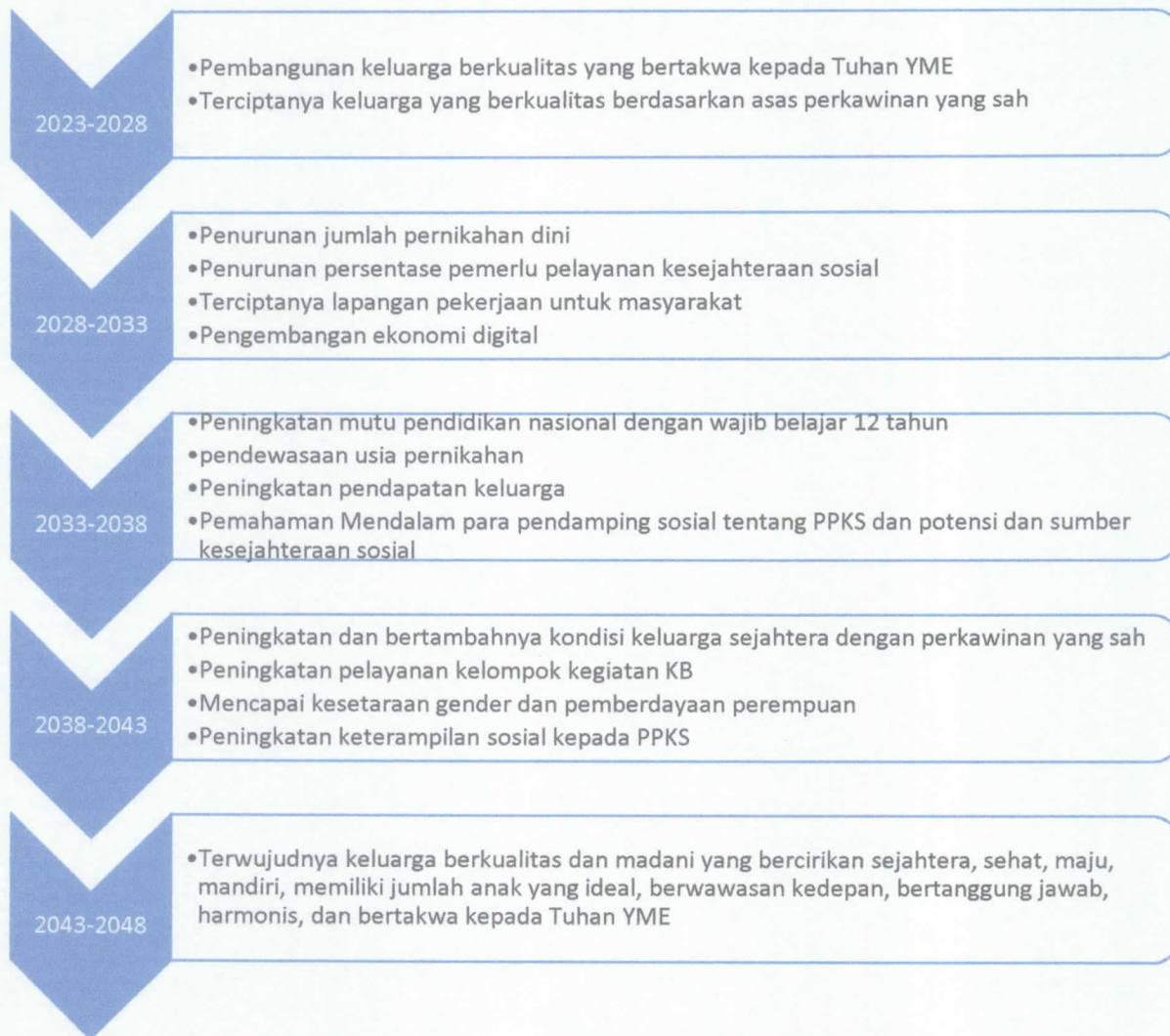


Gambar 55 Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk Bangkalan 2023-2048

7.1.4 Pembangunan Keluarga

Salah satu misi pembangunan kependudukan 25 tahun Kabupaten Bangkalan ialah mewujudkan penduduk yang berkualitas dengan meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan ketahanan keluarga dan diwujudkan melalui strategi ke-2, yaitu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga yang berkualitas. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak-anak untuk belajar tentang kehidupan, sehingga keluarga bertanggung jawab atas terbentuknya perilaku dan karakter anak. Dengan demikian, keluarga yang kuat dan berkarakter menjadi pondasi yang baik bagi perkembangan generasi muda.

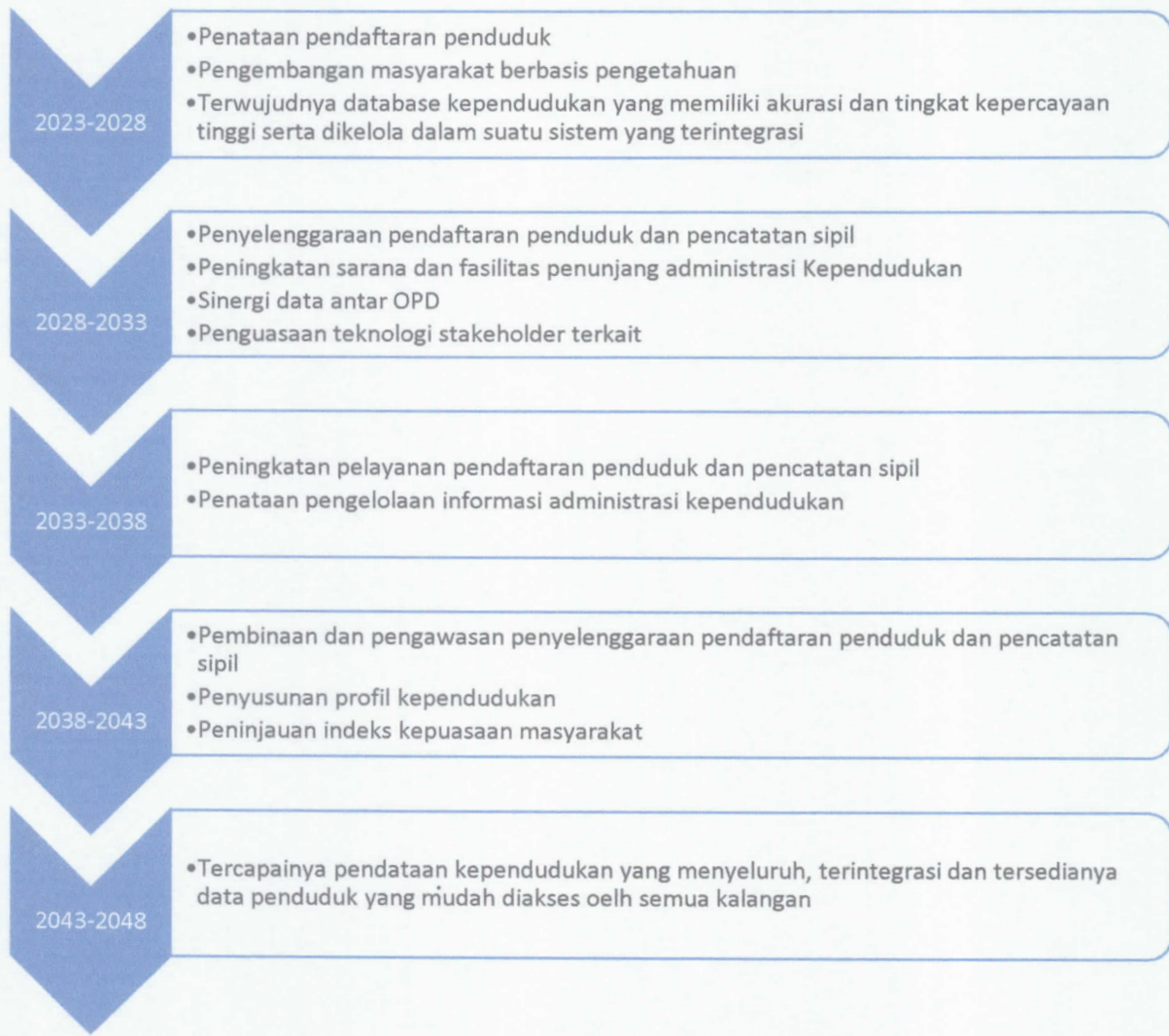
Di sisi lain, ketahanan keluarga dalam mengelola sumber daya fisik dan non fisik guna memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dsb) juga menjadi pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan roadmap pembangunan keluarga akan mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun Kabupaten Bangkalan, serta mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Roadmap pembangunan keluarga akan terbagi menjadi beberapa tahap dengan interval perencanaan 5 tahun. Berikut merupakan roadmap pembangunan keluarga di Kabupaten Bangkalan:



Gambar 56 Roadmap Pembangunan Keluarga Bangkalan 2023-2048

7.1.5 Administrasi Kependudukan

Roadmap Pengembangan Data dan Adminitrasi Kependudukan akan terbagi menjadi 5 periode dalam 25 tahun yaitu tahun 2022-2047. Setiap periode merupakan tahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan adminitrasi kependudukan. Kondisi yang diinginkan pada pembangunan administrasi kependudukan adalah terwujudnya database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu system yang terintegrasi, mudah diakses oleh seluruh stakeholders terkait maupun masyarakat, serta menjadi bagian dari sistem pendukung keputusan (Decision Support System). Berikut merupakan roadmap pengembangan data dan administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan.



Gambar 57 Roadmap Pengembangan Administrasi Kependudukan Bangkalan 2023-2048

7.2 Program Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

Tabel 52 Program-program dan target capaian Pembangunan Kependudukan 5 Pilar

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
A	KUANTITAS PENDUDUK							
1	Program Pengendalian Penduduk	Presentase Kampung KB	43%	58%	73%	88%	100%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan
		Presentase Cakupan Pelayanan KB	82%	84%	86%	88%	90%	
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	24,45	22,2	19,95	17,7	15,45	
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	5,67	5,17	4,67	4,17	3,67	
		Age Specific Fertility Rate (ASFR) umur 15-19 tahun	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	
		Prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	59,1%	60%	61%	62%	63%	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23	25	25	25	25	
		Metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup (MKJP)	30%	35%	40%	45%	50%	
2	Program Pengendalian Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,33	1,28	1,23	1,18	1,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Total Fertility rate	2,01	1,92	1,83	1,74	1,65	
3	Program Pendewasaan Usia Pernikahan	Program Generasi Berencana	25-30	35	40	45	50	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
		(Genre) per 1000 kelahiran						Perempuan dan Perlindungan Anak
B	KUALITAS PENDUDUK							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	95,82	96,92	98,02	99,12	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA	63,66	65,25	66,83	68,42	70	
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	82,32	84,32	86,32	88,32	90,32	
		Angka Partisipasi Murni SMA/MA	44,57	47,22	49,87	52,52	55,17	
2	Program Sosialisasi Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	7,36	8,52	9,68	10,84	12	
		Harapan Lama Sekolah	12,62	13,22	13,81	14,41	15	
3	Program peningkatan kualitas sarana pendidikan	Persentase jumlah sarana pendidikan yang sesuai dengan standar	14,7 %	26,82%	48,28%	60,62%	88,4%	
4	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	Persentase Jumlah Tenaga Pendidik yang Telah Memenuhi Sertifikasi	19,15%	26,31%	35,77%	42,27%	52,03%	
5	Program pemenuhan akses layanan kesehatan	Persentase jumlah sarana kesehatan yang telah memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
6	Program penyediaan alat kesehatan sesuai dengan standar	Persentase ketersediaan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	70%	75%	80%	85%	90%	
7	Program peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	70%	75%	80%	85%	90%	
8	Program sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase tumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	50%	55%	60%	65%	70%	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
9	Program pendampingan dan pembinaan kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	26,4%	21%	16%	11%	6%	
10	Program jaminan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	94%	96%	98%	100%	100%	
11	Program penguatan sektor padat karya dan bernilai tambah	Persentase penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor padat karya dan bernilai tambah	40%	50%	60%	70%	80%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
12	Program pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi dengan kebutuhan industri dan potensi daerah	Tingkat produktivitas tenaga kerja	80%	85%	90%	95%	100%	
11	Program penguatan ekosistem digital pada sektor ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi digital	5%	7,5%	10%	12,5%	15%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5	Program Pendampingan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Gizi Buruk	0,65	0,55	0,45	0,35	0,25	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan
		Persentase Stunting Anak	11,86	10,86	9,86	8,86	7,86	
		Persentase Pemberian ASI Eksklusif	37,8	42,8	47,8	52,8	57,8	
4	Standar Hidup Layak	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	30,78	35,605	40,43	45,255	50,08	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas
		Gini Ratio	0,3	0,295	0,29	0,285	0,28	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
		Tingkat Pengangguran	7,924	7,819	7,714	7,609	7,504	Sosial
		Tingkat Kemiskinan	18,42	17,57	16,72	15,87	15,02	
		Dependency Ratio	44,71	47,21	49,71	52,21	54,71	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49	76,99	79,49	81,99	84,49	
5	Program Peningkatan Kualitas penduduk	Indeks Pembangunan Manusia	67,45	69,45	71,45	73,45	75,45	
C	PERSEBARAN & MOBILITAS PENDUDUK							
1	Persebaran Penduduk	Kepadatan Penduduk	935	997	1061	1126	1192	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Mobilitas Penduduk	Migrasi Masuk Seumur Hidup	4,15	4,65	5,15	5,65	6,15	
3	Program pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Sarana Dan Prasarana Air Minum Yang Dibangun	62%	67%	72%	77%	82%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun	32%	37%	42%	47%	52%	
		Persentase Ruas Jalan Kabupaten Yang Baik	71%	76%	81%	86%	91%	
		Persentase Kawasan Permukiman Yang Ditangani	64,2%	69%	74%	79%	84%	
4	Program Penguatan Keterampilan dan daya saing SDM	Tingkat pengangguran terbuka	7,92	7,82	7,71	7,61	7,5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	Program pemanfaatan potensi unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
6	Program penanaman modal pengembangan usaha	Persentase nilai Investasi PMA, PMDN	7%	9,5%	12%	14,5%	17%	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
D	PEMBANGUNAN KELUARGA							
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Prasejahter	Penduduk Prasejahtera	13,64	12,64	11,64	10,64	9,64	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Keluarga Prasejahtera	13,22	12,22	11,22	10,22	9,22	
2	Peningkatan Pembangunan gender	Indeks Pembangunan gender	87,98	88,505	89,03	89,555	90,08	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat kelompok rentan	Persentase jumlah keluarga mandiri ekonomi	20%	30%	40%	50%	60%	
4	Program pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Persentase jumlah kepala keluarga perempuan mandiri ekonomi	30%	40%	50%	60%	70%	
5	Program Pendampingan dan pembinaan keluarga	Persentase capaian peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	50%	65%	80%	95%	100%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program sosialisasi dan pembinaan pra nikah	Persentase capaian peningkatan akses informasi, pengetahuan, dan kesiapan sebagai calon orang tua	50%	65%	80%	95%	100%	
7	Program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Partisipasi Keluarga Dalam Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	60%	70%	80%	90%	100%	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
	(Bangga Kencana)	Partisipasi Keluarga Dalam Program Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Keluarga	60%	70%	80%	90%	100%	
		Partisipasi Remaja Dalam Kegiatan Generasi Berencana	60%	70%	80%	90%	100%	
		Persentase Kampung KB Aktif	43,11%	58,11%	73,11%	88,11%	100%	
		Presentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	50%	65%	80%	95%	100%	
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	60	65	70	75	80	
		Partisipasi Tri Bina (BKB, BKR, BKL)	60%	70%	80%	90%	100%	
		Partisipasi SOTH	60%	70%	80%	90%	100%	
		Partisipasi Selantang	60%	70%	80%	90%	100%	
8	Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) >= 20 tahun	79%	84%	89%	94%	100%	
9	Program pembinaan, keterampilan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	11,5%	16,5%	21,5%	26,5%	31,5%	
E	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
1	Program dokumen kependudukan	Presentase Penduduk Punya KTP	94%	96%	98%	99%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Komunikasi dan Informatika
		Presentase penduduk Punya Akta Kelahiran	93%	96%	99%	100%	100%	
		Presentase	90%	93%	96%	99%	100%	

No.	Program	Indikator	Target					OPD Penanggung Jawab
			2028	2033	2038	2043	2048	
		penduduk Punya KK						
2	Program pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	90%	93%	96%	99%	100%	
3	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	90%	93%	96%	99%	100%	
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	80%	85%	90%	95%	100%	
5	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	75%	80%	85%	90%	95%	
6	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	75%	80%	85%	90%	95%	
7	Program aplikasi informatika	Persentase aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	40%	50%	60%	70%	80%	

Sumber: Hasil analisis

BAB VIII PENUTUP

Tantangan besar persoalan kependudukan Kabupaten Bangkalan di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Kabupaten Bangkalan akan mencapai tahap windows of opportunity dengan asumsi bahwa jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas dilakukan dengan benar. Selain itu, kunci utama meraih bonus demografi ini terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana melalui komponen peningkatan kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan kualitas penduduk ini tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ditopang oleh tiga komponen besar GDPK yang lain yakni pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semua komponen GDPK di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai.

Permasalahan utama kualitas penduduk Kabupaten Bangkalan adalah masih rendahnya kualitas yang dapat diukur dari angka IPM yang masih rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Jawa Timur. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian.

Selanjutnya, apabila mengacu pada potensi dan permasalahan, serta isu strategis kependudukan di Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa rekomendasi kegiatan prioritas 5 pilar yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan ataupun memaksimalkan potensi kependudukan di Kabupaten Bangkalan, meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan dan akses kesehatan khususnya bagi ibu dan anak.
2. Pendewasaan Usia Pernikahan
3. Peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan kegiatan pembinaan keluarga yang berkualitas
5. Pelatihan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja dengan memperkuat keterhubungan (*link and match*) antara kebutuhan industri dan potensi lokal.
6. Penguatan ekosistem digital di sektor perekonomian
7. Pembangunan Infrastruktur pendukung
8. Sinergi OPD dan penguasaan teknologi bagi aparaturnya pemerintah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan kependudukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas, diperlukan adanya komitmen dari semua pihak terkait untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Koordinasi dan kerjasama dilakukan oleh pelaksana, swasta, LSM, akademisi, masyarakat, dan sebagainya melalui kegiatan sosialisasi, promosi, dan fasilitasi dalam menentukan program-program serta kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Pj. BUPATI BANGKALAN,

ARIEF MOELIA EDIE